

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud yang diartikan sebagai kecurangan adalah setiap tindakan yang disengaja baik oleh pihak yang turut andil dalam *governance* perusahaan, anggota manajemen perusahaan, atau pihak ketiga dengan melakukan penipuan untuk memperoleh keuntungan yang ilegal dan merugikan orang lain (IAASB, 2014). Selain itu, *fraud* adalah setiap tindakan ilegal dan melanggar hukum yang mengandung unsur kecurangan yang disengaja (IIA, 2009). Praktik-praktik *fraud* secara umum menyebabkan kerugian bagi negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Survei yang telah dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter (2017), mengungkapkan bahwa pemerintah dianggap sebagai organisasi yang mutlak dirugikan atas terjadinya *fraud* dengan hasil survai sebesar 81.2%. Pihak yang paling dirugikan dengan adanya *fraud* pemerintah adalah perusahaan-perusahaan berstatus BUMN sebanyak 58.8%. *Fraud* yang terjadi di pemerintahan berdasarkan BPK (2018) yaitu terdapat 447 temuan pemeriksaan berindikasi pidana senilai Rp. 33.52 triliun dan US\$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen dengan Rp. 44.93 Triliun.

Berdasarkan Hasil Survei ACFE dan data BPK, maka perlu ditemukan suatu cara yang dapat mendeteksi tindakan *fraud*. Telah banyak metode yang ditemukan untuk mendeteksi tindakan *fraud*, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah metode-metode tersebut efektif untuk mendeteksi suatu tindakan *fraud*. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemeriksaan investigatif berpengaruh baik secara

parsial maupun simultan dalam mendeteksi *fraud* dan paling efektif dalam mengungkap *fraud*, sehingga jika seorang auditor menggunakan kemampuan investigasinya dalam memeriksa akan lebih mudah dalam mendeteksi *fraud* (Fauzan dkk, 2015; Rozali dan Darliana, 2015; Dewi dan Ramantha, 2016). Selain itu, pemeriksaan investigatif yang efektif dalam mendeteksi *fraud*, dikarenakan pemeriksa yang ditugaskan dituntut untuk mengumpulkan bukti pemeriksaan yang layak, cukup dan tepat, agar bukti tersebut dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan guna mendeteksi dan mengungkapkan indikasi adanya tindakan *fraud* yang terjadi (Dewi dan Ramantha, 2016). Hal tersebut sesuai dengan BPK (2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan investigatif adalah upaya mencari kebenaran, dengan memperhatikan keadilan dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pemeriksaan termasuk pengumpulan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian, sehingga bukti tersebut dapat diterima di pengadilan.

Untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat digunakan di pengadilan, maka diperlukan sumber yang relevan dan tepat dalam proses pencarian dan pembuktian bukti yang dikumpulkan. Salah satu sumber yang paling berguna atau alat yang penting dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*, korupsi, serta malpraktek lainnya yaitu informasi yang diberikan oleh *whistleblower* (Dye, 2007; *Transparency International*, 2010). *Whistleblowing* merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi atas perbuatan ilegal, tidak bermoral atau praktik tidak sah di bawah kendali pimpinan perusahaan kepada orang tertentu atau kepada organisasi (Near dan Miceli, 1985). Menurut Jubb (1999)

whistleblowing adalah pengungkapan kepada publik yang dibuat oleh seseorang yang memiliki akses khusus atas data atau informasi dari suatu organisasi mengenai tindakan ilegal. Valentina, Dewi, dan Andrisman (2017) menyatakan bahwa tindak pidana korupsi ditemukan, karena adanya informasi yang berasal dari aduan atau laporan dari laporan pegawai atau orang dalam.

Dalam penelitian-penelitian terdahulu tentang *whistleblowing*, peran *whistleblower* berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan pemeriksaan investigatif dalam pengungkapan kecurangan (Rahmayani, Kamaliah, dan Susilatri, 2014). *Whistleblowing system* merupakan mekanisme yang efektif untuk mendeteksi *fraud* (MacGregor dan Stuebs 2007). Tip dari pegawai juga dianggap sebagai metode yang paling umum dalam mendeteksi *fraud* (Dyck, Morse dan Zingales, 2010) dan *whistleblowing* memiliki saluran pelaporan anonim efektif dalam mendeteksi *fraud* yang terjadi (Johansson dan Carey, 2016). Lebih detail lagi Samuels dan Pope (2014) menunjukkan bahwa dengan adanya *whistleblowing*, mampu mendeteksi tindakan *fraud* sebesar 40%. Didukung dengan hasil survey AICPA (2011 dan 2014) yang menunjukkan terjadi peningkatan penggunaan metode *whistleblowing* dalam mendeteksi *fraud* dari 6% pada tahun 2011 menjadi 26% pada tahun 2014.

Penelitian sebelumnya oleh Johanson dan Carey (2016) melakukan pengujian *whistleblowing* melalui saluran pelaporan anonim untuk pendeteksian *fraud*, namun belum menguji unsur pemeriksaan investigatif dalam pendeteksian *fraud*. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyck, Morse dan Zingales (2010) dan Samuels dan Pope (2014). Penelitian oleh Rozali dan Darliana (2015)

dan Fauzan, dkk (2014) menguji pengaruh pemeriksaan investigatif terhadap pengungkapan *fraud* tanpa menguji *whistleblowing* untuk mendeteksi *fraud*. Penelitian lain yang sudah menguji keefektifan *whistleblowing* dalam pemeriksaan investigatif untuk mendeteksi *fraud* telah dilakukan oleh Rahmayani, dkk (2014), tetapi penelitian tersebut masih dilakukan secara umum tanpa menguji keefektifan *whistleblowing* pada pemeriksaan investigatif dalam mendeteksi *fraud* pada tahapan pemeriksaan investigatif tertentu, apakah pada tahapan praperencanaan, perencanaan, pelaksanaan, atau pelaporan pemeriksaan investigatif. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu berfokus pada *fraud* secara umum.

Pada penelitian ini, peneliti mengajukan model yang masih jarang ditemukan dan lebih komprehensif yaitu dengan menggabungkan penelitian yang dilakukan Johanson dan Carey (2016), Dyck, Morse dan Zingales (2010), Samuels dan Pope (2014), Fauzan, dkk (2014), Rozali dan Darliana (2015), dan Rahmayani, dkk (2014) yaitu pengujian keefektifan *whistleblowing* dalam mendeteksi *fraud*, lalu pengujian keefektifan *whistleblowing* pada pemeriksaan investigatif dengan menambah variabel baru yang belum pernah diuji sebelumnya yaitu tahapan praperencanaan pemeriksaan investigatif dan tahapan pelaksanaan pemeriksaan investigatif dalam mendeteksi *fraud*.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa agar pelaksanaan pemeriksaan investigatif berhasil, maka metode tersebut dapat menggunakan sumber dari *whistleblowing* dalam proses pengumpulan dan pembuktian dari bukti yang akan digunakan mendeteksi dan mengungkapkan

fraud. Hal ini dikarenakan melalui *whistleblowing*, pemeriksa yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan investigatif mendapatkan informasi relevan yang akan menuntun mereka pada bukti yang diharapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki lima rumusan masalah yang dipecahkan dalam kegiatan penelitian.

Rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimanakah pendeteksian *fraud* pada institusi pemerintah?
2. Bagaimanakah praperencanaan pemeriksaan investigatif pada institusi pemerintah?
3. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada institusi pemerintah?
4. Bagaimanakah pelaksanaan *whistleblowing* pada institusi pemerintah?
5. Bagaimanakah *whistleblowing* dapat mempengaruhi praperencanaan pemeriksaan investigatif dalam pendeteksian *fraud*?
6. Bagaimana *whistleblowing* dapat mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan investigatif dalam pendeteksian *fraud*?
7. Bagaimanakah praperencanaan pemeriksaan investigatif efektif dalam mendeteksi *fraud*?
8. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan investigatif efektif dalam mendeteksi *fraud*?
9. Bagaimanakah *whistleblowing* dapat mempengaruhi deteksi *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian:

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui jawaban masalah-masalah yang telah diidentifikasi oleh peneliti dalam rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui pendeteksian *fraud* pada institusi pemerintah.
2. Untuk mengetahui praperencanaan pemeriksaan investigatif pada institusi pemerintah.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada institusi pemerintah.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan *whistleblowing* pada institusi pemerintah.
5. Untuk mengetahui peran *whistleblowing* terhadap praperencanaan pemeriksaan investigatif dalam pendeteksian *fraud*.
10. Untuk mengetahui peran *whistleblowing* terhadap pelaksanaan pemeriksaan investigatif dalam pendeteksian *fraud*.
11. Untuk mengetahui keefektifan praperencanaan pemeriksaan investigatif dalam mendeteksi *fraud*.
12. Untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan pemeriksaan investigatif dalam mendeteksi *fraud*.
13. Untuk mengetahui bagaimana *whistleblowing* dalam deteksi *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Dari segi teori, penelitian ini akan memberikan referensi berupa pengetahuan tentang metode yang efektif untuk mendeteksi *fraud* yang bersumber dari

whistleblowing dan pedeteksian *fraud* melalui praperencanaan serta pelaksanaan pemeriksaan investigatif.

2. Dari segi praktik, penelitian ini akan menjelaskan sejauh mana metode yang ditawarkan dalam penelitian ini dalam mendeteksi *fraud*. Harapan dari penelitian ini dapat membantu lembaga tinggi negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam menggunakan metode yang efektif untuk mendeteksi *fraud*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab pembahasan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab pendahuluan diuraikan latar belakang masalah dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

Bab II. Landasan Teori

Pada bab landasan teori dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan teori yang relevan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu serta riset-riset terkait judul penelitian, menjelaskan hipotesis, dan kerangka penelitian.

Bab III. Metodologi Penelitian

Pada bab metodologi penelitian secara detail dijelaskan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan sampel, metode pengambilan data, proses penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Pada bab ini diuraikan hasil analisis data yang diperoleh dengan menggunakan sampel dan alat analisis yang diperlukan. Selain itu, pada bab ini dijelaskan mengenai keefektifan *whistleblowing* pada tahapan praperencanaan dan tahapan pelaksanaan pemeriksaan investigatif dalam mendeteksi *fraud*.

Bab V. Kesimpulan

Pada bab ini memuat intisari akhir dari penelitian ini, kontribusi dan implikasi, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Agency Theory*

Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu tata kelola pemerintahan yang baik dan *fraud*. Masalah keagenan (*agency problem*) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross (1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dikemukakan pertama kalinya oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyebutkan manajer sebagai “*agent*” dan pemegang saham sebagai “*principal*”. Pemegang saham yang merupakan *principal* mendelegasikan pengambilan keputusan kepada manajer yang merupakan perwakilan atau *agent* dari pemegang saham. Permasalahan muncul ketika *agent* tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik *principal* (Messier et al, 2006).

Pada dasarnya organisasi sektor publik atau negara demokrasi modern dibangun atas dasar teori keagenan dan terdapat hubungan serta masalah keagenan (Halim dan Abdullah, 2005; Bergman dan Lane, 1990). Konsep ekonomika organisasi sektor publik didasarkan pula pada serangkaian hubungan *principal-agent* (Moe, 1984). Hubungan dan masalah keagenan tercermin dalam pendelegasian dan kesepakatan-kesepakatan pada proses anggaran: pemilih-legislator, legislator-eksekutif, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat dan pejabat-pemberi pelayanan (Moe, 1984; Gilardi, 2001; Strom, 2000). Pertanggungjawaban pemerintah sebagai “*agent*” untuk menyajikan laporan dan

mengungkapkan segala aktivitas merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan kepada pemberi mandat yaitu masyarakat sebagai “*principal*”. Pertanggungjawaban tersebut disebut akuntabilitas (Sabarno, 2007).

Teori keagenan memandang bahwa adanya asimetri informasi antara pihak pemerintah yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme pengawasan dan keseimbangan agar dapat mengurangi asimetri informasi (Mardiasmo, 2002).

Selain asimetri informasi, teori keagenan menjelaskan bahwa *conflict of interest* dimana tujuan masyarakat sebagai *principal* dan tujuan pemerintah sebagai *agent* yang berbeda dapat memunculkan permasalahan, karena *agent* cenderung untuk mengejar tujuan pribadi (Fama dan Jensen, 1983). Untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok, *agent* dapat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan bersama, bahkan melakukan kecurangan-kecurangan (*fraud*) yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tindak pidana korupsi.

2.2 Fraud

Fraud diterjemahkan sebagai kecurangan (IAI, 2001). *Fraud* sama dengan *error* dan *irregularities* yang didefinisikan sebagai kesalahan atau kekeliruan (IAI, 2001). Suatu kesalahan atau kekeliruan yang tanpa didasari niat dan tidak ada keuntungan yang diperoleh akibat terjadinya kesalahan, maka kesalahan tersebut

bukanlah suatu perbuatan yang dikategorikan *fraud*. Tetapi jika kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja dan ada tujuan khusus yang akan dicapai, maka perbuatan tersebut adalah *fraud* (BPK, 2008).

Menurut Davia, et al (2000) memperkirakan 40% dari seluruh kasus *fraud* tidak pernah terungkap. Hal ini dikenal dengan istilah fenomena gunung es. Fenomena gunung es sesuai dengan salah satu aksioma *fraud* oleh ACFE (2016) yang menyatakan bahwa *fraud* itu tersembunyi (*fraud is hidden*). Banyak cara yang digunakan para pelaku *fraud* untuk menyembunyikan *fraud* yang telah dilakukan dan terkadang amat kreatif sehingga cukup sulit bagi pemeriksa untuk mendapat mendeteksi *fraud* yang terjadi .

2.2.1 Jenis *Fraud*

Fraud diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu korupsi, kecurangan laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset (ACFE, 2016). Masing-masing jenis *fraud* dijelaskan pada sub bab di bawah ini.

2.2.1.1 Korupsi

Korupsi terbagi menjadi empat jenis (ACFE, 2001) yaitu konflik kepentingan, penyuapan, pemerasan, dan gratifikasi ilegal. Konflik kepentingan terjadi ketika eksekutif perusahaan, manajer, dan karyawan bertindak untuk kepentingan pribadi atas transaksi perusahaan yang berakibat tidak baik. Penyuapan adalah pemberian, penerimaan, penawaran, atau permohonan oleh pihak eksternal kepada pihak internal yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. Pemerasan pada dasarnya kebalikan dari penyuapan, pemerasan dilakukan oleh pihak internal

kepada pihak eksternal untuk keputusan yang akan menguntungkan pihak eksternal. Gratifikasi ilegal merupakan imbalan yang diberikan pihak eksternal kepada pihak internal karena telah dibuat keputusan yang menguntungkan pihak eksternal.

2.2.1.2 Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan didefinisikan sebagai salah saji material (baik *misstatement* maupun *overstatement*) dalam laporan keuangan secara sengaja oleh manajemen yang merugikan *shareholder* dan *stakeholder* (GAAS, 2016; ACFE, 2016). Salah saji secara sengaja berupa penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan antara lain dalam bentuk (IAI, 2001):

- a. Pemalsuan, perubahan, atau manipulasi atas transaksi, catatan akuntansi, atau dokumen pendukung yang menjadi sumber data dalam menyajikan laporan keuangan.
- b. Secara sengaja salah menerapkan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan pengklasifikasian, penyajian dan pengungkapan pada akun-akun laporan keuangan.
- c. Secara sengaja menghilangkan suatu peristiwa atau informasi yang signifikan.

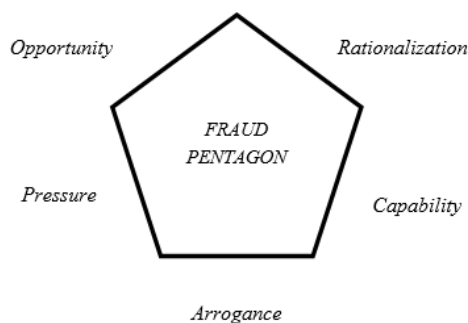
2.2.1.3 Penyalahgunaan Aset

Penyalahgunaan aset adalah mengambil aset secara tidak sah (melawan hukum) baik yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang atas aset tersebut ataupun orang yang tidak memiliki wewenang atas aset tersebut. Aset

yang disalahgunakan dapat berupa kas, persediaan, aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (ACFE, 2016). Penyalahgunaan aset atau perlakuan tidak semestinya terhadap aset dapat dilakukan dengan beberapa cara antar lain pencurian aset, penggelapan tanda terima barang atau uang, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar harga barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas (IAI, 2001).

2.2.2 Faktor Pendorong terjadinya *fraud*

Fraud dapat terjadi karena ada beberapa faktor pendorong yaitu motif individu dan motif perusahaan. Motif individu yaitu motif yang mendorong seseorang melakukan *fraud* yang berasal dari diri pelaku dan orang-orang di sekitar pelaku. Teori awal yang mendukung motif individu untuk melakukan *fraud* yaitu *fraud triangle* yang menyebutkan terdapat tiga *risk factor* yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yaitu *pressure* (dorongan atau tekanan), *opportunity* (peluang atau kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi atau pembenaran) (Cressey, 1953). *Fraud triangle* berkembang menjadi *fraud diamond* yang menambahkan satu faktor pendorong terjadinya *fraud* yaitu *capability* (adanya kemampuan) untuk melakukan *fraud* (Wolfe dan Hermanson, 2004). Teori terbaru mengenai motif individu untuk melakukan *fraud*, yaitu *fraud pentagon* yang merupakan pengembangan dari *fraud triangle* dan *fraud diamond* terdiri dari *opportunity*, *rationalization*, *pressure*, *capability* dan *arrogance* (Crowe, 2011). Teori *fraud diamond* merubah *risk factor fraud* berupa *capability* menjadi *competence* (kemampuan) yang memiliki kesamaan arti dan menambah *risk factor* berupa *arrogance* (sifat arogan). Berikut Gambar 2.1 mengenai *fraud pentagon*.



Gambar 2.1 Fraud Pentagon

Berikut ini penjelasan untuk masing-masing faktor pada *fraud triangle*, *fraud diamond*, dan *fraud pentagon*:

a. Pressure

Tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*. Faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan *fraud* antara lain faktor keuangan dan atau non keuangan yang dihadapi oleh pegawai/manajemen yang sulit dipecahkan dengan cara yang legal atau etis (Moeller, 2009), ketidakpuasan kompensasi (Sulistiyowati, 2007), persepsi keadilan organisatoris (Rae dan Subramaniam, 2008; COSO, 2004; Holtfreter, 2004), penghasilan kurang, kebutuhan hidup yang tak tercukupi (Wahyudi dan Sopanah, 2010).

b. Opportunity

Peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya terjadi karena internal kontrol organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Beberapa penelitian terkait dengan *opportunity* yaitu pentingnya pengendalian internal (Wilopo, 2006; Setiawan dan Helmayunita, 2017), dan kepatuhan terhadap pengendalian internal yang rendah (Thoyibatun, 2012).

Semakin baik pengendalian internal birokrasi pemerintahan, semakin rendah kecurangan yang terjadi (Wilopo, 2006). *Fraud* dapat terjadi karena adanya *opportunity* yang disebabkan kelemahan prosedur otorisasi, tidak ada pemisahan wewenang yang jelas, tidak ada penilaian independen mengenai kinerja, dokumen dan pencatatan kurang memadai (*The Institute Internal Auditors*, 2009).

c. Rationalization

Rationalization adalah pembenaran kepada dirinya sendiri atau alasan yang berkesan untuk membenarkan tindakan *fraud* dan beranggapan sebagai sesuatu hal yang wajar untuk dilakukan (Shelton, 2014). Pelaku *fraud* biasanya mencari alasan pembenaran bahwa apa yang dilakukannya merupakan haknya, bukan kecurangan bahkan merasa apa yang dilakukannya sah-sah saja dan sesuai dengan kode etik.

d. Competence atau capability

Keahlian karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengamati kondisi sosial untuk memeneuhi kepentingan pribadinya (Crowe, 2011).

e. Arrogance

Merupakan sifat superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa pengendalian internal dan kebijakan perusahaan tidak berlaku bagi dirinya (Crowe, 2011).

2.3 Pemeriksaan Investigatif

Pemeriksaan investigatif adalah pemeriksaan dengan tujuan khusus yaitu untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan (*fraud*),

ketidakteraturan (*irregulaties*), pengeluaran ilegal (*illegal expansion*) atau penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) di bidang pengelolaan keuangan negara, yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang harus diungkapkan oleh pemeriksa, serta ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, kejaksaan atau kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fauzan dkk, 2015). Sedangkan tujuan pemeriksaan investigatif adalah mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan di dalam pemeriksaan investigatif relatif berbeda dengan pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan di dalam pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya (Rahmayani, 2014).

Pemeriksaan investigatif salah satu tindakan yang efektif dalam memerangi korupsi. Salah satu lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan investigatif yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Undang-undang, 2006). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, yaitu untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan

investigatif. Pemeriksaan investigatif merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan prosedur eksaminasi.

Pemeriksaan investigatif dilakukan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana (Undang-undang, 2004). Pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Pernyataan Standar Pemeriksaan (PS) Nomor 06 dan 07, menyatakan bahwa tujuan tersebut dicapai dengan cara mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (*fraud*), serta ketidakpatutan (*abuse*). Penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah penyimpangan yang mengandung unsur pidana terkait dengan hal yang diperiksa.

Tahapan pemeriksaan investigasi yang dijelaskan pada Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif terbagi menjadi praperencanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tabel 2.1 menyebutkan tahapan pemeriksaan investigatif.

Tabel 2.1

Tahapan Pemeriksaan Investigatif

Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif	Perencanaan Pemeriksaan Investigatif	Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif	Pelaporan Pemeriksaan Investigatif
1. Memperoleh Informasi Awal (IA)	5. Mengembangkan hipotesis	7. Mengumpulkan bukti	11. Menyusun konsep hasil pemeriksaan
2. Memverifikasi IA	6. Menyusun Petunjuk Pemeriksaan	8. Menganalisis dan mengevaluasi bukti	12. Finalisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
3. Menganalisis IA		9. Menyusun konsep simpulan	
4. Menyimpulkan hasil analisis IA		10. Mendiskusikan konsep simpulan	

Sumber: BPK (2008)

Penjelasan untuk tahapan pemeriksaan investigatif dimulai pada tahapan praperencanaan pemeriksaan investigatif. Pada tahapan ini terdapat empat kegiatan yaitu memperoleh informasi awal (IA), memverifikasi IA, menganalisis IA dan menyimpulkan hasil analisis IA. IA adalah keterangan, permulaan mengenai suatu pemeriksaan investigatif tindak pidana. Tidak semua informasi yang diterima sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan investigatif memiliki keandalan dan validitas yang sama. Oleh karena itu, untuk setiap informasi awal yang diterima perlu dilakukan verifikasi dan analisis atas informasi awal terlebih dahulu. Informasi awal dapat bersumber dari luar maupun internal BPK. Sumber internal dapat berupa Temuan Pemeriksaan (TP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan inisiatif Badan. Sumber eksternal misalnya permintaan instansi berwenang, instansi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/D), LHP Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dan pengaduan masyarakat.

Tahapan perencanaan pemeriksaan investigatif bertujuan agar pelaksanaan pemeriksaan investigatif berjalan efisien dan efektif serta mencapai tujuan. Pada tahapan ini terdapat dua kegiatan yaitu mengembangkan hipotesis dan menyusun petunjuk pemeriksaan. Pengembangan hipotesis adalah kesimpulan sementara berdasarkan hasil penelaahan informasi awal atas pemeriksaan investigatif tindak pidana, sedangkan tujuan dari penyusunan petunjuk pemeriksaan investigatif adalah untuk menentukan langkah-langkah pemeriksaan dalam rangka membuktikan hipotesis. Petunjuk pemeriksaan merupakan bagian dari Program Pemeriksaan (P2).

Selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan pemeriksaan investigatif, pada tahapan ini pemeriksa investigatif telah memiliki hipotesis awal yang berisi mengenai: apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana penyimpangan yang berindikasi tindak pidana (PITP) dilakukan/kerugian yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan investigatif adalah mengumpulkan bukti untuk mendukung hipotesis. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan investigatif meliputi mengumpulkan bukti, menganalisis dan mengevaluasi bukti, menyusun konsep simpulan, dan mendiskusikan konsep simpulan.

Tahapan terakhir pemeriksaan investigatif yaitu pelaporan pemeriksaan investigatif. Tujuan dari pelaporan pemeriksaan investigatif adalah menyampaikan pemeriksaan investigatif tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan investigatif kepada instansi berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan. Tahapan pelaporan pemeriksaan investigatif yaitu Penyusunan Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) dan finalisasi simpulan. Hasil dari tahapan pelaporan pemeriksaan investigatif yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif atau LHP Investigatif. LHP Investigatif merupakan dokumen tertulis yang berisi simpulan hasil pemeriksaan investigatif. Seluruh informasi dan bukti yang relevan yang diperoleh pemeriksa dirangkai dan diungkapkan menjadi sebuah laporan yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh instansi berwenang.

Penelitian ini akan difokuskan di tahapan praperencanaan pemeriksaan investigatif pada langkah yang pertama yaitu memperoleh informasi awal. Pada tahapan pelaksanaan pemeriksaan investigatif difokuskan pada langkah ke tujuh yaitu mengumpulkan bukti. Dasar penentuan kedua tahapan tersebut yaitu untuk

memperoleh informasi awal dan bukti yang dibutuhkan, salah satunya bersumber dari *whistleblowing*. Peneliti menggunakan kedua tahapan untuk menganalisis pengaruh *whistleblowing* dalam pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK untuk mendeteksi *fraud*.

2.4 Whistleblowing

Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, tidak etis atau tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan dalam suatu organisasi atau yang dilakukan oleh seorang pimpinan kepada pimpinan organisasi lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut (KNKG, 2008). Menurut Hertanto (2009), *whistleblowing* dikategorikan menjadi dua jenis yaitu internal *whistleblowing* dan eksternal *whistleblowing*. Internal *whistleblowing* adalah *whistleblowing* kepada pihak di dalam organisasi atau melalui saluran yang disediakan organisasi (Miceli, Near, Dworkin, 2009). Sedangkan eksternal *whistleblowing* adalah pengungkapan kepada pihak di luar organisasi (Kaptein, 2011).

Dalam penelitian ini *whistleblower* yang dimaksud adalah *whistleblower* berdasarkan Undang-undang (2006) yaitu sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Untuk dapat disebut sebagai *whistleblower* setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar (Menteri PANRB, 2013). Kriteria pertama, *whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan

mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. Kriteria kedua, seorang *whistleblower* merupakan orang "dalam", yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau di tempatnya berada

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk memperkaya teori yang digunakan. Adapun hasil penelitian yang digunakan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai *whistleblowing*, pemeriksaan investifatif dan pendeteksian *fraud*. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang berhubungan dengan dengan penelitian.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, dan Alat Analisis	Hasil
1.	Johanson dan Carey (2016)	Independen : - <i>Anonymous Reporting Channel</i> Kontrol: - <i>Corporate Governance</i> Dependen: - <i>Fraud</i>	- Pendekatan Kuantitatif - Responden: 231 perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek - Alat analisis SPSS	Terdapat hubungan positif antara keberadaan saluran pelaporan anonim (<i>whistleblowing</i>) dengan <i>fraud</i> yang dilaporkan. Dijelaskan juga bahwa organisasi yang memiliki saluran pelaporan anomin mendeteksi <i>fraud</i> lebih banyak.

Tabel 2.2

Lanjutan

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, dan Alat Analisis	Hasil
2.	Fauzan, et al (2014)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntansi Forensik - Audit investigasi <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan kuantitatif - Responden: populasi auditor investigasi BPKP Perwakilan Jawa Barat - Alat analisis SPSS 	Terdapat pengaruh yang signifikan antara audit investigatif terhadap pengungkapan <i>fraud</i>
3.	Rahmayani, dkk (2014)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan auditor - Skeptisme profesional auditor - Teknik audit - <i>Whistleblower</i> <p>Moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit investigasi <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengungkapan kecurangan (<i>fraud</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan kuantitatif - Responden: Auditor BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Riau jumlah sample 47 orang. - Alat analisis SPSS 	Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa peran <i>whistleblower</i> berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan, artinya hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan diterima
4.	Wuysang, Nagoi dan Pontoh (2016)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntansi Forensik - Audit investigasi <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan kualitatif - Data sekunder yaitu data dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 	Penugasan di bidang Investigatif yang dilakukan adalah aplikatif dan berfungsi efektif dalam menangani kasus-kasus <i>fraud</i> yang terungkap dalam pengelolaan keuangan daerah, bahkan bukan hanya bersifat represif tetapi juga dapat bersifat preventif dalam konteks pemberian efek jera bagi pelaku <i>fraud</i> untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan <i>fraud</i> .

Tabel 2.2

Lanjutan

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, dan Alat Analisis	Hasil
5.	Pamungkas, Ghozali, dan Achmad (2016)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Whistleblowing system</i> <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Finansial statements fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan Kuantitatif - Responden: Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan 	<i>Whistleblowing system</i> secara positif mempengaruhi <i>fraud</i> melalui <i>ethical behaviour</i>
6.	Panjaitan (2018)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Whistleblowing</i> <p>Moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit forensik <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan korupsi (<i>fraud</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan kuantitatif - Responden: 31 orang yang ahli di bidang akuntansi, audit, dan pajak di Medan - Alat Analisis SPSS 	Variabel <i>whistleblowing</i> berpengaruh signifikan terhadap audit forensik dalam pengungkapan tindakan korupsi oleh auditor pemerintah
7.	Jasmin (2015)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan auditor investigatif <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan (<i>fraud</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan Kuantitatif - Responden: 30 orang auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 	Kemampuan auditor investigatif berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam pembuktian kecurangan (<i>fraud</i>)

Tabel 2.2**Lanjutan**

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, dan Alat Analisis	Hasil
8	Chamunorwa (2015)	Independen: - <i>Whistleblowing</i> Dependen: <i>Fighting corruption (fraud)</i>	<ul style="list-style-type: none">- Pendekatan kuantitatif- Responden: 98 pegawai pada Stellencosch Municipality- Alat Analisis STATISTICA	Pegawai akan melaporkan korupsi yang terjadi melalui saluran kecurangan (<i>Fraud Hotline</i>) karena <i>fraud hotlines</i> menjaga kerahasiaan pelapor dan melindungi pelapor dari pembalasan oleh orang yang dilaporkan

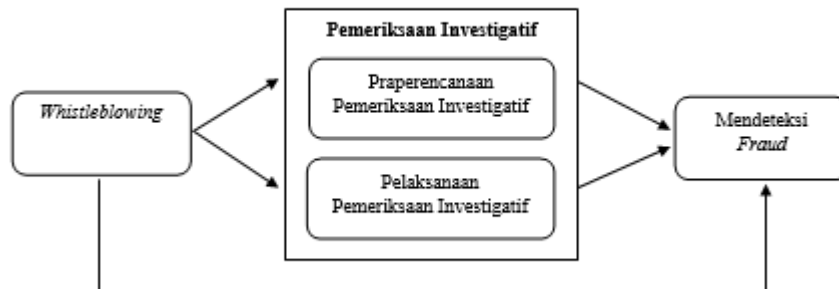
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu dari segi variabel yang digunakan yaitu hanya satu penelitian yang menggabungkan tiga variabel (whistleblowing, pemeriksaan investigatif, dan deteksi fraud). Namun penelitian oleh Rahmayani, Kamaliah, dan Susilatri (2014), pada variabel pemeriksaan investigatif tidak terdapat tahapan-tahapan mana yang dilakukan penelitian, apakah tahap praperencanaan, perencanaan, pelaksanaan ataupun pelaporan pemeriksaan investigatif.

Perbedaan dari segi metode, tujuh penelitian menggunakan metode kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sampel yang digunakan antara lain perusahaan yang terdaftar di bursa efek, populasi pemeriksa investigasi BPKP, Mahasiswa Fakultas Ekonomi, para ahli di bidang akuntansi dan audit kantor akuntan publik serta pegawai perusahaan. Sampel penelitian ini yaitu pemeriksa BPK dengan sertifikasi CFE dan atau CFra. Untuk alat analisis,

penelitian-penelitian kualitatif tersebut menggunakan SPSS dan STATISTICA, pada penelitian ini menggunakan Nvivo.

2.6. Kerangka Penelitian

Kerangka konseptual ini dibuat bertujuan untuk mempermudah dalam memahami pengaruh *whistleblowing* terhadap pemeriksaan investigatif untuk mendeksi *fraud*. Penelitian ini menggunakan satu variabel independen yaitu *whistleblowing*, dua variabel intervening yaitu praperencanaan pemeriksaan investigatif dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif serta satu variabel dependen yaitu mendeteksi *fraud*. Adapun hubungan antar variabel dalam kerangka penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2

Kerangka Konseptual Pengaruh *Whistleblowing* Pada Pemeriksaan Investigatif Untuk Mendeteksi *Fraud*

Berdasarkan kerangka konseptual pada gambar di atas, penelitian ini akan mengeksplorasi pengaruh secara langsung variabel *whistleblowing* dalam mendeteksi *fraud* dan pengaruh secara tidak langsung variabel *whistleblowing* dalam mendeteksi *fraud* melalui efektifitas praperencanaan dan pelaksanaan

pemeriksaan investigatif sebagai kegiatan untuk mendeteksi kecurangan pada sektor pemerintahan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan pendekatan alamiah yang bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi (Flick, 2013). Sedangkan menurut Clissett (2008), penelitian kualitatif mencakup pendekatan yang luas pada pengalaman manusia, persepsi, motivasi, dan tingkah laku. Didukung pernyataan oleh Creswell dan Clark (2007) yang menyatakan bahwa metodologi kualitatif sangat sesuai untuk memahami isu personal dan isu sosial yang kompleks. Serta pernyataan dari Thomson (2008) yang meyakini bahwa perbedaan yang sangat nyata antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif yaitu bahwa penelitian kuantitatif lebih fokus pada pengukuran komponen yang ada dalam isu penelitian, sedangkan penelitian kualitatif lebih fokus pada menciptakan gambaran secara keseluruhan hal yang dijadikan isu.

Berdasarkan Leedy dan Ormrod (2005), metode penelitian kualitatif digunakan untuk kondisi; (a) ketika informasi yang tersedia mengenai topik yang dibahas masih jarang (b) ketika variabel peneliti tidak jelas dan tidak diketahui (c) ketika teori yang relevan sulit dicari keterkaitannya. Penelitian kualitatif tidak ditujukan untuk mengetes hipotesis tetapi metode ini lebih condong untuk mendiskripsikan, menganalisis, dan mengintegrasikan aspek yang membangun dunia dan sosial

(McLeod, 2001). Sebagai hasilnya, metode ini membantu peneliti menemukan teori yang berguna dalam penelitian (Leedy dan Ormrod, 2005; Creswell, 2007).

Hasil temuan penelitian kualitatif digunakan untuk menggeneralisasikan suatu teori daripada membuktikannya secara populasi (Greener, 2008). Terlebih lagi, penelitian kualitatif lebih menaruh perhatian pada kedalaman hasil temuan daripada luas cakupan temuan (Shank, 2002; Collis dan Hussey, 2003; Hennink, Hutter dan Bailey, 2011).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisis, dan mengintegrasikan aspek yang membangun dunia sosial secara mendalam.

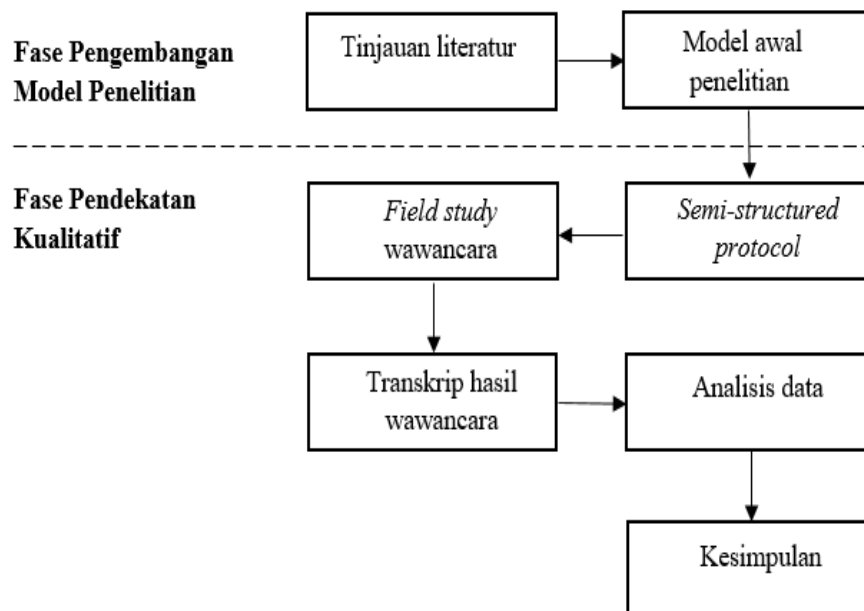
Alasan peneliti memilih metode ini yaitu:

1. Kondisi dimana informasi yang tersedia mengenai topik dan teori yang relevan masih jarang ditemui.
2. Metode penelitian kualitatif deskriptif berguna untuk mendapatkan perspektif lain dan teori serta gambaran baru dari permasalahan yang berkaitan dengan bidang sosial.
3. Hasil penelitian berbentuk alternatif model, sehingga metode deskriptif kualitatif akan sesuai jika diterapkan dalam penelitian ini.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas pemeriksaan investigatif baik pada praperencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dalam mendeteksi *fraud* yang menggunakan *whistleblowing* sebagai sumbernya dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah gambaran umum tentang bagaimana peneliti menjawab rumusan permasalahan yang telah ditentukan (Saunders, Lewis, dan Thornhill, 2008). Sistematika penelitian ini terdiri dari dua tahapan yaitu dimulai dari fase pengembangan model awal penelitian kemudian dilanjutkan pada fase pendekatan kualitatif yang diilustrasikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1
Desain Penelitian

Fase pertama yaitu pengembangan model awal penelitian terdapat dua langkah yaitu melakukan tinjauan literatur dan didapatkan model awal penelitian. Tinjauan literatur yaitu kajian khasanah pustaka yang mendukung dalam penelitian (Fraenkel, Wallen, dan Hyun, 2012). Sedangkan tujuan tinjauan literatur adalah untuk mengidentifikasi relasi atau hubungan yang mungkin antara *whistleblowing*

dalam pemeriksaan investigasi untuk mendeteksi *fraud*. Setelah dilakukan tinjauan literatur langkah selanjutnya yaitu menentukan model awal yang akan digunakan dalam penelitian.

Fase kedua yaitu pendekatan kualitatif yang terdiri dari pembuatan *semi-structure protocol*, *field study*-wawancara, *transcript* hasil wawancara, analisis data menggunakan NVivo dan model akhir penelitian. *Semi-structure protocol* disusun berdasarkan literatur yang berkaitan untuk kemudian digunakan dalam *semi-structure structured interviews*. *Semi structured interviews* yaitu suatu metode tanya jawab yang berisi rangkaian pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegunaan dari metode ini adalah untuk mendapatkan dan menggali informasi dari seorang informan serta mengidentifikasi risiko berdasarkan dari pandangan informan. Rangkaian pertanyaan yang digunakan sebagai panduan dalam mewawancarai informan dapat dilihat pada Lampiran 1. Setelah dilakukan wawancara, hasil wawancara akan ditranskrip terlebih dahulu untuk kemudian dianalisis menggunakan *software* NVivo.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis dalam penelitian (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemeriksa investigatif yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus *fraud* di Indonesia. Sampel adalah kelompok kecil atau bagian dari elemen –elemen populasi yang terdiri dari beberapa orang, objek atau item dari populasi yang telah diseleksi yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan tentang keseluruhan populasi (Cooper dan Pamela, 2001).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling* dengan cara *purposive sampling*. Teknik *convenience sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang diterapkan untuk mendapatkan informan yang bersedia untuk diwawancarai (Baran & Jones, 2016). Sedangkan *pusposive sampling* yaitu partisipan dipilih dengan katergori tertentu yang kaya akan informasi untuk penelitian yang mendalam (Patton, 1990; Latham, 2007).

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif menggunakan sampel yang sedikit, dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan lebih khusus (Nasution, 1992). Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 15 orang informan yang merupakan pemeriksa khusus investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas di Auditorat Unit Investigatif dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pernah melakukan pemeriksaan investigasi dengan pengalaman minimal 10 tahun.
- b. Terlibat dalam penyusunan program pemeriksaan investigatif baik pada pra perencanaan maupun perencanaan pemeriksaan investigatif.
- c. Memiliki sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dan atau Certified Forensic Auditor (CFrA).

Informan dipilih secara spesifik karena dibutuhkan kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan yang memadai untuk menjawab rumusan masalah. Alasan pemilihan sampel pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah karena pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya pemeriksa internal dari institusi pemerintah sehingga pemeriksa BPK sesuai untuk mewakili institusi

pemerintah. Pengambilan sampel dari BPK Pusat, karena pelaksanaan pemeriksaan investigatif hanya dapat dilakukan oleh Auditorat Unit Investigasi (AUI) yang hanya ada di pusat, tidak ada di perwakilan BPK. Penerapan di lapangan, apabila diperlukan, dapat pula disertakan pemeriksa dari perwakilan yang memiliki keterkaitan dengan objek pemeriksaan yang sedang diperiksa.

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan tujuan khusus dan diperoleh secara langsung dari sumbernya terkait penelitian yang sedang dilakukan (Saunders, Lewis, dan Thornhill, 2008). Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dari informan yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan data sekunder adalah data didapatkan melalui perantara atau didapatkan secara tidak langsung yang telah tersedia (Saunders, Lewis, dan Thonhill, 2008). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain jurnal, peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis pemeriksaan investigatif, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif dan ikhtisar hasil pemeriksaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan *semi structure protocol*. Wawancara adalah pertukaran informasi dan antara dua orang melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg, 2002). Wawancara dibagi menjadi tiga tipe yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur (Green, 2009). Dalam wawancara terstruktur, pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan

sesuai dengan topik penelitian, informan dapat menjawab pertanyaan secara fleksibel sehingga memberikan kesempatan dalam mengidentifikasi cara maupun sudut pandang baru namun tetap dalam arahan pewawancara (Crabtree, 1999)

3.5 Transkrip Hasil Wawancara

Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan. Hasil wawancara tersebut diubah menjadi transkrip yaitu hasil wawancara berupa suara pada alat perekam suara diubah menjadi bentuk teks yang sistematis. Hasil transkrip berupa teks dikonfirmasi kepada informan dan diperbaiki jika informan meminta perbaikan agar sesuai dengan yang dimaksudkan.

3.6 Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian dilakukan dengan pengujian menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengujian keabsahan data dengan membandingkan antara data hasil wawancara yang diperoleh dengan sesuatu yang lain, antara lain membandingkan dengan metode, antar peneliti, sumber data, maupun teori (Denzin et al 2005). Penelitian ini menggunakan metode triangulasi teori, sehingga data hasil wawancara yang telah dikumpulkan dibandingkan dengan teori yang relevan untuk menghindari bias oleh peneliti atas kesimpulan yang dihasilkan serta dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti.

3.7 Proses Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga analisis yang dilakukan yaitu analisis data kualitatif karena data yang didapatkan berupa

kumpulan kata, bukan berupa angka. Pendekatan yang digunakan yaitu analisis konten dan penyempurnaan model penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi penelitian. Analisis konten terdiri dari dua langkah yaitu analisis deduktif yang berisi perbandingan model awal penelitian dengan model hasil penelitian, serta analisis induktif yang terdiri dari eksplorasi tahapan penelitian, tema, sub tema variabel dan faktor (Creswell dan Clark, 2007).

Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Untuk mendukung analisis dan proses coding, penelitian ini menggunakan bantuan *Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software* (CAQDAS) yaitu NVivo 11. Pertimbangan penggunaan NVivo sebagai alat analisis dalam penelitian ini yaitu Nvivo memberikan kelebihan dalam mendukung analisis kualitatif, karena kemampuannya dalam mengolah, akses, dan data query dari sumber yang beragam (Garcia-Horta dan Guerra-Ramos, 2009) dalam jangka waktu yang singkat (Atherton dan Elsmore, 2007). Penggunaan Nvivo dapat meningkatkan visibilitas dan transparansi dalam proses penelitian (Welsh, 2002; Hoover dan Koerber, 2011) serta persepsi mengenai proses penelitian yang lebih ilmiah (Atherton dan Elsmore, 2007).

Proses *coding* merupakan tahap awal dalam analisis data yang diawali melalui proses memberi label atau memberi nama pada data yang muncul, sehingga data tersebut dapat dikelompokkan (Charmaz, 2006). Langkah-langkah analisis data menggunakan *software* Nvivo adalah sebagai berikut:

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, lalu penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah di lapangan (Miles dan Huberman, 1992). Data berupa hasil wawancara yang telah di transkrip dan diuji keabsahannya kemudian dilakukan reduksi untuk memilah data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan lalu dimasukkan ke dalam aplikasi Nvivo.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini diawali dengan membuat node dari tema-tema hasil penelitian. Langkah selanjutnya yaitu pengelompokan (*coding*) data hasil wawancara berdasarkan kategori permasalahan dan pola jawaban informan. Setelah pengkodean seluruh data, kemudian dilakukan pembuatan peta kategori permasalahan dan pola jawaban partisipan wawancara untuk melihat visualisasi kategori permasalahan dan pola jawaban.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan reduksi dan penyajian data, maka langkah selanjutnya yaitu merumuskan temuan penelitian dan menyusun kesimpulan akhir.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini disajikan hasil analisis data penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan berupa wawancara semi struktur dengan jumlah partisipan wawancara 15 orang pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian lapangan ditujukan untuk mengeksplorasi dimensi dari masing-masing variabel dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, analisis konten digunakan untuk menganalisis temuan yang didapatkan. Dasar analisis yang digunakan yaitu dengan membandingkan antara model penelitian yang diajukan dengan model hasil pengembangan studi lapangan. Hasil dari analisis tersebut yaitu pengembangan model penelitian komprehensif yang dijelaskan pada akhir bab ini. Studi lapangan dalam penelitian ini difokuskan untuk memverifikasi dan meningkatkan variabel yang digunakan dalam model penelitian awal. Bab ini juga memberikan gambaran mengenai hubungan antara variabel dan item terkaitnya, serta membahas hubungan antar variabel.

4.2 Wawancara Pengembangan Kuisisioner

Pengembangan kuisisioner wawancara didasarkan pada variabel dan teori dari penelitian sebelumnya dan kajian literatur. Penelitian ini dirancang menggunakan

semi-structure interview dengan 46 pertanyaan untuk mengulas 10 topik utama (variabel) dalam penelitian ini, yang dapat dilihat pada lampiran 2.

Topik pertama yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pendeteksian *fraud* pada institusi pemerintah dengan jumlah 12 pertanyaan. Pada topik kedua dan ketiga, membahas tentang praperencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan jumlah 6 pertanyaan untuk praperencanaan dan 7 pertanyaan untuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif. Dalam topik kedua dan ketiga terdapat beberapa pengembangan pertanyaan karena topik ini merupakan hal baru dalam penelitian ini. Topik keempat penelitian ini membahas tentang peran *whistleblowing* pada institusi pemerintah yang dirinci menjadi 7 pertanyaan.

Topik kelima dan keenam membahas hubungan *whistleblowing* dalam praperencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif, masing-masing 3 pertanyaan untuk hubungan *whistleblowing* dalam praperencanaan dan 2 pertanyaan untuk hubungan *whistleblwoing* dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif.

Topik ketujuh dan kedelapan membahas hubungan antara praperencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif dalam mendeteksi *fraud*, masing-masing terdiri dari 2 pertanyaan. Pada topik kesembilan membahas tentang peran *whistleblowing* dalam mendeteksi *fraud* dengan jumlah 3 pertanyaan dan topik terakhir membahas secara keseluruhan mengenai peran *whistleblowing* dalam praperencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif untuk mendeteksi *fraud* sebanyak 2 pertanyaan.

4.3 Hasil dan Interpretasi

4.3.1 Karakteristik Demografi Informan Wawancara

Informan wawancara penelitian ini sebanyak 15 orang dengan demografi yang ditunjukkan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Demografi Informan Wawancara

Informan Wawancara	Jenis Kelamin	Peran	Sertifikasi	Masa Kerja
A	Perempuan	Ketua Tim Yunior	CFrA	14 tahun, 9 bulan
B	Laki-laki	Anggota Tim Senior	CFrA	12 tahun, 5 bulan
C	Laki-laki	Anggota Tim Senior	CFE	7 tahun, 4 bulan
D	Perempuan	Anggota Tim Senior	CFrA	15 tahun, 9 bulan
E	Laki-laki	Anggota Tim Senior	CFE	10 tahun, 1 bulan
F	Laki-laki	Anggota Tim Yunior	CFrA	7 tahun, 3 bulan
G	Laki-laki	Anggota Tim Senior	CFrA	9 tahun, 3 bulan
H	Laki-laki	Ketua Tim Yunior	CFrA	10 tahun, 6 bulan
I	Laki-laki	Anggota Tim Yunior	CFE	10 tahun, 2 bulan
J	Laki-laki	Anggota Tim Senior	CFE	7 tahun, 4 bulan
K	Perempuan	Ketua Tim Yunior	CFrA	21 tahun, 6 bulan
L	Laki-laki	Anggota Tim Senior	CFrA	7 tahun, 8 bulan
M	Laki-laki	Ketua Tim Yunior	CFE	12 tahun, 5 bulan
N	Perempuan	Anggota Tim Senior	CFrA	11 tahun, 1 bulan
O	Laki-laki	Anggota Tim Senior	CFrA	7 tahun, 8 bulan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah informan wawancara berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang (26,66 %) dan informan wawancara berjenis kelamin laki-laki berjumlah 11 orang (77,33 %). Sedangkan informan wawancara dengan Peran pada Jabatan Fungsional Pemeriksa Anggota Tim Yunior sebanyak 2 orang (13,33 %), Peran Anggota Tim Senior sebanyak 9 orang (60 %), dan Peran Ketua Tim Yunior sebanyak 4 orang (26,66 %). Pemeriksa yang memiliki sertifikasi *Certified Fraud Examiner* (CFE) sebanyak 5

orang (33,33 %) dan 10 orang (66,66 %) memiliki *Certified Forensic Auditor* (CFrA). Untuk masa kerja di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dari 15 informan wawancara 6 orang (40 %) memiliki masa kerja antara 7 – 10 tahun, 6 orang (40%), memiliki masa kerja 10 – 15 tahun, dan 2 orang (13,33%) memiliki masa kerja lebih dari 15 tahun yaitu 15 tahun 9 bulan dan 21 tahun 6 bulan.

4.3.2 Analisis Induktif

4.3.2.1 Pendeteksian *Fraud* pada Institusi Pemerintah

4.3.2.1.1 Pemahaman Mengenai Definisi *Fraud*

Seluruh informan menyatakan bahwa *fraud* merupakan tindakan melanggar hukum dan merugikan orang lain. Sebagai contoh informan A dan E memberikan pernyataan berikut:

“ Iya bener, bisa dibilang kalau fraud merugikan orang lain, ada hukum yang dilanggar dan ada pelakunya juga” (Informan A)

“ Fraud itu melanggar hukum, dan ada niatan, sengaja, diniatin untuk melakukan kecurangan kepada orang lain, ya pasti merugikan orang lain lah.” (Informan E)

Berdasarkan analisis konten dari pemahaman mengenai definisi *fraud* secara umum, respon dari informan wawancara dapat dilihat dalam Tabel 4.2

Tabel 4.2
Pemahaman Definisi *Fraud* Secara Umum

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Definisi Umum Fraud	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: √ = setuju

4.3.2.1.2 Definisi *Fraud* Secara Khusus

Untuk definisi *fraud* secara khusus, sebanyak 15 informan menyatakan bahwa perbuatan yang merugikan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan merupakan definisi *fraud* secara khusus atau lebih dikenal dengan tindak pidana korupsi.

Sebagai contoh informan C dan J memberikan pernyataan berikut:

“ Frud itu masih umum ya, lebih luas definisinya, kalau di kami fraud lebih khusus lagi namanya tindak pidana korupsi.” (Informan C)

“ Sebutan lebih spesifiknya tindak pidana korupsi, sesuai KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ada tujuh, sesuai yang mbak sebutkan tadi (merugikan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan).” (Informan J)

Tabel 4.3 memperlihatkan respon dari masing-masing informan wawancara berdasarkan analisis konten. Hasil wawancara menunjukkan seluruh informan menyetujui bahwa perbuatan yang merugikan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan merupakan definisi *fraud* secara khusus.

Tabel 4.3
Definisi *Fraud* Secara Khusus

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Definisi Khusus Fraud	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: √ = setuju

4.3.2.1.3 Pelaku *Fraud*

Analisis konten wawancara semi struktur menunjukkan bahwa 15 informan wawancara menyatakan pelaku *fraud* dapat berasal dari internal dan eksternal.

Informan wawancara memberikan keterangan lebih bahwa pelaku *fraud* tidak hanya salah satu pihak saja tetapi bisa juga kedua belah pihak bekerjasama melakukan *fraud*. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan informan G dan H :

“ *Macam-macam sih tergantung kasusnya, ada yang internal saja, ada yang eksternal saja, ada yang internal dan eksternal sama-sama melakukan fraud.*” (Informan G)

“*Iya benar, bisa dari internal atau eksternal atau dua-duanya.*” (Informan H)

Temuan dari wawancara ini adalah bahwa pelaku *fraud* dapat berasal dari internal dan eksternal suatu organisasi. Respon dari masing-masing informan wawancara mengenai pelaku *fraud* dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Pelaku *Fraud*

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pelaku Fraud	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: √ = setuju; - = tidak menyebutkan

4.3.2.1.4 Penyebab Terjadinya *Fraud*

Seluruh informan wawancara menyatakan bahwa *fraud pentagon* yang meliputi arogansi, kemampuan, peluang, tekanan, dan rasionalisasi merupakan penyebab terjadinya *fraud*. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam pernyataan informan L dan N :

“*Biasanya yang paling kelihatan itu tekanan dan peluang. Tekanan karena kebutuhan ekonomi atau memang orangnya serakah dan tamak,*

gengsinya besar, suka pamer. Kalau dari faktor peluang, kita kan tau SPI pemerintah itu masih lemah gampang banget untuk terjadinya fraud.” (Informan L)

“ Tidak harus kelima-limanya sekaligus, bisa salah satu atau kombinasi diantaranya, tapi ya benar fraud pentagon penyebab terjadinya fraud.”
(Informan N)

Respon dari masing-masing informan wawancara mengenai *fraud pentagon* sebagai penyebab terjadinya *fraud* dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Fraud Pentagon Penyebab Terjadinya Fraud

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
FP -> PF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: FP = *Fraud Pentagon*; PF = *Penyebab Fraud*; √ = setuju

4.3.2.1.5 Laporan *Fraud* Sebagai Indikasi Risiko *Fraud*

Sebanyak 11 dari 15 informan wawancara menyatakan bahwa adanya laporan *fraud* dapat mengindikasikan risiko *fraud*. Sebagai contoh informan B dan D memberikan pernyataan berikut:

“Iya, adanya laporan *fraud* berindikasi terjadinya *fraud* lebih besar.”
(Informan B)

“*Fraud* itu sifatnya tersembunyi, jadi ketika sampai ada laporan tentang *fraud*, maka potensi juga tinggi.” (Informan D)

Sedangkan 4 informan menyatakan laporan *fraud* belum tentu mengindikasikan risiko *fraud* seperti yang dikemukakan oleh informan G, yaitu:

“Kita tidak bisa serta merta menilai ketika ada laporan *fraud* berarti ada *fraud* yang terjadi. Mesti dipastikan dulu, dan memastikannya itu nggak gampang.” (Informan G)

Berdasarkan analisis konten dari laporan *fraud* mengindikasikan risiko *fraud*, respon dari informan wawancara dapat dilihat dalam Tabel 4.6. Temuan hasil wawancara yaitu adanya risiko *fraud* dapat mengindikasikan risiko *fraud*.

Tabel 4.6
Laporan *Fraud* sebagai Indikasi *Fraud*

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
LF -> IF	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	X	√	X	X	11

Catatan: LF = Laporan *Fraud*; IF = Indikasi *Fraud*; √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.1.6 Pelanggaran Peraturan sebagai Indikasi Risiko *Fraud*

Pada item pertanyaan mengenai adanya pelanggaran peraturan yang terjadi mengindikasikan risiko *fraud*, sebanyak 13 informan menyatakan adanya pelanggaran peraturan mengindikasikan risiko *fraud*. Sebagai contoh informan H dan I memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kalau pelanggarannya disengaja berarti *fraud* itu” (Informan H)

“Pengalaman kami, apabila terjadi pelanggaran peraturan, risiko terjadinya *fraud* juga ada” (Informan I)

Tabel 4.7 memperlihatkan respon dari masing-masing informan wawancara berdasarkan analisis konten. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelanggaran peraturan dapat mengindikasikan *fraud*.

Tabel 4.7
Pelanggaran Peraturan sebagai Indikasi Risiko *Fraud*

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PP -> IRF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	13

Catatan: PP = Pelanggaran Peraturan; IRF = Indikasi Risiko *Fraud*; √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.1.7 Pelanggaran Peraturan oleh Pimpinan Terhadap Peningkatan Risiko *Fraud*

Hasil analisis atas konten wawancara semi struktur menunjukkan bahwa 14 dari 15 informan wawancara menyatakan bahwa pelanggaran peraturan oleh pimpinan dapat meningkatkan risiko terjadinya *fraud*. Sebagai contoh, informan B dan M menyatakan sebagai berikut:

“Iya kalau pimpinan melakukan fraud pasti dibawahnya juga melakukan atas perintah pimpinan, fraud oleh pimpinan tidak bisa dilakukan sendiri.” (Informan B)

“Risikonya tinggi ketika pimpinan melakukan pelanggaran peraturan karena memegang kekuasaan.” (Informan M)

Temuan dari wawancara ini menunjukkan bahwa pelanggaran peraturan oleh pimpinan organisasi dapat meningkatkan risiko *fraud*. Respon dari masing-masing partisipan wawancara mengenai pelaku *fraud* dapat dilihat dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Pelanggaran Peraturan Oleh Pimpinan Dan Peningkatan Risiko *Fraud*

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PPP -> PRF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	14

Catatan: PPP = Pelanggaran Peraturan oleh pimpinan; PRF = Peningkatan Risiko *Fraud*; √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.1.8 Gaya Manajemen yang Otoriter Mendorong Terjadinya *Fraud*

Sebanyak 11 informan wawancara menyatakan bahwa pimpinan organisasi yang memiliki gaya manajemen yang otoriter dapat mendorong terjadinya *fraud*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan wawancara diantaranya informan C:

“ Pemimpin otoriter itu individualis dan keinginannya bersifat mutlak. Tidak ada yang bisa menentang dan fraud sangat bisa terjadi untuk mencapai apa yang diinginkan.” (Informan C)

Sebanyak 4 informan memberikan pernyataan bahwa gaya manajemen yang otoriter tidak memiliki hubungan atau mendorong terjadinya *fraud* seperti pernyataan yang diberikan oleh informan A:

“Otoriter tapi kalau taat hukum dan pengendalian internalnya bagus, tidak berpengaruh.” (Informan A)

Respon dari masing-masing informan wawancara mengenai gaya manajemen yang otoriter dapat mendorong terjadinya *fraud* dapat dilihat dalam Tabel 4.9. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa pimpinan organisasi yang memiliki gaya manajemen yang otoriter dapat mendorong terjadinya *fraud*.

Tabel 4.9
Gaya Manajemen Yang Otoriter Mendorong Terjadinya *Fraud*

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
GMO -> MTF	X	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	11

Catatan: GMO = Gaya Manajemen Otoriter; MTF = Mendorong Terjadinya *Fraud*; √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.1.9 Pemisahan Tugas Menurunkan Risiko *Fraud*

Sebanyak 14 informan dari 15 informan wawancara menyatakan bahwa dengan adanya pemisahan tugas dapat menurunkan risiko terjadinya *fraud*. Sebagai contoh informan E memberikan pernyataan berikut:

“Iya benar, Salah satu pencegahan *fraud* dengan pengendalian internal berupa *segregation of duty*.” (Informan E)

Sedangkan 1 informan menyatakan bahwa pemisahan tugas tidak berpengaruh terhadap penurunan risiko fraud seperti yang dikemukakan oleh informan K sebagai berikut:

“Pemisahan tugas memang dirancang agar tidak fraud, tetapi kalau ada kolusi, pemisahan tugas sebaik apapun tidak akan berjalan.” (Informan K)

Berdasarkan analisis konten dari adanya pemisahan tugas dapat menurunkan risiko terjadinya *fraud*, respon dari informan wawancara dapat dilihat dalam Tabel 4.10. Temuan dari hasil wawancara yaitu adanya pemisahan tugas dapat menurunkan risiko terjadinya *fraud*.

Tabel 4.10
Pemisahan Tugas Menurunkan Risiko *Fraud*

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PT -> RF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	14

Catatan: PT = Pemisahan Tugas; RF = Risiko *Fraud*; √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.1.10 Gaji dan Tunjangan Mempengaruhi Risiko *Fraud*

Analisis konten wawancara semi struktur menunjukkan bahwa 13 informan wawancara menyatakan besarnya gaji dan tunjangan mempengaruhi risiko *fraud*.

Sebagai contoh, informan G dan L menyatakan sebagai berikut:

“Benar, pegawai yang gajinya cukup dan sesuai beban tugas dan risiko dari pekerjaannya kemungkinan kecil melakukan fraud.” (Informan G)

“Kompensasi atas kontribusi karyawan yang sesuai itu akan memuaskan pegawai dan sebagai bentuk pengendalian juga untuk meminimalkan tindakan kecuranga. Pegawai akan mikir lagi, risiko kehilangan pekerjaan dengan gaji tunjangan yang mencukupi.” (Informan L)

Disisi lain terdapat 2 informan yang menyatakan besarnya gaji dan tunjangan tidak menurunkan risiko *fraud*. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan informan O:

“Ada juga gaji dan tunjangan sudah besar tapi dasar individunya serakah, ada tekanan dari keluarga atau atasan tetap tidak menjamin.”
(Informan O)

Temuan dari wawancara ini yaitu bahwa besarnya gaji dan tunjangan dapat mempengaruhi risiko *fraud*. Respon dari masing-masing informan wawancara mengenai gaji dan tunjangan dapat dilihat dalam Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Besarnya Gaji Dan Tunjangan Menurunkan Risiko *Fraud*

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
GT -> RF	√	√	√	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	13

Catatan: GT = Gaji dan Tunjangan; RF = Risiko *Fraud*; √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.1.11 Teknik Untuk Mendeteksi *Fraud*

Respon informan wawancara mengenai teknik-teknik yang digunakan untuk mendeteksi *fraud* dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Teknik-teknik Mendeteksi *Fraud*

Tindakan	Partisipan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pengendalian Internal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
<i>Fraud Auditing</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	-	√	√	√	√	13
<i>Fraud Hotline</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
Kebijakan Whistleblowing	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
Pelatihan pencegahan dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

pendeteksian <i>fraud</i>																
<i>Data Mining</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	14

Catatan: √ = setuju; X = tidak setuju; (-) = tidak memberikan jawaban

Hampir seluruh informan wawancara menyetujui bahwa teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi *fraud* antara lain pengendalian internal, *fraud auditing*, *fraud hotline*, kebijakan *whistleblowing*, pelatihan pencegahan dan pendeteksian *fraud*, serta *data mining*. Informan H menambahkan, bahwa selain 6 hal yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat teknik lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi *fraud* yaitu audit investigasi dan pemeriksaan perhitungan kerugian negara.

4.3.2.1.12 Item Pertanyaan Lain Menurut Informan Wawancara

Selain 11 pertanyaan di atas, informan A, K, M, dan O menyebutkan bahwa terdapat hal lain yang dibutuhkan untuk mendeteksi *fraud* yaitu:

“Kemampuan untuk menggali informasi membantu dalam mendeteksi fraud.” (Informan A)

“Ada, dengan menggunakan teknik follow the money.” (Informan K)

“Ada yang lainnya selain tadi itu, yaitu melihat fraud symptoms. Gejala-gejala terjadinya fraud sangat membantu dalam deteksi fraud.” (Informan M)

“ Menurut saya dengan adanya program pemeriksaan yang tepat dapat mendeteksi fraud secara efektif, tentunya dengan improvisasi di lapangan.” (Informan O)

4.2.2.2 Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif

4.3.2.2.1 Tujuan Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif

Seluruh informan wawancara menyetujui bahwa tujuan utama Praperencanaan adalah sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan investigatif dalam hal seluruh tahapan pada praperencanaan pemeriksaan terpenuhi seperti menurut informan C dan D dalam pernyataannya yaitu:

“Sesuai juknis dan juklak (petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan) BPK ya, tahapannya dibuat praperencanaan dulu, perencanaan, baru pelaksanaan yang terakhir pelaporan.” (Informan C)

“Kunci akan dilakukan atau tidaknya pemeriksaan investigatif itu dari praperencanaan pemeriksaan. Disini harus firm dulu baru lanjut.” (Informan D)

Hasil penelitian menunjukkan tujuan praperencanaan pemeriksaan investigatif dilakukan untuk pengambilan keputusan pelaksanaan pemeriksaan investigatif. Berdasarkan analisis konten dari pemahaman mengenai praperencanaan pemeriksaan investigatif, respon dari informan wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Tujuan Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Tujuan Praperencanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: √ = setuju

4.3.2.2.2 Definisi Informasi Awal pada Praperencanaan Pemeriksaan

Definisi informasi awal menurut Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif yaitu keterangan permulaan mengenai suatu penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, *fraud*, serta ketidakpatutan yang telah/sedang dan akan

terjadi seperti yang dinyatakan oleh K informan. Sebagai contoh, pernyataan dari informan K dan M sebagai berikut:

“Iya benar apa yang sudah disebutkan tadi.” (Informan K)

“Informasi awal ini berupa indikasi awal penyimpangan yang berindikasi tindak pidana yang ada hubungannya sama keuangan negara. Misal suap, korupsi, penggelapan aset.” (Informan M)

Temuan dari penelitian ini yaitu seluruh informan menyetujui bahwa informasi awal merupakan keterangan permulaan mengenai suatu penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, *fraud*, serta ketidakpatutan yang telah/sedang dan akan terjadi. Respon dari masing-masing partisipan wawancara mengenai definisi dari informasi awal dapat dilihat dalam Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Definisi Informasi Awal

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Informasi Aawal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: √ = setuju

4.3.2.2.3 Penelaahan Informasi Awal

Setiap informasi yang masuk ke BPK terkait dengan investigasi dilakukan penelaahan terlebih dahulu seperti yang dinyatakan oleh informan B sebagai berikut:

“Harus ditelaah karena tiap informasi punya kendalandan validitas yang berbeda, informasi awal ini sifatnya masih umum. Biasanya masih tendesius, subyektif, dan motif tidak sehat. Ada tingkatannya, bisa sangat mungkin terjadi, mungkin terjadi, diragukan dan tidak mungkin terjadi. Jika sudah dapat informasi awal lalu diverifikasi, bisa dilakukan tahap

selanjutnya yang masih di tahapan praperencanaan pemeriksaan yaitu analisis dan simpulan informasi awal.” (Informan B)

Temuan dari penelitian ini diketahui seluruh informan menyetujui bahwa informasi awal yang diterima perlu dilakukan penelaahan terlebih dahulu untuk diputuskan akan dilanjutkan atau tidak ke tahap berikutnya. Respon dari masing-masing informan wawancara mengenai penanganan informasi awal dapat dilihat dalam Tabel 4.15.

Tabel 4.15
Penelaahan Informasi Awal

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Penelaahan Informasi Awal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: √ = setuju

4.3.2.2.4 Langkah-langkah Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif

Sebanyak 15 informan wawancara menyatakan bahwa langkah-langkah proses praperencanaan pemeriksaan investigatif yang dilakukan BPK mencakup (1) memproses informasi awal, (2) memverifikasi informasi awal, (3) menganalisis informasi awal, (4) menyimpulkan hasil analisis informasi awal, seperti dalam pernyataan informan A dan O:

“Tahapan di praperencanaan yang empat itu bisa disebut juga sebagai penelaahan informasi awal.” (Informan A)

“Sudah benar seperti itu proses praperencanaan pemeriksaan investigatif.” (Informan O)

Respon dari masing-masing informan wawancara mengenai langkah-langkah proses praperencanaan pemeriksaan investigatif dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16
Langkah-langkah Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif

Tindakan	Partisipan Wawancara														Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Memperoleh IA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
Memverifikasi IA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
Menganalisis IA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
Menyimpulkan hasil analisis IA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: √ = setuju

4.3.2.2.5 Sumber Informasi Awal

Sebanyak 15 informan menyatakan bahwa sumber informasi awal yang digunakan BPK dalam praperencanaan pemeriksaan investigatif yaitu dari Temuan Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, Inisiatif Badan, dan Eksternal BPK yaitu Instansi pemerintah/ Dewan Perwakilan Rakyat, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan laporan/pengaduan masyarakat/*whistleblowing*. Selain itu, informan A dan D menambahkan sumber lain informasi awal yang digunakan BPK seperti dalam pernyataan berikut:

“Ada dari KPK, Polres, Polda, Bareskrim, dan Kejaksaan.” (Informan A)

“Ya, ditambah dari Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.” (Informan D)

Respon dari masing-masing informan wawancara mengenai sumber informasi awal yang digunakan BPK dalam praperencanaan pemeriksaan investigatif dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17
Sumber Informasi Awal yang Digunakan BPK

Tindakan	Partisipan Wawancara														Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Temuan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Pemeriksaan															
Laporan Hasil Pemeriksaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
Inisiatif Badan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
Instansi Pemerintah/ DPR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
LHP APIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
Pengaduan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: √ = setuju; - = tidak menyebutkan

4.3.2.2.6 Item Pertanyaan Lain Menurut Informan Wawancara

Selain 5 pertanyaan di atas, informan wawancara C, G, dan O menyebutkan bahwa terdapat hal lain mengenai praperencanaan pemeriksaan investigatif yaitu:

“Yang lainnya yaitu analisis dokumen sumber informasi awal dan klarifikasi jika diperlukan.” (Informan C)

“ Selain APIP ada Laporan APH (Aparat Penegak Hukum).” (Informan G)

“ Pengumpulan informasi diluar laporan resmi, seperti profil personil, sejarah organisasi/unit, dan informasi non formal yang relevan untuk mendukung prediksi.” (Informan O)

Untuk pernyataan informan C mengenai analisis dokumen sumber informasi, hal tersebut sesuai dengan langkah-langkah proses praperencanaan pemeriksaan investigatif. Informan C menambahkan klarifikasi jika diperlukan yang bertujuan untuk menguji validitas informasi awal yang didapatkan. Pernyataan informan G menjelaskan bahwa sumber informasi awal yang digunakan BPK dalam praperencanaan pemeriksaan antara lain laporan aparat penegak hukum. Pernyataan informan O menjelaskan bahwa dalam praperencanaan pemeriksaan investigatif sumber informasi awal tidak hanya didapatkan dari laporan resmi

seperti laporan hasil pemeriksa ataupun temuan pemeriksaan, tetapi dapat juga diperoleh di luar laporan resmi.

4.3.2.3.1 Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

4.3.2.3.1.1 Hipotesis Awal Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Seluruh informan wawancara sebanyak 15 orang menyatakan bahwa tahapan pelaksanaan pemeriksaan investigatif, pemeriksa telah memiliki hipotesis awal yang berisi mengenai apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana *fraud* dilakukan atau kerugian yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Sebagai contoh pernyataan yang disampaikan oleh informan J dan L sebagai berikut:

“Iya telah memiliki hipotesis awal hasil dari praperencanaan pemeriksaan investigatif.” (Informan J)

“Minimal apa, siapa, dimana, dan kapan. Kalau bagaimana fraud dilakukan dan nominalnya diperdalam di pelaksanaan pemeriksaan investigatif dan juga di pemeriksaan kerugian negara” (Informan L)

Respon dari masing-masing informan wawancara mengenai hipotesis awal yang dimiliki oleh pemeriksa pada pelaksanaan pemeriksaan investigatif dapat dilihat pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18
Hipotesis Awal Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Hipotesis Awal Pelaksanaan PI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: PI = Pemeriksaan Investigatif; √ = setuju

4.3.2.3.2 Tujuan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan pelaksanaan pemeriksaan investigatif dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19
Tujuan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Tujuan Pelaksanaan PI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: PI = Pemeriksaan Investigatif; √ = setuju

Seluruh informan wawancara sebanyak 15 orang menyebutkan bahwa tujuan pelaksanaan pemeriksaan investigatif yaitu untuk mengumpulkan bukti untuk mendukung hipotesis. Sebagai contoh berikut pernyataan dari informan N dan O:

“Kegiatan utama pelaksanaan pemeriksaan investigatif ya untuk mengumpulkan bukti yang bisa dipakai dalam persidangan.” (Informan N)

“ Ya mengumpulkan bukti. Bukti yang bagus itu menuntun untuk mendapatkan bukti lainnya” (Informan O)

4.3.2.3.3 Tahap-tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan investigatif menurut hasil wawancara masing-masing informan dapat dilihat pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20
Tahap-tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Tindakan	Partisipan Wawancara														Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Mengumpulkan Bukti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
Menganalisis dan evaluasi bukti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
Menyusun Konsep Simpulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Mendiskusikan Konsep Simpulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Catatan: √ = setuju; X = tidak setuju

Seluruh informan wawancara menyebutkan bahwa tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan investigatif tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK yaitu mengumpulkan bukti, menganalisis dan mengevaluasi bukti, menyusun konsep simpulan, dan mendiskusikan konsep simpulan. Sebagai contoh berikut pernyataan dari informan A dan E:

“Semua yang disebutkan benar tahapannya.” (Informan A)

“Seperti itu tahapannya, tidak jauh berbeda dengan tahapan pemeriksaan lainnya.” (Informan E)

4.3.2.3.4 Tujuan Pengumpulan Bukti

Tujuan pengumpulan bukti menurut hasil penelitian ini dapat dilihat pada Tabel

4.21.

Tabel 4.21
Tujuan Pengumpulan Bukti

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Tujuan Pengumpulan Bukti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: √ = setuju; X = tidak setuju

Seluruh informan wawancara menyebutkan bahwa pelaksanaan pengumpulan bukti bertujuan untuk melengkapi bukti pemeriksaan yang diperlukan dalam rangka mengungkap fakta dan proses kejadian, sebab, dan akibat fraud serta pihak yang diduga terkait *fraud*. Sebagai contoh pernyataan dari informan F dan K:

“Bukti yang pastinya bisa dipakai dalam persidangan. Bukti yang bisa dipakai dalam persidangan harus memenuhi syarat sebagai bukti.” (Informan F)

“Ya bisa untuk melengkapi bukti pemeriksaan sebelumnya, bisa dari pemeriksaan laporan keuangan daerah, atau dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti belanja daerah atau pendapatan daerah.” (Informan K)

4.3.2.3.5 Teknik-teknik Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada dasarnya sama dengan teknik yang digunakan dalam pemeriksaan reguler. Hal tersebut disampaikan oleh informan G dan N:

“Iya kurang lebih sama, intinya untuk mengejar informasi.” (Informan G)

“Semua yang disebutkan, terutama konfirmasi eksternal bisa didapatkan informasi tambahan.” (Informan N)

Teknik-teknik yang biasa digunakan dalam pemeriksaan investigatif menurut 15 informan wawancara hampir sama. Berdasarkan analisis konten, berikut data respon dari masing-masing informan wawancara mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif dapat dilihat pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22
Teknik-teknik Pelaksanaan Pemeriksaan Invetigatif

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Inspeksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
Observasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
Konfirmasi Eksternal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
Perhitungan Ulang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Pelaksanaan Kembali	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
Prosedur Analitis	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: √ = setuju; X = tidak setuju

Teknik-teknik yang digunakan dalam pemeriksaan investigatif antara lain inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, perhitungan ulang, pelaksanaan kembali, dan prosedur analitis. Seluruh informan menyetujui bahwa ke enam teknik-teknik tersebut digunakan dalam pemeriksaan investigatif.

4.3.2.3.6 Pemahaman Jenis-jenis Bukti Pemeriksaan

Seluruh informan wawancara menyatakan bahwa pada saat mengumpulkan bukti, pemeriksa harus terlebih dahulu memahami jenis-jenis bukti pemeriksaan yang harus dikumpulkan dan keterkaitan antara jenis bukti dengan alat bukti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh informan C dan H memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Harus relevan antara jenis bukti dan alat bukti menurut undang-undang.” (Informan C)

“Jenis-jenis bukti pemeriksaan itu banyak, dicari yang benar-benar bisa dipakai nantinya.” (Informan H)

Berdasarkan analisis konten dari pemahaman mengenai jenis-jenis bukti pemeriksaan, respon dari informan wawancara dapat dilihat dalam Tabel 4.23.

Tabel 4.23
Pemahaman Jenis-jenis Bukti Pemeriksaan

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pemahaman Jenis Bukti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: √ = setuju

4.3.2.3.7 Item Pertanyaan Lain Menurut Informan Wawancara

Informan A dan M menambahkan keterangan mengenai aspek atau faktor lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif yaitu pengalaman, kemampuan mengolah informasi digital, analisis/reviu dokumen, *follow the money*, dan *net worth method*. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan informan A dan M yang berbunyi:

“Yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif yaitu pengalaman melakukan audit investigasi dan kemampuan mengolah informasi digital.” (Informan A)

“ Analisis/reviu dokumen, follow the money, dan net worth method.” (Informan M)

4.3.2.4 Pelaksanaan Whistleblowing

4.3.2.4.1 Pemahaman Mengenai Definisi Whistleblowing

Seluruh informan wawancara menyatakan bahwa *whistleblowing* merupakan tindakan seorang informan yang mengungkapkan *fraud* dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk menghentikan *fraud*. Sebagai contoh informan E dan I memberikan pernyataan berikut:

“Iya tujuan informan mengungkapkan fraud untuk menghentikan fraud. Pelapor ini bisa sebagai korban atau malah bagian dari fraud.” (Informan E)

“Benar untuk mengungkapkan fraud, tetapi belum tentu untuk menghentikan fraud. Bisa juga dalam kondisi fraud sudah terjadi dan bisa juga untuk tujuan lainnya.” (Informan I)

Berdasarkan analisis konten dari pemahaman mengenai definisi *whistleblowing*, respon dari informan wawancara dapat dilihat dalam Tabel 4.24.

Tabel 4.24
Pemahaman Definisi *Whistleblowing*

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Definisi <i>Whistleblowing</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: √ = setuju

4.3.2.4.2 Manfaat *Whistleblowing*

Dari analisis konten menunjukkan bahwa seluruh informan wawancara menyatakan bahwa *whistleblowing* bermanfaat dan penting bagi institusi pemerintah. Tabel 2.25 menunjukkan pernyataan masing-masing individu dalam aspek ini. Sebagai contoh, berikut pernyataan dari informan G dan K:

*“Bermanfaat dan beberapa tahun ini digalakkan pada seluruh instansi pemerintah untuk membangun sistem *whistleblowing*.” (Informan G)*

“Penting karena seperti alarm yang menunjukkan bahwa terjadi sesuatu yang tidak beres dalam suatu organisasi. Kadang internal auditor atau pimpinan organisasi tidak tahu.” (informan K)

Tabel 4.25
Manfaat *Whistleblowing*

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Manfaat <i>Whistleblowing</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: √ = setuju

4.3.2.4.3 Penerapan *Whistleblowing*

Sebanyak 11 informan wawancara menyatakan penerapan *whistleblowing* pada institusi pemerintah belum efektif. Beberapa pernyataan mengenai belum efektifnya *whistleblowing* antara lain dari informan D, G, dan M:

“Penerapannya belum efektif. Menjalankan sistem whistleblowing tidak mudah. Terutama perlindungan saksi.” (Informan D)

“Saya kira belum efektif ya. Kendalanya banyak dari kurang anggaran sampai pengelolaannya. Ada yang sepenuhnya mengelola sendiri dari internal, ada yang menggunakan jasa pihak ketiga tapi ini biayanya tidak sedikit.” (Informan G)

“ Belum efektif karena keengganan dari internal itu sendiri, entah pimpinannya atau pegawainya dalam hal sebagai whistleblower.” (Informan M)

Sedangkan 4 orang informan menyatakan penerapan *whistleblowing* pada institusi pemerintah sudah efektif seperti dalam pernyataan informan H:

“Sudah cukup efektif kalau dibandingkan dengan dulu.” (Informan H)

Hasil wawancara menunjukkan belum efektifnya penerapan *whistleblowing* pada institusi pemerintah. Rincian respon masing-masing informan dapat dilihat pada Tabel 4.26.

Tabel 4.26
Penerapan Whistleblowing pada Institusi Pemerintah

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Penerapan Whistleblowing	X	X	X	X	X	X	X	√	√	√	X	√	X	X	X	4

Catatan: √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.4.4 Pemerintah Mendorong Pelaksanaan Whistleblowing

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 13 informan wawancara menyatakan bahwa pemerintah sudah mendorong pelaksanaan *whistleblowing* pada institusi pemerintah. Berikut pernyataan informan C, I, dan J sebagai contoh pernyataan yang mendukung:

“Pemerintah sudah mendorong, dari segi peraturan ada.” (Informan C)

“Kita lihat sudah banyak kementerian atau lembaga yang memiliki sistem whistleblowing tapi kalau pemerintah daerah belum banyak.” (Informan I)

“Sudah, yang terbaru pemerintah membuat sistem whistleblwoing yang terintegrasi antar 17 kementerian lembaga dengan KPK dan LPSK.” (Informan J)

Data rincian pernyataan masing-masing informan wawancara mengenai pemerintah yang mendorong pelaksanaan *whistleblowing* dapat dilihat pada Tabel 4.27.

Tabel 4.27
Pemerintah Mendorong Pelaksanaan *Whistleblowing*

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Mendorong Pelaksanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.4.5 Mekanisme Perlindungan *Whistleblower*

Mengenai mekanisme perlindungan *whistleblower*, sebanyak 8 informan menyatakan bahwa mekanisme perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah belum efektif untuk melindungi *whistleblower*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan A, C, dan L sebagai berikut:

“Belum, peraturan khusus perlindungan ini masih kurang. Faktor utama *whistleblower* tidak mau ya itu.” (Informan A)

“Belum efektif apalagi program perlindungan berbiaya tinggi dan menuntut keamanan atau penjagaan yang ketat.” (Informan C)

“Mekanisme belum maksimal karena menyangkut koordinasi banyak pihak.” (Informan L)

Sedangkan informan F menyatakan bahwa sudah ada mekanisme yang jelas untuk melindungi whistleblower seperti dalam pernyataan:

“Sudah ada mekanisme tapi sampai sejauh mana perlu dikaji lagi.”
(Informan F)

Tabel 4.28 menunjukkan rincian masing-masing pernyataan informan wawancara mengenai mekanisme perlindungan terhadap *whistleblower* oleh institusi pemerintah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sudah ada mekanisme perlindungan *whistleblower* pada institusi pemerintah namun belum efektif.

Tabel 4.28
Mekanisme Perlindungan *Whistleblower*

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Mekanisme Perlindungan <i>Whistleblower</i>	X	X	X	X	X	√	X	√	√	√	√	√	X	X	√	7

Catatan: √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.4.6 Pelaku *Whistleblowing*

Pelaku *whistleblowing* dapat berasal dari pihak eksternal maupun internal suatu organisasi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan B dan J sebagai berikut:

“Bisa dari internal dan eksternal.” (Informan B)

“ Kalau dari internal biasanya informasinya lebih lengkap. Eksternal itu misal dari rekanan yang gagal pelelangan karena dicurangi atau dari masyarakat.” (Informan J)

Dari Tabel 4.29 menunjukkan bahwa seluruh informan wawancara menyetujui pelaku *whistleblowing* dapat berasal baik eksternal maupun internal organisasi.

Tabel 4.29
Pelaku *Whistleblowing*

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pelaku <i>Whistleblowing</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: √ = setuju

4.3.2.4.7 *Whistleblowing* dari BUMN

Respon informan wawancara mengenai *whistleblowing* dari BUMN lebih sering digunakan daripada *whistleblowing* dari Kementrian/Lembaga dapat dilihat pada Tabel 4.30.

Tabel 4.30
***Whistleblowing* Dari BUMN**

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<i>Whistleblowing</i> BUMN	X	X	X	√	√	X	√	√	X	X	√	X	√	X	√	7

Catatan: √ = setuju; X = tidak setuju

Sebanyak 8 informan wawancara menyatakan bahwa *whistleblowing* dari BUMN tidak lebih sering digunakan daripada *whistleblowing* dari Kementrian/Lembaga seperti dalam pernyataan informan C dan H:

“Tidak juga, tergantung kita lagi meriksa mana dan waktu itu ada yang mau ngomong atau tidak.” (Informan C)

“ Terutama dari pemerintah daerah banyak yang whistleblowing tapi secara informal menyampaikan kepada pemeriksa.” (Informan H)

Sebanyak 7 informan wawancara menyatakan *whistleblowing* dari BUMN lebih sering digunakan daripada *whistleblowing* dari Kementrian/Lembaga seperti dalam pernyataan informan K dan M:

“Tipikal pegawai BUMN dan PNS itu berbeda, menurut saya whistleblower dari BUMN lebih banyak.” (Informan K)

“Whistleblower dari BUMN lebih sering karena sistemnya lebih baik daripada kementerian/lembaga.” (Informan M)

4.3.2.5 Whistleblowing dan Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif

4.3.2.5.1 Pemrosesan Informasi Awal yang Bersumber dari Whistleblowing

Hasil wawancara mengenai pemrosesan informasi awal yang bersumber dari *whistleblowing* yaitu bahwa informasi tersebut diproses sebagai informasi awal dalam praperencanaan pemeriksaan. Data masing-masing informan dapat dilihat pada Tabel 4.31. Beberapa contoh pernyataan yang mendukung antara lain pernyataan informan G dan H berikut ini:

“Iya, tapi perlu penelaahan awal terlebih dahulu untuk memastikan bahwa informasi yang akan dapat digunakan untuk menyusun prediksi.” (Informan G).

“Ya, karena dapat memperoleh suatu informasi penyimpangan langsung dari saksi yang berada dalam suatu proses bisnis.” (Informan H)

Tabel 4.31
Pemrosesan Informasi Awal Dari Whistleblowing Dalam Praperencanaan Pemeriksaan

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PIA WB -> PP	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	14

Catatan: PIA WB = Pemrosesan Informasi Awal *Whistleblowing*; PP = Praperencanaan Pemeriksaan ; √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.5.2 Informasi Awal Whistleblowing Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Perencanaan Pemeriksaan

Respon informan wawancara mengenai informasi awal yang bersumber dari *whistleblowing* pada tahap praperencanaan pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk tahap selanjutnya yaitu perencanaan pemeriksaan investigatif dapat dilihat pada Tabel 4.32.

Tabel 4.32
Informasi Awal *Whistleblowing* Sebagai Dasar Perencanaan Pemeriksaan

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
IA WB -> DPP	√	√	√	X	√	X	X	X	√	X	X	X	X	X	X	5

Catatan: IA WB = Informasi Awal *Whistleblowing*; DPP = Dasar Perencanaan Pemeriksaan ; √ = setuju; X = tidak setuju

Sebanyak 10 informan menyatakan bahwa informasi awal yang bersumber dari *whistleblowing* pada tahap praperencanaan pemeriksaan tidak digunakan atau bukan satu-satunya sumber sebagai dasar pengambilan keputusan untuk tahap selanjutnya seperti yang tertuang dalam pernyataan informan F, G, dan H yang berbunyi:

“Tidak, informasi awal dari whistleblowing masih diperlukan penelaahan atas relevansi dan keandalan informasi dan dokumen. Keputusan perencanaan pemeriksaan dapat diambil setelah diperoleh keyakinan atas informasi yang diperoleh dari whistleblowing bahwa unsur-unsur terjadinya fraud telah terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan.” (Informan F)

“Tidak mutlak, sebagai salah satu informasi awal yang dapat ditelaah dengan informasi lainnya (selain whistleblowing), hingga keseluruhan informasi awal tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan perencanaan pemeriksaan,” (Informan G)

“ Tidak, informasi dari whistleblowing merupakan informasi yang harus dianalisis lebih lanjut dan harus didukung dengan bukti-bukti lain untuk mendukung informasi tersebut.” (Informan H)

Sebanyak 5 informan menyatakan bahwa informasi awal yang bersumber dari *whistleblowing* pada tahap praperencanaan pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk tahap selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan A, sebagai berikut:

“Iya bisa tapi bukan yang utama.” (Informan A)

4.3.2.5.3 *Whistleblowing* Membantu Proses Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif

Sebanyak 14 informan dari 15 informan menyatakan dengan adanya *whistleblowing* dapat membantu proses praperencanaan pemeriksaan investigatif.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan A dan K sebagai berikut:

“Bisa dijadikan sebagai gejala awal.” (Informan A)

“Ya, namun harus dilakukan kajian/telahaan terlebih dahulu.” (Informan K)

Sehingga hasil wawancara ini menunjukkan bahwa dengan adanya *whistleblowing* dapat membantu proses praperencanaan pemeriksaan investigatif. Respon dari masing-masing informan mengenai dengan adanya *whistleblowing* dapat membantu proses praperencanaan pemeriksaan investigatif dapat dilihat pada Tabel 4.33.

Tabel 4.33
***Whistleblowing* Membantu Proses Praperencanaan**

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
WB -> MPP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: WB: *Whistleblowing*; MPP = Membantu Proses Praperencanaan ; √ = setuju

4.3.2.6 Whistleblowing dan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

4.3.2.6.1 Informasi Whistleblowing Menambah Bukti

Pelaksanaan pemeriksaan investigatif merupakan tahap ketiga dalam pemeriksaan investigatif, yaitu setelah tahap praperencanaan dan perencanaan. Hasil wawancara mengenai informasi dari *whistleblowing* yaitu informasi tersebut dapat menambah bukti dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif. Data masing-masing informan dapat dilihat pada Tabel 4.34. Berikut ini adalah contoh pernyataan yang mendukung antar lain pernyataan informan G dan H yang berbunyi:

“Ya, sebagai bukti wawancara dan dapat memberikan dokumen yang berhubungan dengan kasus serta mengetahui lokasi bukti-bukti.”
(Informan G)

“Ya, merupakan petunjuk awal dan dapat menambah bukti jika telah dilakukan penelaahan dan penelusuran lebih lanjut atau proses pembuktian.” (informan H)

Tabel 4.34
Informasi Whistleblowing Menambah Bukti

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
IW -> MB	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	14

Catatan: IW: Informasi *Whistleblowing*; MB = Menambah Bukti; √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.6.2 Peran Whistleblowing Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Pada penjelasan sebelumnya yaitu pada sub 4.3.2.5.3 didapatkan hasil wawancara yang menyatakan bahwa *whistleblowing* berperan dalam proses prapencanaan pemeriksaan. Hasil respon informan menyatakan bahwa *whistleblowing* juga

berperan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif. Rincian respon informan wawancara mengenai peran *whistleblowing* dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilihat dalam Tabel 4.35. Sebagai contoh, pernyataan informan G dan H adalah sebagai berikut:

“Ya, karena merupakan petunjuk atau dapat menjadi indirect evidence dalam hal memudahkan pemeriksa untuk mendapatkan direct evidence terkait relevansinya dengan penyimpangan.” (Informan G)

“Ya, dapat memperkuat bukti audit dan konstruksi kasus.” (Informan H)

Sedangkan informan J dan L memberikan pendapat yang berbeda. Pendapat tersebut yaitu:

“Salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan pemeriksaan investigatif menjadi lebih baik atau buruk adalah validitas dan keandalan informasi. Apabila suatu sistem whistleblowing mampu menghasilkan informasi yang valid dan andal maka proses pelaksanaan pemeriksaan menjadi lebih baik, begitu pula sebaliknya. Whistleblowing akan berperan untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan investigatif menjadi lebih baik hanya apabila didukung oleh suatu SDM yang berintegritas tinggi.” (Informan J)

“Tidak, peran whistleblower tidak membantu pelaksanaan pemeriksaan investigatif menjadi lebih baik, melainkan memudahkan pelaksanaan pemeriksaan investigatif.” (Informan L)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *whistleblowing* dapat membantu pelaksanaan pemeriksaan investigasi menjadi lebih baik.

Tabel 4.35
Peran Whistleblowing Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PWB -> PP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	X	√	12

Catatan: PWB: Peran Whistleblowing; PP = Pelaksanaan Pemeriksaan; √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.7 Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif dan Deteksi *Fraud*

4.3.2.7.1 Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif sebagai Metode Deteksi *Fraud*

Sebanyak 14 informan wawancara menyatakan praperencanaan pemeriksaan investigatif dapat dijadikan sebagai metode yang tepat untuk mendeteksi *fraud*. Berikut pernyataan informan wawancara G, H, dan J yang menyatakan praperencanaan pemeriksaan sebagai metode deteksi *fraud*:

“Ya, proses praperencanaan perlu dilakukan, diantaranya pengumpulan informasi awal. Semakin banyak informasi yang diperoleh akan semakin memudahkan dalam menyusun hipotesis awal, namun perlu dilakukan penelaahan untuk menyaring informasi mana yang relevan, valid, dan kompeten yang juga termasuk dalam praperencanaan.” (Informan G)

“Ya, karena akan lebih sistematis dan prosedur yang tepat sehingga akan lebih mempercepat menjawab hipotesis dan lebih mengarah ke kasus.” (Informan H)

“Ya, karena tujuan dari praperencanaan pemeriksaan investigatif adalah untuk menetapkan adanya alasan (prediksi) yang cukup kuat dan akurat sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.” (Informan J)

Terdapat satu informan yaitu dari informan L yang tidak menyetujui pernyataan sebelumnya, berikut penjelasannya:

*“ Tidak, tidak ada satu metode yang tepat dalam mendeteksi *fraud*, melainkan harus menggunakan kombinasi banyak metode dalam mendeteksi *fraud*.” (Informan L)*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praperencanaan pemeriksaan investigatif dapat dijadikan sebagai metode yang tepat untuk mendeteksi *fraud*. Tabulasi mengenai respon masing-masing informan wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.38.

Tabel 4.36
Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif Sebagai Metode Deteksi *Fraud*

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PP -> DF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	14

Catatan: PP: Praperencanaan Pemeriksaan; DF= Deteksi *Fraud*; √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.7.2 Praperencanaan Menjadikan Deteksi *Fraud* Lebih Cepat

Sebagian besar informan wawancara yang dirinci dalam Tabel 4.37 menyatakan bahwa praperencanaan pemeriksaan investigatif dapat menjamin proses pendeteksian *fraud* menjadi lebih cepat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan G dan H sebagai berikut:

“Ya, semakin banyak informasi awal yang diperoleh dan proses penelaahan terhadap informasi awal tersebut dilakukan dengan tepat maka pendeteksian fraud menjadi lebih efektif.” (Informan G)

“ Ya karena akan lebih sistematis dan prosedur yang tepat sehingga akan lebih mempercepat menjawab hipotesis dan lebih mengarah ke kasus.” (informan H)

Disisi lain terdapat partisipan yang menyatakan bahwa praperencanaan pemeriksaan investigatif tidak dapat menjamin proses pendeteksian *fraud* menjadi lebih cepat karena proses praperencanaan yang panjang. Pernyataan lebih lengkapnya dapat dilihat pada penjelasan informan A, J, dan L berikut ini:

“Praperencanaan atau penelaahan informasi awal tidak menjamin proses pendeteksian fraud menjadi lebih cepat, hanya membantu dalam pengambilan keputusan apakah terdapat unsur-unsur fraud atau tidak.” (Informan A)

“Tidak, karena meliputi praperencanaan yang panjang yaitu proses persiapan yang bersifat teknis dan dukungan pemeriksaan. Persiapan teknis mencakup penugasan Tim Perencanaan Pemeriksaan Investigatif

(TPPI), penyusunan Program Pemeriksaan Investigatif, penentuan kebutuhan sumber daya, persetujuan penugasan, dan penyusunan Program Kerja Perorangan (PKP). Sedangkan persiapan dukungan pemeriksaan meliputi penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD), pencairan biaya pemeriksaan, pengurusan akomodasi serta transportasi ke lokasi selama pemeriksaan, dan penyediaan tenaga ahli jika diperlukan.” (Informan J)

“Tidak, terdapat banyak variabel eksternal yang tidak bisa diprediksi. Namun hal ini mengecilkan peran dari praperencanaan pemeriksaan investigatif. Praperencanaan tetap penting dilakukan. (Informan L)

Sehingga hasil wawancara ini menunjukkan bahwa praperencanaan pemeriksaan investigatif dapat menjamin proses pendeteksian *fraud* menjadi lebih cepat.

Tabel 4.37
Praperencanaan Menjadikan Deteksi *Fraud* Lebih Cepat

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PP -> DFC	X	X	√	√	√	√	√	√	X	X	√	X	√	√	√	10

Catatan: PP: Praperencanaan Pemeriksaan; DFC= Deteksi *Fraud* Cepat; √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.8. Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Deteksi *Fraud*

4.3.2.8.1 Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif Sebagai Metode Deteksi *Fraud*

Sebanyak 14 dari 15 informan menyatakan pelaksanaan pemeriksaan investigatif dapat dijadikan sebagai metode yang tepat untuk mendeteksi *fraud*. Sebagai contoh, berikut pernyataan dari informan C dan F:

“Ya dapat, tujuan pemeriksaan investigasi salah satunya adalah membuat terang sebuah perkara, dimana hal-hal seperti adanya *fraud* sulit untuk diungkap pada pemeriksaan reguler.” (Informan C)

“Ya, tujuan pemeriksaan investigatif adalah untuk mengungkap adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah.” (Informan F)

Sedangkan 1 informan menyatakan pelaksanaan pemeriksaan investigatif kurang tepat dijadikan sebagai metode yang tepat untuk mendeteksi *fraud*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan I sebagai berikut:

“Tidak dapat dijadikan metode yang tepat jika tidak didukung faktor lain baik dari internal maupun eksternal.” (Informan I)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan investigatif dapat dijadikan sebagai metode yang tepat untuk mendeteksi *fraud*, karena tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan investigatif adalah mengungkapkan *fraud* yang terjadi.

Rincian mengenai respon informan wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.38

Tabel 4.38
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Deteksi *Fraud*

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PP -> DF	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	14

Catatan: PP: Praperencanaan Pemeriksaan; DF= Deteksi *Fraud*; √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.8.2 Pelaksanaan Pemeriksaan Menjadikan Deteksi *Fraud* Lebih Cepat

Hasil wawancara mengenai pelaksanaan pemeriksaan investigatif yaitu bahwa pelaksanaan pemeriksaan dapat menjamin proses pendeteksian *fraud* menjadi lebih cepat. Data masing-masing respon informan dapat dilihat pada Tabel 4.39.

Beberapa contoh pernyataan yang mendukung antara lain informan C dan G berikut ini:

“Dapat, bila semua prosedur direncanakan dan dilaksanakan dengan benar, dan tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu integritas.” (Informan C)

“Ya, karena fraud merupakan tindakan yang biasanya disembunyikan atau tidak dapat dideteksi/diketahui jika tidak dilakukan pembuktian atas indikasi tersebut, sehingga untuk pembuktiannya perlu dilakukan pemeriksaan investigatif.” (Informan G)

Tabel 4.39
Pelaksanaan Pemeriksaan Menjadikan Deteksi *Fraud* Lebih Cepat

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PP -> DFC	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	14

Catatan: PP: Pelaksanaan Pemeriksaan; DFC= Deteksi *Fraud* Cepat; √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.9. *Whistleblowing* dan Deteksi *Fraud*

4.3.2.9.1 Peran *Whistleblowing* Mendeteksi *Fraud*

Seluruh informan menyatakan bahwa *whistleblowing* memiliki peran sebagai upaya untuk mendeteksi *fraud*. Sebagai contoh, berikut pernyataan dari informan C, dan G:

“Ada, terkadang ada hal-hal yang sifatnya tersembunyi yang susah didapatkan secara formal yang hanya diungkap oleh *whistleblower* kepada pemeriksa.” (Informan C)

“Ya, karena fraud merupakan tindakan yang biasanya disembunyikan atau tidak dapat dideteksi/diketahui jika tidak dilakukan pembuktian atas indikasi tersebut, sehingga untuk pembuktiannya perlu dilakukan pemeriksaan investigatif.” (Informan G)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *whistleblowing* memiliki peran sebagai upaya untuk mendeteksi *fraud*. Rincian respon masing-masing informan wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.40.

Tabel 4.40
Peran Whistleblowing Mendeteksi *Fraud*

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PW -> DF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: PP: Peran *Whistleblowing*; DFC= Deteksi *Fraud*; √ = setuju

4.3.2.9.2 Meningkatkan Sistem Deteksi Melalui *Whistleblowing*

Terdapat berbagai macam cara untuk meningkatkan sistem deteksi melalui *whistleblowing* antara lain memaksimalkan *whistleblowing*, membayar *whistleblowing*, sosialisasi *whistleblowing*, dan meningkatkan perlindungan terhadap *whistleblowing*. Berikut ini adalah penjelasan dari informan F dan I:

“Selain keempat faktor tersebut terdapat satu elemen penting dalam peningkatan sistem whistleblowing yaitu komitmen dari tingkat pimpinan (tone of the top) dalam mendukung pelaksanaan sistem whistleblowing pada institusinya.” (Informan F)

“Terutama perlindungan terhadap whistleblower akan memberikan jaminan kepada mereka untuk melaporkan adanya kejadian fraud.” (Informan I)

Tabel 4.41 berikut ini menyajikan rincian analisis konten dan data respon dari masing-masing informan wawancara mengenai cara peningkatan sistem deteksi melalui *whistleblowing*.

Tabel 4.41
Cara Meningkatkan Sistem Deteksi Melalui *Whistleblowing*

Variabel	Partisipan Wawancara														Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Memaksimalkan <i>whistleblowing</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
Membayar <i>whistleblower</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	14
Sosialisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

whistleblowing																
Meningkatkan perlindungan whistleblower	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		15

Catatan: √ = setuju; X = tidak setuju

Berdasarkan hasil wawancara seperti yang disajikan pada tabel di atas, diketahui bahwa hampir seluruh informan menyetujui cara meningkatkan sistem deteksi melalui *whistleblowing* dengan cara memaksimalkan *whistleblowing*, membayar *whistleblowing*, sosialisasi *whistleblowing* dan meningkatkan perlindungan *whistleblowing*. Terdapat satu informan yang tidak menyetujui peningkatan sistem deteksi melalui *whistleblowing* dengan cara membayar *whistleblower*, karena dengan membayar *whistleblower* memicu seseorang melakukan pelaporan fiktif dengan maksud mendapatkan bayaran.

4.3.2.9.3 Whistleblowing Menurunkan Angka *Fraud*

Seluruh informan wawancara menyatakan bahwa *whistleblowing* berperan menurunkan angka *fraud*. Sebagai contoh pernyataan informan C dan Y:

“Seharusnya iya, paling tidak membuat jera para pelaku dan memberi efek cemas untuk calon pelaku fraud.” (Informan C)

“Ya karena sistem whistleblowing sebenarnya adalah sebuah tindakan untuk mengungkapkan informasi dari sebuah organisasi privat ataupun publik untuk membuka kasus-kasus korupsi yang berbahaya kepada masyarakat sehingga organisasi privat maupun publik akan menjadi lebih transparan dan akuntabel.” (Informan Y)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *whistleblowing* berperan dalam menurunkan angka *fraud*. Tabel 4.42 berisi pendapat masing-masing respon informan wawancara mengenai peran *whistleblowing* terhadap angka *fraud*

Tabel 4.42
Whistleblowing* Menurunkan Angka *Fraud

Variabel	Informan Wawancara															Frekuensi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
WB -> PF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15

Catatan: WB = *Whistleblowing*; PF = Penurunan *Fraud*; √ = setuju; X = tidak setuju

4.3.2.10 Faktor Lain yang Ditemukan

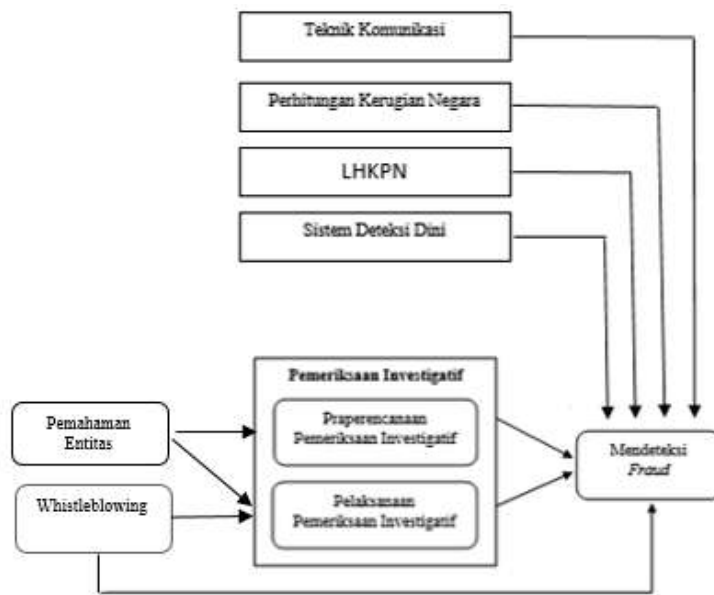
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa objek utama dari penelitian ini adalah untuk menyempurnakan model awal. Berdasarkan analisis konten ditemukan beberapa temuan menarik yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan. Variabel yang terkait dengan penelitian ini muncul melalui pendapat informan antara lain teknik komunikasi, perhitungan kerugian negara, laporan hasil kekayaan pejabat negara dan sistem deteksi dini. Selain itu, pada saat dilakukan wawancara dengan informan untuk pertama kali diketahui bahwa faktor berupa pemahaman entitas mempengaruhi baik praperencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif dalam mendeteksi *fraud*. Berdasarkan hasil temuan tersebut, peneliti menambahkan faktor tersebut menjadi pertanyaan untuk wawancara selanjutnya dengan informan lain. Hasil yang didapatkan yaitu bahwa sebanyak 14 orang informan menyetujui pemahaman entitas berpengaruh pada praperencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif dalam mendeteksi *fraud*. Sehingga faktor baru berupa pemahaman entitas dimasukkan dalam model studi lapangan.

4.3.3 Model Studi Lapangan

Model hasil wawancara berdasarkan analisis konten, dikembangkan untuk mengilustrasikan temuan yang berasal dari informan wawancara. Berikut ini rincian lampiran terkait model pengembangan studi lapangan:

- a. Lampiran 3 untuk model pendeteksian *fraud* pada institusi pemerintah
- b. Lampiran 4 untuk model per item mengenai praperencanaan pemeriksaan investigatif
- c. Lampiran 5 untuk model per item mengenai pelaksanaan pemeriksaan investigatif
- d. Lampiran 6 untuk model per item mengenai pelaksanaan *whistleblowing* pada institusi pemerintah
- e. Lampiran 7 untuk model per item mengenai hubungan *whistleblowing* dengan praperencanaan pemeriksaan investigatif
- f. Lampiran 8 untuk model item mengenai hubungan *whistleblowing* dengan pelaksanaan pemeriksaan investigatif
- g. Lampiran 9 untuk model per item mengenai hubungan *whistleblowing* dengan deteksi *fraud*
- h. Lampiran 10 untuk model per item mengenai hubungan praperencanaan pemeriksaan investigatif dengan deteksi *fraud*
- i. Lampiran 11 untuk model per item mengenai hubungan pelaksanaan pemeriksaan investigatif dengan deteksi *fraud*.

Model studi lapangan yang dihasilkan dari konstruk yang ada secara keseluruhan disajikan dalam Gambar 4.1.



Gambar 4.1
Model Studi Lapangan

Model studi lapangan ini berbeda dengan model awal penelitian. Pada model studi lapangan ini terdapat variabel baru yaitu pemahaman entitas yang memiliki peran dalam praperencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif. *Whistleblowing* pada model awal memiliki peran dalam praperencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif, namun pada model studi lapangan hanya berperan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif. Untuk praperencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif, baik ada model awal penelitian dan model studi lapangan tetap berperan dalam mendeteksi *fraud*. Didapatkan empat faktor yang mempengaruhi deteksi *fraud* yaitu teknik komunikasi, perhitungan kerugian negara, Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan sistem deteksi dini.

4.3.4 Analisis Deduktif

Analisis deduktif berupa peninjauan model awal dan temuan studi lapangan dilakukan melalui tiga langkah yaitu langkah pertama membandingkan model awal dan model studi lapangan. Analisis induktif menghasilkan model studi lapangan. Sedangkan hasil dari analisis deduktif yaitu verifikasi atas faktor-faktor pada tiap variabel.

Pada langkah kedua dilakukan peninjauan kembali atas temuan hasil studi lapangan. Fokus dari perbandingan antara model awal dan model studi lapangan yaitu perbedaan antara dua model tersebut, faktor yang tambahan yang disebutkan oleh informan wawancara.

Terdapat item lain yang disebutkan oleh informan wawancara dalam konstruk pendeteksian fraud di institusi pemerintah yang terdiri dari sistem deteksi dini, laporan hasil kekayaan pejabat negara, pemeriksaan perhitungan negara dan teknik berkomunikasi. Keempat item tersebut tidak dapat digunakan untuk mendukung konstruk dalam model penelitian ini karena masing-masing item hanya disebutkan oleh 1 orang informan saja.

Berdasarkan data dalam studi lapangan, mayoritas informan wawancara menyatakan pelaksanaan *whistleblowing* pada institusi pemerintah belum efektif seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.26, sebanyak 11 informan menyatakan pelaksanaan *whistleblowing* belum efektif dan 4 informan menyatakan sudah efektif. Oleh karena itu, item ini tidak dapat mendukung model penelitian awal. Selain pelaksanaan *whistleblowing* pada institusi pemerintah, hasil wawancara

menunjukkan bahwa informasi awal dari *whistleblowing* tidak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan pemeriksaan yang ditunjukkan pada Tabel 4.32, sebanyak 10 informan menyatakan tidak dan 5 informan menyetujui pernyataan tersebut. Maka variabel hubungan *whistleblowing* dalam praperencanaan pemeriksaan investigatif dihapuskan dari model awal penelitian

Pada langkah ketiga dilakukan peninjauan kembali antara literatur dengan konstruksi dan dimensi yang dihasilkan dari langkah kedua untuk memastikan bahwa konstruk yang dipilih memadai dan relevan berdasarkan teori yang ada. Hubungan *whistleblowing* dalam praperencanaan pemeriksaan investigatif dihapus dari penelitian ini karena hasil studi lapangan tidak mendukung konstruk penelitian ini, meskipun terdapat teori yang mendukung, yaitu keefektifan pelaksanaan *whistleblowing* dan informasi awal dari *whistleblowing* sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan pemeriksaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai item terkait yang dihasilkan dari analisis deduktif dan aspek pengukuran konstruk, antara lain sebagai berikut:

4.3.4.1 Pendeteksian *Fraud* pada Institusi Pemerintah

Ada 11 item yang diidentifikasi dari penelitian sebelumnya untuk mengukur konstruk deteksi *fraud*. Item-item tersebut meliputi: pemahaman umum *fraud* (Albrech, 2012), pemahaman khusus *fraud* (KUHP), pelaku *fraud* (Serafeim, 2013), penyebab *fraud* (Crowe, 2011), laporan *fraud* (ACFE, 2016), pelanggaran peraturan (Enofe et al, 2015), pelanggaran oleh pimpinan (Enofe et al, 2015), gaya kepemimpinan otoriter (Fullerton dan Durtschi, 2004), pemisahan tugas (Enofe et

al, 2015), gaji dan tunjangan (Mitnick, 1973), dan teknik deteksi *fraud* (Bhowmik, 2008).

Berdasarkan studi lapangan dan teori yang ada, *fraud* dalam penelitian ini adalah tindakan melanggar hukum, merugikan orang dan disengaja atau memiliki niat untuk melakukan kecurangan. Sedangkan *fraud* secara khusus merupakan perbuatan yang merugikan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan. Pada Badan Pemeriksa Keuangan Unit Investigasi, *fraud* secara lebih spesifik disebut sebagai Tindak Pidana Korupsi (TPK). Pelaku *fraud* dapat berasal dari internal maupun eksternal institusi.

Dalam penelitian ini ditemukan ada 8 indikasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi *fraud*, antara lain:

1. Arogansi, kemampuan, peluang, tekanan, dan rasionalisasi merupakan penyebab terjadinya *fraud*. Penyebab *fraud* merupakan salah satu dari arogansi, kemampuan, peluang, tekanan dan rasionalisasi, atau gabungan diantara penyebab tersebut. Penyebab yang paling banyak ditemui adalah adanya tekanan baik dari keluarga maupun atasan serta adanya peluang untuk melakukan *fraud*.
2. Adanya laporan *fraud* dapat mengindikasikan risiko terjadinya *fraud*. *Fraud* sifatnya sulit untuk dideteksi dan tersembunyi sehingga ketika ada laporan mengenai *fraud*, maka risiko terjadinya *fraud* meningkat. Namun ketika ada laporan mengenai *fraud* harus dilakukan telaah mengenai kebenaran laporan tersebut.

3. Pelanggaran peraturan dapat mengindikasikan risiko fraud. Pelanggaran peraturan secara sengaja dipastikan sebagai fraud.
4. Pelanggaran peraturan oleh pimpinan dapat meningkatkan risiko terjadinya *fraud* karena pimpinan adalah pemegang kekuasaan. Selain itu, ketika pimpinan melakukan *fraud*, terdapat kecenderungan bawahan juga turut serta melakukan *fraud* karena *fraud* tidak dapat dilakukan sendiri oleh pimpinan.
5. Pimpinan organisasi yang memiliki gaya manajemen yang otoriter dapat mendorong terjadinya *fraud*. Pemimpin otoriter yang taat terhadap peraturan serta memiliki manajemen yang baik justru akan menekan risiko *fraud*. Sedangkan pemimpin otoriter yang tujuannya tidak sejalan dengan tujuan institusi cenderung tinggi risiko terjadinya *fraud*.
6. Adanya pemisahan tugas dapat menurunkan risiko terjadinya *fraud*. Salah satu pengendalian internal yang baik yaitu adanya *segregation of duty*. Jika pengendalian internal institusi baik maka risiko terjadinya *fraud* rendah. Namun sebaik apapun pengendalian internal yang dilakukan tetapi terjadi kolusi maka tetap terjadi *fraud*.
7. Besarnya gaji dan tunjangan dapat mempengaruhi risiko adanya *fraud*. Pegawai dengan gaji dan tunjangan yang sesuai dengan beban serta risiko pekerjaannya kemungkinan kecil melakukan *fraud*. Namun disisi lain individu yang memiliki sifat serakah walaupun mendapat gaji dan tunjangan yang sesuai, risiko terjadinya *fraud* meningkat.

8. Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi *fraud* antara lain pengendalian internal, *fraud* auditing, *fraud* hotline, kebijakan *whistleblowing*, pelatihan pencegahan dan pendeteksian *fraud*, serta *data mining*. Selain yang disebutkan terdapat teknik lainnya untuk mendeteksi *fraud* yaitu audit investigasi, pemeriksaan perhitungan negara, sistem deteksi dini, dan laporan hasil kekayaan pejabat negara.

4.3.4.2 Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif

Ada 5 item yang diidentifikasi dari penelitian sebelumnya untuk mengukur konstruk praperencanaan pemeriksaan investigatif yang meliputi: tujuan praperencanaan pemeriksaan investigatif (BPK, 2008), pemahaman definisi informasi awal (BPK, 2008), pemahaman penelaahan informasi awal (BPK, 2008), langkah-langkah praperencanaan pemeriksaan investigatif (BPK, 2008) dan sumber informasi awal (BPK, 2008).

Tujuan utama praperencanaan pemeriksaan investigatif yaitu sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan investigatif dalam hal seluruh tahapan pada praperencanaan pemeriksaan terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan bahwa tahapan awal yaitu praperencanaan dilanjutkan perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir pelaporan.

Pada tahap praperencanaan didapatkan informasi awal sebagai keterangan permulaan mengenai suatu penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, *fraud*, dan ketidakpatutan yang telah atau sedang dan akan terjadi.

Informasi awal yang diterima oleh BPK biasanya masih bersifat umum, belum menjelaskan secara rinci mengenai masalah yang terjadi.

Pada saat menganalisis informasi awal, dapat pula dilakukan klarifikasi jika diperlukan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Selain itu juga dapat dilakukan pengumpulan informasi diluar laporan resmi seperti profil personil, sejarah organisasi atau unit, dan informasi non formal yang relevan untuk mendukung prediksi.

Sumber informasi awal dapat berasal dari internal BPK yaitu temuan pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, inisiatif badan. Sedangkan sumber informasi awal dari eksternal BPK yaitu instansi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), laporan penganduan, dan *whistleblowing*. Ditambahkan pula oleh informan bahwa informasi awal yang diterima BPK dapat berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan.

4.3.4.3 Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Ada 6 item yang diidentifikasi dari penelitian sebelumnya untuk mengukur konstruk pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang meliputi: hipotesis awal pelaksanaan pemeriksaan investigatif (BPK, 2008), tujuan pelaksanaan pemeriksaan investigatif (BPK, 2008), tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan investigatif (BPK, 2008), tujuan pengumpulan bukti (BPK, 2008), teknik-teknik pelaksanaan pemeriksaan investigatif (BPK, 2008), dan pemahaman jenis-jenis bukti pemeriksaan (BPK, 2008).

Pada tahapan pelaksanaan pemeriksaan investigatif, pemeriksa telah memiliki hipotesis awal yang berisi mengenai apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana fraud dilakukan atau kerugian yang dapat dinilai dalam bentuk uang telah terjadi. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan investigatif adalah mengumpulkan bukti untuk mendukung hipotesis yang telah dimiliki. Tujuan dari pengumpulan bukti yaitu untuk melengkapi bukti pemeriksaan yang diperlukan dalam rangka mengungkap fakta dan proses kejadian, sebab, dan akibat *fraud* serta pihak yang diduga terkait *fraud*. Bukti yang dikumpulkan juga harus memenuhi syarat sebagai bukti yang dapat digunakan dalam persidangan.

Tahap – tahap pada pelaksanaan pemeriksaan investigatif yaitu mengumpulkan bukti, menganalisis dan mengevaluasi bukti, menyusun konsep simpulan, dan mendiskusikan konsep simpulan. Sedangkan teknik-teknik yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada dasarnya sama dengan teknik yang digunakan dalam pemeriksaan reguler yaitu inspeksi, konfirmasi eksternal, perhitungan ulang, pelaksanaan kembali dan prosedur analitis. Ditambahkan pula oleh informan wawancara mengenai teknik dan hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif yaitu kemampuan mengolah informasi digital, analisis atau rewiu dokumen, teknik *follow the money*, dan *worth method*. Pada pelaksanaan pemeriksaan investigatif, terutama pada saat pengumpulan bukti, pemeriksa harus terlebih dahulu memahami jenis-jenis bukti pemeriksaan yang harus dikumpulkan dan keterkaitan antar jenis bukti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.4.4 Pelaksanaan *Whistleblowing*

Ada 7 item yang diidentifikasi dari penelitian sebelumnya untuk mengukur konstruk pelaksanaan *whistleblowing* yang meliputi: pemahaman mengenai *whistleblowing* (KNKG, 2008), persepsi mengenai manfaat dan pentingnya *whistleblowing* dalam suatu instansi (Alam, 2014), penerapan *whistleblowing* pada instansi pemerintah (Alam, 2014), institusi pemerintah mendorong *whistleblowing* (Hertanto, 2009), institusi pemerintah memiliki mekanisme untuk melindungi *whistleblower* (Hertanto, 2009), pemahaman pelaku *whistleblower* (Hertanto, 2009), dan *whistleblowing* yang berasal dari BUMN (Hertanto, 2009).

Berdasarkan hasil wawancara dan teori yang ada didapatkan definisi *whistleblowing* adalah tindakan seorang informan yang mengungkapkan *fraud* dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk menghentikan *fraud*. *Whistleblower* dapat sebagai korban maupun sebagai pelaku dari *fraud* yang terjadi. Tujuan *whistleblower* melaporkan *fraud* yang terjadi tidak hanya mengungkapkan *fraud* untuk menghentikan *fraud*, tetapi terdapat tujuan lain yaitu balas dendam atau sakit hati.

Informan wawancara menyatakan bahwa *whistleblowing* bermanfaat dan penting bagi institusi pemerintah, namun penerapannya belum efektif terutama perlindungan saksi. Banyak kendala yang dihadapi baik dari segi anggaran sampai dengan pengelolaannya, baik dari pimpinan maupun pegawai sebagai *whistleblower*. Meskipun penerapan *whistleblowing* belum efektif, pemerintah telah mendorong pelaksanaan *whistleblowing* pada institusi pemerintah dan sudah ada peraturan yang mendukung. Pada saat ini sudah banyak kementerian dan

lembaga yang memiliki sistem *whistleblowing*, bahkan pemerintah telah membuat sistem *whistleblowing* yang terintegrasi antara 17 kementerian lembaga dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Untuk mekanisme perlindungan *whistleblower* secara aturan sudah ada yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun pada penerapannya masih kurang. Hal ini yang merupakan salah satu keengganan calon *whistleblower* untuk menyampaikan informasi terkait *fraud*.

Pelaku *whistleblowing* dapat berasal dari internal maupun eksternal institusi. Informasi yang didapatkan dari internal *whistleblower* lebih lengkap dibandingkan dari eksternal *whistleblower* dan informasi dari *whistleblowing* BUMN tidak lebih sering digunakan dibandingkan *whistleblowing* dari kementerian lembaga.

4.3.4.5 *Whistleblowing* dan Praperencanaan Pemeriksaan

Ada 3 item yang diidentifikasi dari penelitian sebelumnya untuk mengukur konstruk *whistleblowing* dan praperencanaan pemeriksaan investigatif yang meliputi: pemrosesan informasi awal yang bersumber dari *whistleblowing* (BPK, 2008), informasi awal bersumber dari *whistleblowing* sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan pemeriksaan investigatif (BPK 2008), dan *whistleblowing* membantu proses praperencanaan pemeriksaan investigatif (BPK, 2008).

Informasi yang bersumber dari *whistleblowing* diterima oleh (BPK) untuk selanjutnya diproses sebagai informasi awal dalam praperencanaan pemeriksaan. Informasi awal ini perlu penelaahan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa

informasi yang disampaikan dapat digunakan dalam penyusunan prediksi. Namun informasi dari *whistleblowing* ini tidak digunakan dan bukan yang utama dalam pengambilan keputusan untuk tahap selanjutnya yaitu perencanaan pemeriksaan investigatif. Hal ini disebabkan karena keandalan dan relevansi informasi dan dokumen yang disampaikan oleh *whistleblower* masih kurang. Keputusan perencanaan pemeriksaan dapat diambil setelah diperoleh keyakinan atas informasi yang diperoleh dari *whistleblower* bahwa unsur-unsur terjadinya *fraud* telah terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan. Walaupun tidak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tahap selanjutnya, *whistleblowing* dapat membantu proses praperencanaan pemeriksaan investigatif.

4.3.4.6 *Whistleblowing* dan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Ada 2 item yang diidentifikasi dari penelitian sebelumnya untuk mengukur konstruk *whistleblowing* dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang meliputi: informasi dari *whistleblowing* menambah bukti (BPK, 2008), dan peran *whistleblowing* dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif (BPK, 2008).

Pelaksanaan pemeriksaan investigatif merupakan tahap ketiga dalam pemeriksaan investigatif setelah tahap praperencanaan dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan teori yang ada menunjukkan bahwa informasi dari *whistleblowing* dapat menambah bukti dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif. Pengungkapan oleh *whistleblower* dapat menambah bukti berupa bukti wawancara dan dapat memberikan dokumen yang berhubungan dengan kasus serta mengetahui lokasi bukti-bukti. *Whistleblower* tidak hanya berperan

dalam praperencanaan pemeriksaan investigatif tetapi juga berperan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif. Peran *whistleblower* antara lain merupakan petunjuk atau dapat menjadi *indirect evidence* dalam hal memudahkan pemeriksa untuk mendapatkan *direct evidence*. Selain itu juga peran *whistleblower* akan meningkat apabila ditunjang dengan keandalan dan validas informasi yang disampaikan. Secara keseluruhan peran *whistleblower* mempermudah pelaksanaan pemeriksaan investigatif.

4.3.4.7 Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif dan Deteksi *Fraud*

Ada 2 item yang diidentifikasi dari penelitian sebelumnya untuk mengukur konstruk praperencanaan pemeriksaan investigatif dan deteksi *fraud* yang meliputi: praperencanaan pemeriksaan investigatif sebagai metode deteksi *fraud* (BPK, 2008), dan praperencanaan menjadikan deteksi *fraud* lebih cepat (BPK, 2008).

Praperencanaan pemeriksaan investigatif merupakan bagian dari pemeriksaan investigatif yang dirancang untuk mendeteksi *fraud*. Hasil wawancara dan teori yang ada menunjukkan bahwa praperencanaan pemeriksaan investigatif dapat dijadikan metode yang tepat dalam mendeteksi *fraud*. Proses praperencanaan perlu dilakukan, diantaranya pengumpulan informasi awal. Semakin banyak informasi yang diperoleh akan semakin memudahkan dalam menyusun hipotesis awal. Dengan praperencanaan pemeriksaan investigatif prosedur yang dilakukan akan lebih sistematis dan langkah yang tepat sehingga akan mempercepat menjawab hipotesis.

Sedangkan tujuan dari praperencanaan pemeriksaan investigatif adalah untuk menetapkan adanya alasan (prediksi) yang cukup kuat dan akurat sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun praperencanaan pemeriksaan investigatif tidak dapat dijadikan satu-satunya metode dalam mendeteksi *fraud*. Selain itu, praperencanaan pemeriksaan investigatif dapat menjamin proses pendeteksian *fraud* menjadi lebih cepat karena semakin banyak informasi awal yang diperoleh dan proses penelaahan terhadap informasi awal tersebut dilakukan dengan tepat maka pendeteksian *fraud* menjadi lebih efektif.

4.3.4.8 Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Deteksi *Fraud*

Ada 2 item yang diidentifikasi dari penelitian sebelumnya untuk mengukur konstruk pelaksanaan pemeriksaan investigatif dan deteksi *fraud* yang meliputi: pelaksanaan pemeriksaan investigatif sebagai metode deteksi *fraud* (BPK, 2008), dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif menjadikan deteksi *fraud* lebih cepat (BPK, 2008).

Pelaksanaan pemeriksaan investigatif merupakan tahap ketiga dari keseluruhan tahap pemeriksaan yang didahului praperencanaan dan perencanaan pemeriksaan. Tujuan pelaksanaan pemeriksaan investigatif adalah mengumpulkan bukti dan mendukung hipotesis. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa praperencanaan merupakan salah satu metode yang efektif untuk mendeteksi *fraud*. Berdasarkan hasil wawancara dan teori yang ada menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan investigatif juga efektif mendeteksi *fraud*. Sejalan dengan tujuan pemeriksaan investigatif yaitu membuat jelas suatu perkara karena

fraud sulit untuk diungkap pada pemeriksaan reguler dan mengungkap *fraud* yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang mengakibatkan adanya kerugian negara atau kerugian daerah.

Selain itu, pemeriksaan investigatif apabila semua prosedur dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif direncanakan dan dilaksanakan dengan benar serta tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu integritas pemeriksa maka pelaksanaan pemeriksaan investigatif dapat menjamin pendeteksian *fraud* menjadi lebih cepat.

4.3.4.9 *Whistleblowing* dan Deteksi *Fraud*

Ada 3 item yang diidentifikasi dari penelitian sebelumnya untuk mengukur konstruk *whistleblowing* dan deteksi *fraud* yang meliputi: peran *whistleblowing* mendeteksi *fraud* (Samuels et al, 2014), peningkatan sistem deteksi *fraud* melalui *whistleblowing* (AICPA, 2014), dan penerapan *whistleblowing* memiliki dampak turunya angka *fraud* (Naomi, 2015).

Whistleblowing memiliki peran sebagai upaya mendeteksi *fraud*, karena pada situasi tertentu terdapat hal-hal yang sifatkan tersembunyi yang sulit didapatkan secara formal dan hanya dapat diungkap oleh *whistleblower* kepada pemeriksa. Dengan adanya *whistleblowing* dapat menurunkan angka *fraud* atau paling tidak menekan terjadinya *fraud*, jika didukung dengan komitmen dari tingkat pimpinan dalam pelaksanaan sistem *whistleblowing* pada institusinya dan terutama memberikan jaminan kepada mereka yang melaporkan adanya *fraud*. Cara meningkatkan sistem deteksi *fraud* melalui *whistleblowing* dapat dilakukan melalui beberapa cara antar lain:

1. Memaksimalkan *whistleblowing*
2. Membayar *whistleblower*
3. Sosialisasi *whistleblowing*
4. Meningkatkan perlindungan *whistleblower*

4.3.5 Model Penelitian Komprehensif

Berdasarkan literatur dan wawancara dengan informan di lapangan, didapatkan model penelitian komprehensif seperti pada Gambar 4.2. Model komprehensif penelitian ini berisi konstruk model awal penelitian yang didukung hasil wawancara dengan informan dan berisi konstruk baru yang relevan yang muncul di luar model awal penelitian.



Gambar 4.2
Model Komprehensif

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Fraud merupakan bahaya laten yang sifatnya tersembunyi dan sulit untuk diketahui. Untuk memberantas *fraud* diperlukan suatu cara yaitu salah satunya dengan deteksi *fraud*. Terdapat bermacam-macam metode yang efektif dalam pendeteksian *fraud*, pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu pemeriksaan investigatif terdiri dari praperencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan pada unit khusus yang hanya ada di kantor pusat namun tidak ada di kantor perwakilan yaitu pada Auditorat Unit Investigasi. Pemeriksaan investigatif terdiri dari empat tahapan yaitu praperencanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Pemeriksaan investigatif ini berbeda dengan pemeriksaan reguler yang biasa dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan reguler antara lain pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Sedangkan pemeriksaan investigatif termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Tujuan utama pelaksanaan pemeriksaan investigatif adalah untuk mengungkap indikasi *fraud* atau dalam istilah BPK dan peraturan perundang-undangan disebut sebagai tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif bisa jadi didapatkan deteksi mengenai *fraud*. Pendeteksian *fraud* dalam pemeriksaan investigatif lebih cepat karena tahapan dan prosedur yang dirancang dalam pemeriksaan investigatif dirancang khusus untuk dapat memberantas *fraud*.

Pemeriksaan investigatif pada tahap praperencanaan dibutuhkan informasi yang valid dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk tahap selanjutnya yaitu perencanaan pemeriksaan dan agar hasil hasil pemeriksaan nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, dibutuhkan informasi dan bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Salah satu cara untuk memperoleh informasi dan bukti yang mendukung baik praperencanaan maupun pelaksanaan pemeriksaan investigatif yaitu yang bersumber dari *whistleblowing*.

Dari *whistleblowing* tidak hanya didapatkan informasi mengenai *fraud* yang terjadi tetapi juga sebagai bukti wawancara dan menuntun kepada informasi maupun bukti lainnya. Informasi dari *whistleblowing* mendukung pemeriksaan investigatif karena informasi yang diberikan oleh *whistleblower* sulit didapatkan secara formal. Namun tidak semua informasi yang diberikan oleh *whistleblower* memiliki tingkat validitas yang sama sehingga diperlukan telaah atas informasi awal untuk menguji informasi tersebut. Pada institusi pemerintah telah diterapkan dan mendorong pelaksanaan *whistleblowing* namun pelaksanaan dan mekanisme perlindungan saksi belum efektif. Selain itu, informasi yang bersumber dari *whistleblowing* merupakan informasi pendukung, bukan informasi utama yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk dilakukannya pelaksanaan pemeriksaan investigatif.

Kesimpulan dari penjelasan di atas dan berdasarkan model penelitian komprehensif yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa *whistleblowing* memiliki peran dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif,

namun perannya kurang dalam praperencanaan pemeriksaan investigatif. *Whistleblowing*, praperencanaan pemeriksaan investigatif, dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif merupakan metode yang efektif dalam mendeteksi *fraud*. Selain itu ditemukan konstruk lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi *fraud* yaitu sistem deteksi dini, laporan hasil kekayaan pejabat negara, pemahaman entitas, pemeriksaan perhitungan negara dan teknik berkomunikasi.

5.2 Kontribusi dan Implikasi

5.2.1 Kontribusi

Penelitian mengenai deteksi fraud dan pemeriksaan investigatif yang dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap praperencanaan dan tahap pelaksanaan pemeriksaan investigatif masih jarang ditemukan. Penelitian ini menggabungkan beberapa penelitian terdahulu dengan beberapa tema yang berbeda yaitu *whistleblowing*, pemeriksaan investigatif, dan deteksi *fraud* sehingga menambah penelitian mengenai tiga tema tersebut. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan penelitian-penelitian berikutnya maupun dijadikan sebagai indikator untuk diteliti secara kuantitatif.

5.2.2 Implikasi

Tujuan dari pemeriksaan investigatif adalah untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung hipotesis awal. Bukti yang dikumpulkan tersebut nantinya akan digunakan sebagai pendukung dalam proses penuntutan di pengadilan. Pendeteksian *fraud* dalam pemeriksaan investigatif diperlukan pemahaman suatu entitas yang diperiksa mencakup pengendalian dan mengidentifikasi kondisi yang

menunjukkan tanda-tanda *fraud* yang mungkin terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan apabila pemeriksa mampu mendapatkan informasi yang valid dan relevan. Informasi tersebut dapat berasal dari *whistleblowing* dan diproses dalam praperencanaan pemeriksaan investigatif untuk kemudian digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif.

5.3 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini hanya dilakukan hanya dari sudut pandang pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan, belum menggunakan informan dari institusi yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga tindak lanjut mengenai laporan *whistleblowing* pada institusi yang diperiksa tidak diketahui karena jawaban pemeriksa sebagai informan berdasarkan pemahaman dan pengalaman selama memeriksa institusi pemerintah.

Saran dari peneliti untuk untuk institusi pemerintah dan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Pelaksanaan *whistleblwoing* dinilai belum efektif dan mekanisme perlindungan saksi masih kurang. Diharapkan pemerintah tidak hanya membangun sistem namun perlu peningkatan dalam pelaksanaannya sehingga *whistleblower* merasa aman dan terlindungi ketika menyampaikan informasi mengenai *fraud* yang terjadi.
2. Pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan informan wawancara, tidak hanya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemeriksa eksternal pemerintah namun dapat juga ditambahkan informan wawancara dari pemeriksa internal pemerintah yaitu Inspektorat Pemerintah

Daerah/Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penelitian ini dapat juga dilakukan untuk pihak yang diperiksa yaitu Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, Kementrian maupun Lembaga Pemerintah.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat item baru yang dapat digunakan dalam mendeteksi *fraud*, yaitu teknik komunikasi, pemeriksaan kerugian negara (audit forensik), laporan hasil kekayaan pejabat negara (LHKPN), dan sistem deteksi dini. Untuk keempat item baru tersebut dapat dilakukan penelitian selanjutnya untuk dilakukan pengujian.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2016). *Report to The Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Austin, USA: Association of Certified Fraud Examiner, Inc.
- ACFE. (2017). *Survai Fraud Indonesia 2016*. Jakarta: Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter.
- Achsin, M. (2010). *Visum Akuntansi Forensik dalam Tindak Pidana Korupsi*. Disertasi Universitas Brawijaya.
- AICPA. (2011). *The 2011 Forensic and Valuation Services (FVS) Trend Survey*. American Institute of CPAs.
- AICPA. (2014). *The 2014 AICPA Survey on International Trend in Forensic and Valuation Services*. American Institute of CPAs.
- Alleyne, P., & Howard, M. (2005). An Exploratory Study of Auditors' Responsibility for Fraud Detection in Barbados. *Managerial Auditing Journal*, 20(3), 284–303.
- Atherton, A., & P. Elsmore. (2007). Structuring qualitative enquiry in management and organization research: A dialogue on the merits of using software for qualitative data analysis. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 2, 62-77.
- Baran, M. & Jones, J. (2016) *Mixed Methods Research for Improved Scientific Study*. Cardinal Strich University: IGI Global.
- Bazeley, P. (2007). *Qualitative Data Analysis with NVivo*. London: Sage Publications Ltd.
- Bierstaker, J. L., Brody, R. G., & Pacini, C. (2006). Accountants' Perceptions Regarding Fraud Detection and Prevention Methods. *Managerial Auditing Journal*, 21(5), 520– 535.
- BPK. (2008). Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif Atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah. Jakarta.
- BPK. (2015). Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Perhitungan Kerugian Negara. Jakarta.

- BPK. (2018). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2017 BPK RI periode 2003 sampai dengan 31 Desember 2017*. Jakarta.
- Chamunorwa, J.C. (2015). *An Exploration of Whistleblowing in Fighting Corruption in the Public Sector in South Africa: A Case of Stellenbosch Municipality*. Stellenbosch University.
- Charmaz, K. (2008). Construction and the Grounded Theory. *Handbook of Construction Research*. New York: The Guilford Press. 397-412.
- Clissett, P. (2008). Evaluating Qualitative Research. *Journal of Orthopedic Nursing*, 2, 99-105.
- Collis, J. & Hussey, R. (2003). *Business Research: A Practical Guide for Undergraduate and Postgraduate Students 2nd Edition*. Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire.
- Cooper, D. R. & Pamela, S. (2003). *Business Research Methods*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Corbin, J. & Strauss, A. (1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria. *Qualitative Sociology*, 13(1). 3-21.
- COSO. (2004). *Enterprise Risk Management – Integrated Framework*. Committee of Sponsoring Organizations.
- Crabtree, B.F. (1999). *Doing Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Cressey, D. (1953). *Other People's Money: A Study in The Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe, IL: FreePress.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2007). *Designing and Conducting Mixed Methods Research (first edition)*. California, University of Nebraska-Lincoln: Sage Publications, Inc.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry Research Design: Choosing among Five Approaches (Second edition.)*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Crowe, H. (2012). *The Mind behind The Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Element*. ACFE.
- Crowley, C., R. Harre, & C. Tagg. (2002). Qualitative Research and Computing: Methodological Issues and Practices in Using QSR NVivo and NUD*IST. *International Journal of Social Research Methodology*, 5(3), 193-197.

- Davia, H. R. (2000). *Accountant's Guide to Fraud Detection and Control. 2nd edition*. New York: Wiley.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dewi, N.W.P. & Ramantha, I.W. (2016). Profesionalisme Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemampuan Investigatif pada Pembuktian Kecurangan oleh Auditor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15 (92). 1029-1055.
- Dollah, S., Abduh, A., & Rosmaladewi. (2017). Benefits and Drawbacks of Nvivo QSR Application. *Advances in Social, Education and Humanities Research*, 149, 61-63.
- Dubis, S. G. (2009). *Internal Auditing and Fraud*. Fla: USA. The Institute of Internal Auditors.
- Dye, K. M. (2017). Corruption and Fraud Detection by Public Sector Auditors. *EDPACS*, 5/6, 6. 303-321.
- Dyck, A., Morse, A., & Zingales, L. (2010). Who Blows The Whistle on Corporate Fraud ?. *The Journal of Finance*, 65 (6), 2213-2253.
- Echols, J. M., & Hassan, S. (2005). *Kamus Inggris Indonesia: An English – Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia
- Esterberg, K. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. New York: McGraw-Hill.
- Fama, E., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26, 301-325.
- Fauzan, I.A., Purnamasari, P., & Gunawan, H. (2015). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Kasus Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat). *Prosiding Akuntansi*, 456-465.
- Flick, U. (2013). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to Design and Evaluate Research in Education Eight Edition*. New York, USA: Mc Graw Hill.

- Francis, R. D., & Armstrong, A. (2011). Corruption and Whistleblowing in International Humanitarian Aid Agencies. *Journal of Financial Crime*, 18(4), 319–335.
- Garcia-Horta, J., & M.T. Guerra- Ramos. (2009). The Use of CAQDAS in Educational Research: Some Advantages, Limitations and Potential Risks. *International Journal of Research & Method in Education*, 32(2), 151-165.
- Green. J.T. (2009). *Qualitative Methods for Health Research*. London: Sage Publication
- Greener, S. (2008). *Business Research Methods*. Ventus Publishing ApS.
- Halim, A. & Abdullah, S. (2005). Hubungan dan Masalah Keagenana di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 (1), 53-64.
- Hall, J. A. (2011). *Accounting Information System Seventh Edition*. Mason: Cengage Learning.
- Halbouni, S. S., Obeid, N., & Garbou, A. (2016). Corporate Governance and Information Technology in Fraud Prevention and Detection: Evidence From the UAE. *Managerial Auditing Journal*, 31(6/7), 589–628.
- Hennink, M, Hutter, I & Bailey, A. (2011). *Qualitative Research Methods*. SAGE Publications Inc. Thousand Oaks: CA.
- Hertanto, H. (2009). *Mengadili Whistleblower*. Jaringan Advokasi Untuk Whistleblower. Artikel. Jakarta Pusat.
- Holtfreter, K. (2004). Fraud in Organizations: An Examination of Control Mechanisms. *Journal of Financial Crime*, 12(1), 88-95.
- Hoover, R.S. & Koerber. Q.L. (2011). Using NVivo to Answer the Challenges of Qualitative Research in Professional Communication: Benefits and Best Practices. *IEEE Transactions on Professional Communication*, 54(1) 68-82.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2001). *SA Seksi 316: Pertimbangan atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan*. Jakarta: IAI.
- International Auditing and Assurance Standars Board. (2014). *Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Service Pronouncements*. New York: International Federation of Accountants.

- Iqbal, M. (2010). *Pengaruh Tindakan Pencegahan, Pendeteksian dan Audit Investigatif Terhadap Upaya Meminimalisasi Kecurangan Dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jasmin, V.A. (2015). Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan (Fraud). *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN*, 4(2).12-23
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Johansson, E., & Carey, P. (2016). Detecting Fraud: The Role of the Anonymous Reporting Channel. *Journal Business Ethics*. 139(2). 391-409.
- Jubb, P. B. (1999). Whistleblowing: A Restrictive Definition and Interpretation. *Journal of Business Ethics*, 21(1). 77-94.
- Kaptein, M. (2011). From Inaction to External Whistleblowing: The Influence of the Ethical Culture of Organizations on Employee Responses to Observed Wrongdoing. *Journal of Business Ethics*. 98(3), 513-530
- Kurt, F. R., et al. (2009). *Internal Auditing: Assurance & Consulting Service. Second Edition*. Unites States of America: The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF).
- Latham, B. (2007). *Quantitative Research Methods*. ENGL 5377.
- Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2005). *Practical Research Planning and Design (5th edition)*. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- MacGregor, J., & Stuebs, M. (2014). The Silent Samaritan Syndrome: Why The Whistle Remains Unblown. *Journal Business Ethics*, 120 (2), 149-164.
- McLeod, J. (2001). *Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy*. London: Sage Publications.

- Messier, W.F., Glover, S.M., & Prawitt, D.F. (2006). *Auditing and Assurance Services a Systematic Approach. Edisi Keempat*. Penerbit Salemba 4. Singapore: McGraw-Hill Irwin.
- Miceli, M.P., & Near, J.P. (1985). Organizational Dissidence: The Case of Whistleblowing. *Journal of Business Ethics*, 4(1), 1-16.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moeller, R. (2009). *“Modern Internal Auditing” 7th edition*. New Jersey, USA: JohnWiley & Sons, Inc.
- Nasution. (1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Penerbit Tarsito: Bandung.
- Pamungkas, I. D., Ghozali, I., & Acmad, Tarmizi. (2017). The Effects of The Whistleblowing System on Financial Statements Fraud: Ethical Behavior As The Mediators. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(10). 1592-1598.
- Panjaitan, I.A. (2018). *Whistleblowing: Meningkatkan Hasil Audit Forensik dalam Pengungkapan Tindakan Korupsi oleh Auditor Pemerintah*. Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, *Juripol 1*(1). 50-60.
- Park, H., Rehg, M. T., & Lee, D. (2005). The Influence of Confucian Ethics and Collectivism on Whistleblowing Intentions: A Study of South Korean Public Employees. *Journal of Business Ethics*, 58(4), 387–403.
- Patton, M.Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Patunru, A. A. L. (2014). *Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan (Studi Kasus pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan)*. Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*).
- Rahmayani, L. (2014). Pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisme Profesional Auditor, Teknik Audit dan Whistleblower terhadap Efektifitas Pelaksanaan Audit Investigasi Dalam Pengungkapan Kecurangan. *JOM FEKOM*, 1(2). 1-15.

- Rae and Subramaniam. (2008). Quality of Internal Control Procedures Antecedents and Moderating Effect on Organisational Justice And Employee Fraud. *Managerial Auditing Journal*, 3(2), 104-124.
- Ross, S.A. (1973). The Economic Theory of Agency the Principal's Problem. *The American Economic Review*, 63(2), 134-139.
- Rozali, R.D.Y. & Darliana, C.F. (2015). Teknik Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Money Laundering Berdasarkan Perspektif Akuntan Forensik. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(1). 572-585.
- Sabarno, H. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Samuels, J. A., & Pope, K. R. (2014). Are Organizations hindering employee Whistleblowing?. *Journal of Accountancy*, 218(6), 42-44.
- Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill. (2009). *Research Methods for Business Students Fifth Edition*. Essex, England: Pearson Education Limited.
- Setiawan, M. A., & Helmayunita, N. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Tekanan Finansial, dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen pada Konteks Pemerintahan Daerah. *Economac*, 1(1), 52-68.
- Shank, G.D. (2002). *Qualitative research: a Personal Skills Approach*. Pearson Education Inc., New Jersey: Upper Saddle River.
- Shelton, M. A. (2014). Analysis of Capabilities Attributed to the Fraud Diamond. Undergraduate Honors These.Paper 213.
- Strøm, Kaare. 2000. Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies. *European Journal of Political Research* 37 (3), 261-89.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati. (2007). Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah tentang Tindak Korupsi. *JAAI*, 11(1), 47-66.
- Thomson, C. (2008). Phenomenology in Teacher Education Contexts: Enhancing Pedagogical Insight and Critical Reflexive Capacity. *The Indo-Pacific Journal of Phenomenology*, 8(9),1-9

- The Institute of Internal Auditors. (2009). *Internal Auditing and Fraud*. Fla USA: The Institute of Internal Auditors.
- Thoyibatun, S. (2012). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 16(2), 245-260.
- Transparency International. (2010). *Whistleblowing: An Effective Tool in the Fight Against Corruption*. Berlin, Germany : Transparency International The Global Coalition Against Corruption.
- Tuanakotta, T.M. (2016). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (Ed. Ke-4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 13.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat 1.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 4.
- Valentina, B. Dewi, E. & Andrisman, T. (2017). Implementasi Whistleblower Dalam Mengungkapkan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Poenale*, 5(3). 1-14.
- Wahyudi & Sopanah, A. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Malang Raya. *Indonesian Publication Index*, 13(1).1-25.
- Wilopo. (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik Dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 9(3): 346-366.
- Welsh. (2002). Dealing with Data: Using NVivo in the Qualitative Data Analysis Process. *Forum Qualitative Social Research*, 3(2) Art 26.611-628.
- Wolfe, D.T. & Dana, R. H. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12). 38-42.

Wuysang, R.V.O., Nagoi, G., & Pontoh, W. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan dan Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 7(2). 31-53.

LAMPIRAN

Lampiran 1
Indikator Rumusan Masalah

P1. Deteksi *Fraud*

No	Indikator	Sumber
1	Pemahaman definisi umum <i>fraud</i> pada institusi pemerintah	Albrech (2012)
2	Pemahaman definisi khusus <i>fraud</i> pada institusi pemerintah	KUHP
3	Pelaku <i>fraud</i>	Serafeim (2013)
4	Penyebab terjadinya <i>fraud</i>	Crowe (2011)
5	Laporan <i>fraud</i> sebagai indikasi risiko <i>fraud</i>	ACFE (2016)
6	Pelanggaran peraturan sebagai indikasi risiko <i>fraud</i>	Enofe et al (2015)
7	Pelanggaran peraturan oleh pimpinan meningkatkan risiko <i>fraud</i>	
8	Gaya kepemimpinan yang otoriter mendorong <i>fraud</i>	Fullerton dan Durtschi (2004)
9	Pemisahan tugas menurunkan risiko <i>fraud</i>	Enofe et al (2015)
10	Pengaruh gaji dan tunjangan pegawai atas risiko <i>fraud</i>	Mitnick (1973)
11	Teknik untuk mendeteksi <i>fraud</i>	Bhowmik (2008)

P2. Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif

No	Indikator	Sumber
1	Tujuan praperencanaan pemeriksaan investigatif	BPK (2008)
2	Pemahaman definisi informasi awal	
3	Pemahaman penelaahan informasi awal	
4	Langkah-langkah praperencanaan pemeriksaan investigatif	
5	Sumber informasi awal	

P3. Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

No	Indikator	Sumber
1	Hipotesis awal pelaksanaan pemeriksaan investigatif	BPK (2008)
2	Tujuan pelaksanaan pemeriksaan investigatif	
3	Tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan investigatif	
4	Tujuan pengumpulan bukti	
5	Teknik-teknik pelaksanaan pemeriksaan investigatif	
6	Pemahaman jenis-jenis bukti pemeriksaan	

P4. *Whistleblowing*

No	Indikator	Sumber
1	Pemahaman mengenai <i>whistleblowing</i>	KNKG (2008)
2	Persepsi mengenai manfaat dan pentingnya <i>whistleblowing</i> dalam suatu instansi	Alam (2014)
3	Penerapan <i>whistleblowing</i> pada instansi pemerintah	
4	Institusi pemerintah mendorong <i>whistleblowing</i>	Hertanto (2009)
5	Institusi pemerintah memiliki mekanisme untuk melindungi <i>whistleblower</i>	
6	Pemahaman pelaku <i>whistleblower</i>	
7	<i>Whistleblowing</i> yang berasal dari BUMN	

Hubungan *Whistleblowing* dan Praperencanaan

P5. Pemeriksaan Investigatif

No	Indikator	Sumber
1	Pemrosesan informasi awal yang bersumber dari <i>whistleblowing</i>	BPK (2008)
2	Informasi awal bersumber dari <i>whistleblowing</i> sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan pemeriksaan investigatif	
3	<i>Whistleblowing</i> membantu proses praperencanaan pemeriksaan investigatif	

Hubungan *Whistleblowing* dan Pelaksanaan Pemeriksaan

P6. Investigatif

No	Indikator	Sumber
1	Informasi dari <i>whistleblowing</i> menambah bukti	BPK (2008)
2	Peran <i>whistleblowing</i> dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif	

Hubungan Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif dan

P7. Deteksi *Fraud*

No	Indikator	Sumber
1	Praperencanaan pemeriksaan investigatif sebagai metode deteksi <i>fraud</i>	BPK (2008)
2	Praperencanaan menjadikan deteksi <i>fraud</i> lebih cepat	

Hubungan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan

P8. Deteksi *Fraud*

No	Indikator	Sumber
1	Pelaksanaan pemeriksaan investigatif sebagai metode deteksi <i>fraud</i>	BPK (2008)
2	Pelaksanaan menjadikan deteksi <i>fraud</i> lebih cepat	

P9. Hubungan *Whistleblowing* dan Deteksi *Fraud*

No	Indikator	Sumber
1	Peran <i>whistleblowing</i> mendeteksi <i>fraud</i>	Samuels et al (2014)
2	Peningkatan sistem deteksi <i>fraud</i> melalui <i>whistleblowing</i>	AICPA (2014)
3	Penerapan <i>whistleblowing</i> memiliki dampak turunnya angka <i>fraud</i>	Naomi (2015)

Lampiran 2

Protocol Wawancara *Semi-Structure*

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifitasan praperencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif dalam mendeteksi *fraud* dengan dukungan *whistleblowing*. Adapun cara untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui wawancara. Rangkaian pertanyaan sebagai bahan wawancara adalah sebagai berikut:

P.1 Pendeteksian *Fraud* oleh BPK

- Apakah menurut anda *fraud* merupakan tindakan melanggar hukum dan merugikan orang lain ?
- Apakah perbuatan merugikan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan merupakan jenis-jenis *fraud*?
- Apakah pelaku *fraud* dapat berasal dari internal dan eksternal? Siapa sajakah yang dapat disebut pelaku internal dan siapa sajakah yang dapat disebut pelaku eksternal?
 1. Internal
 - a. Pejabat tingkat atas
 - b. Pimpinan institusi
 - c. Staf junior
 2. Eksternal
 - a. Pelanggan
 - b. Pemasok
 - c. Agen
 - d. Institusi lain
- Apakah arogansi, kemampuan, peluang, tekanan, dan rasionalisasi merupakan penyebab terjadinya *fraud*?
- Apakah adanya laporan *fraud* dapat mengindikasikan tingginya risiko *fraud*?

- Apakah adanya pelanggaran peraturan dapat mengindikasikan tingginya risiko *fraud*?
- Apakah pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dapat lebih meningkatkan risiko terjadinya *fraud*?
- Apakah pimpinan organisasi yang memiliki gaya manajemen yang otoriter dapat mendorong terjadinya *fraud*?
- Apakah dengan adanya pemisahan tugas dapat menurunkan risiko terjadinya tindak *fraud*?
- Apakah besarnya gaji dan tunjangan baik pegawai maupun pimpinan mempengaruhi tingkat risiko adanya *fraud*?
- Teknik apa saja yang digunakan untuk mendeteksi *fraud* ?
 - a. Pengendalian internal
 - b. *Fraud auditing* (audit forensik dan audit investigasi)
 - c. *Fraud hotline*
 - d. Kebijakan *whistleblowing*
 - e. Pelatihan pencegahan dan pendeteksian *fraud*
 - f. *Data mining*
- Adakah *hal/aspek/faktor lain* menurut saudara yang dibutuhkan untuk mendeteksi adanya *fraud*?

P.2 Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif

- Apakah praperencanaan pemeriksaan investigatif dilakukan untuk pengambilan keputusan pelaksanaan pemeriksaan investigatif?
- Apakah informasi awal adalah keterangan permulaan mengenai suatu penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, *fraud*, serta ketidakpatutan yang telah/sedang dan akan terjadi?
- Apakah setiap informasi awal yang diterima perlu dilakukan penelaahan terlebih dahulu?
- Apa saja langkah-langkah proses praperencanaan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK?

1. Memperoleh informasi awal
 2. Menverifikasi informasi awal
 3. Menganalisis informasi awal
 4. Menyimpulkan hasil analisis informasi awal
- Dari mana sajakah sumber informasi awal yang digunakan BPK dalam praperencanaan pemeriksaan?
 1. Temuan Pemeriksaan (TP)
 2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
 3. Inisiatif Badan
 4. Eksternal BPK:
 - a. Instansi Pemerintah/ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD)
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
 - c. Laporan/pengaduan masyarakat/*whistleblowing*
 - Adakah hal/aspek/faktor *lain* menurut saudara yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praperencanaan pemeriksaan investigatif?

P.3_Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

- Apakah pada tahap pelaksanaan pemeriksaan investigatif, pemeriksa telah memiliki hipotesis awal yang berisi mengenai: apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana PITP dilakukan/ kerugian yang dapat dinilai dalam bentuk uang yang terjadi?
- Apakah pelaksanaan pemeriksaan investigatif dilakukan untuk mengumpulkan bukti untuk mendukung hipotesis?
- Apa saja tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK?
 1. Mengumpulkan bukti
 2. Menganalisis dan mengevaluasi bukti
 3. Menyusun konsep simpulan
 4. Mendiskusikan konsep simpulan

- Apakah pelaksanaan pengumpulan bukti bertujuan untuk melengkapi bukti pemeriksaan yang diperlukan dalam rangka mengungkap fakta dan proses kejadian, sebab dan akibat *fraud* serta pihak yang diduga terkait *fraud*?
- Apa saja teknik-teknik pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK?
 1. Inspeksi
 2. Observasi
 3. Konfirmasi eksternal
 4. Perhitungan ulang
 5. Pelaksanaan kembali
 6. Prosedur analitis Permintaan keterangan
- Apakah pada saat pemeriksa mengumpulkan bukti, pemeriksa harus terlebih dahulu memahami jenis-jenis bukti pemeriksaan yang harus dikumpulkan dan keterkaitan antara jenis bukti dengan alat bukti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- Adakah *hal/aspek/faktor lain* menurut saudara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif?

P.4 Whistleblowing

- Apakah *whistleblowing* merupakan tindakan seorang informan yang mengungkapkan *fraud* dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk menghentikan *fraud*?
- Apakah *whistleblowing* bermanfaat dan penting bagi institusi pemerintah?
- Apakah institusi pemerintah telah menerapkan *whistleblowing* secara efektif?
- Apakah institusi pemerintah mendorong pelaksanaan *whistleblowing* secara internal?
- Apakah institusi pemerintah memiliki mekanisme untuk melindungi *whistleblower*?
- Apakah *whistleblower* dapat berasal dari pihak internal dan eksternal?

- Menurut anda, *whistleblowing* dari dari BUMN lebih sering digunakan daripada *whistleblowing* dari kementrian/lembaga?

P.5 Pengaruh *Whistleblowing* terhadap Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif

- Apakah informasi awal yang bersumber dari *whistleblowing* diproses sebagai informasi awal dalam praperencanaan pemeriksaan?
- Apakah informasi awal yang bersumber dari *whistleblowing* pada praperencanaan pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan pemeriksaan?
- Apakah dengan adanya *whistleblowing* dapat membantu proses praperencanaan pemeriksaan investigatif?

P.6 Pengaruh *Whistleblowing* terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

- Apakah informasi dari *whistleblowing* dapat menambah bukti dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif?
- Apakah peran *whistleblowing* dapat membantu pelaksanaan pemeriksaan investigatif menjadi lebih baik?

P.7 Pengaruh Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif terhadap Deteksi *Fraud*

- Apakah praperencanaan pemeriksaan investigatif dapat dijadikan sebagai metode yang tepat untuk mendeteksi *fraud*?
- Apakah praperencanaan pemeriksaan investigatif dapat menjamin proses pendeteksian *fraud* menjadi lebih cepat?

P.8 Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif terhadap Deteksi *Fraud*

- Apakah pelaksanaan pemeriksaan investigatif dapat dijadikan sebagai metode yang tepat untuk mendeteksi *fraud*?

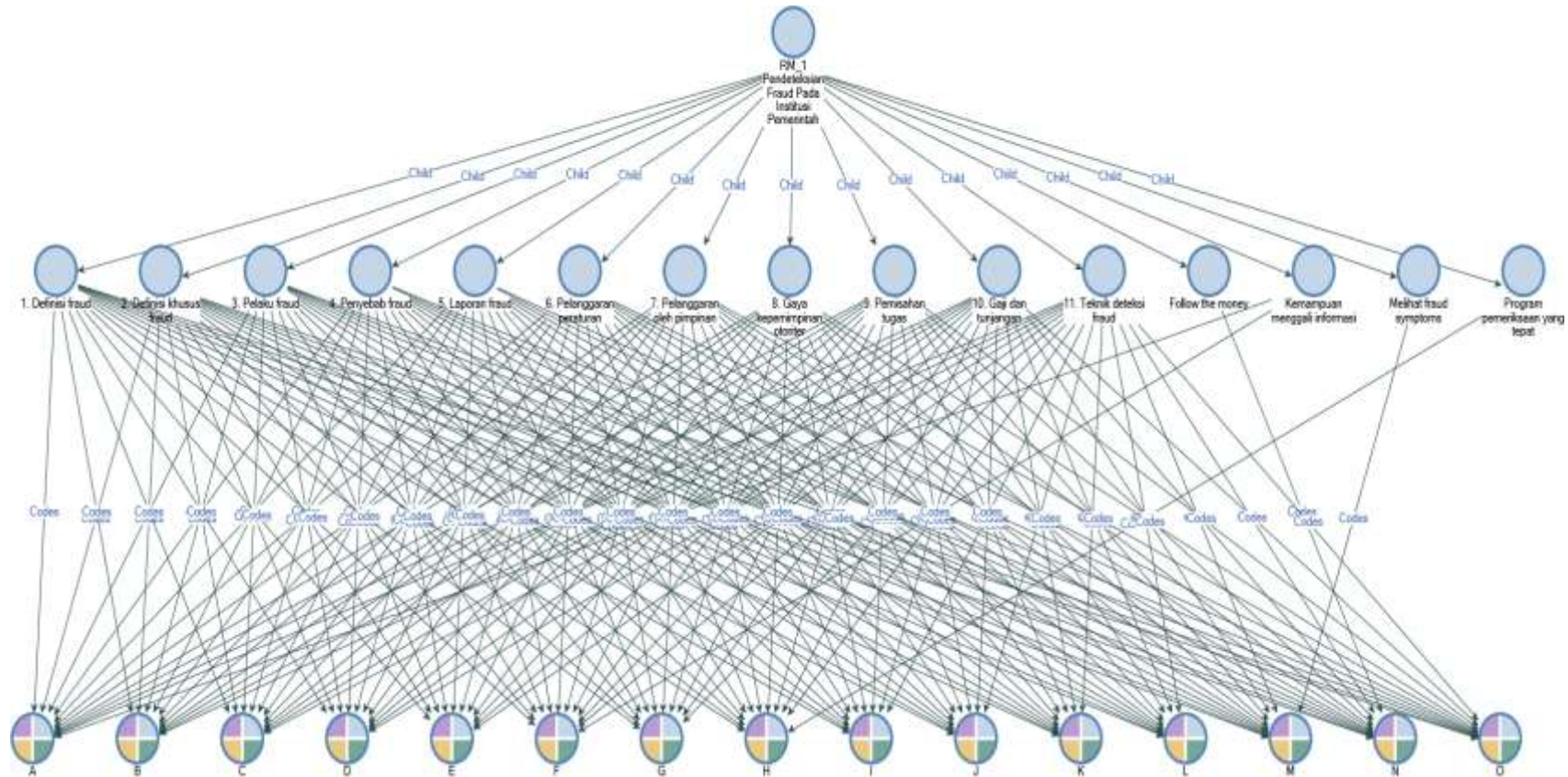
- Apakah pelaksanaan pemeriksaan investigatif dapat menjamin proses pendeteksian *fraud* menjadi lebih cepat?

P.9 Pengaruh *Whistleblowing* dan Deteksi *Fraud*

- Apakah *whistleblowing* mempunyai peran sebagai upaya untuk mendeteksi *fraud* ?
- Bagaimanakah meningkatkan sistem deteksi melalui *whistleblowing* agar dapat mendeteksi lebih banyak kasus *fraud* ?
 1. Memaksimalkan *whistleblowing*
 2. Membayar *whistleblower*
 3. Sosialisasi *whistleblowing*
 4. Meningkatkan perlindungan terhadap *whistleblower*
- Apakah penerapan *whistleblowing* memiliki dampak pada menurunnya angka *fraud* ?

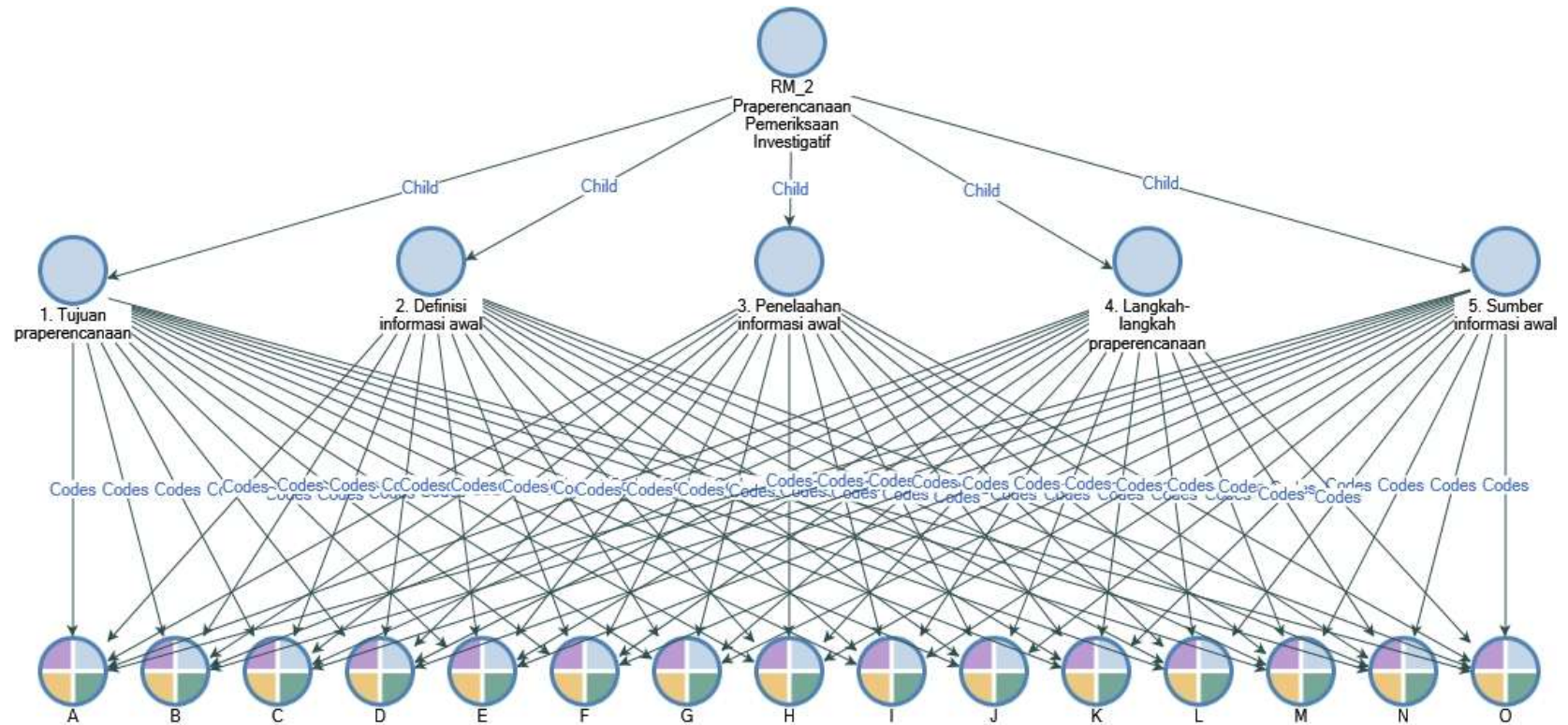
Lampiran 3

Model Studi Lapangan Per Item Pendeteksian *Fraud* pada Institusi Pemerintah



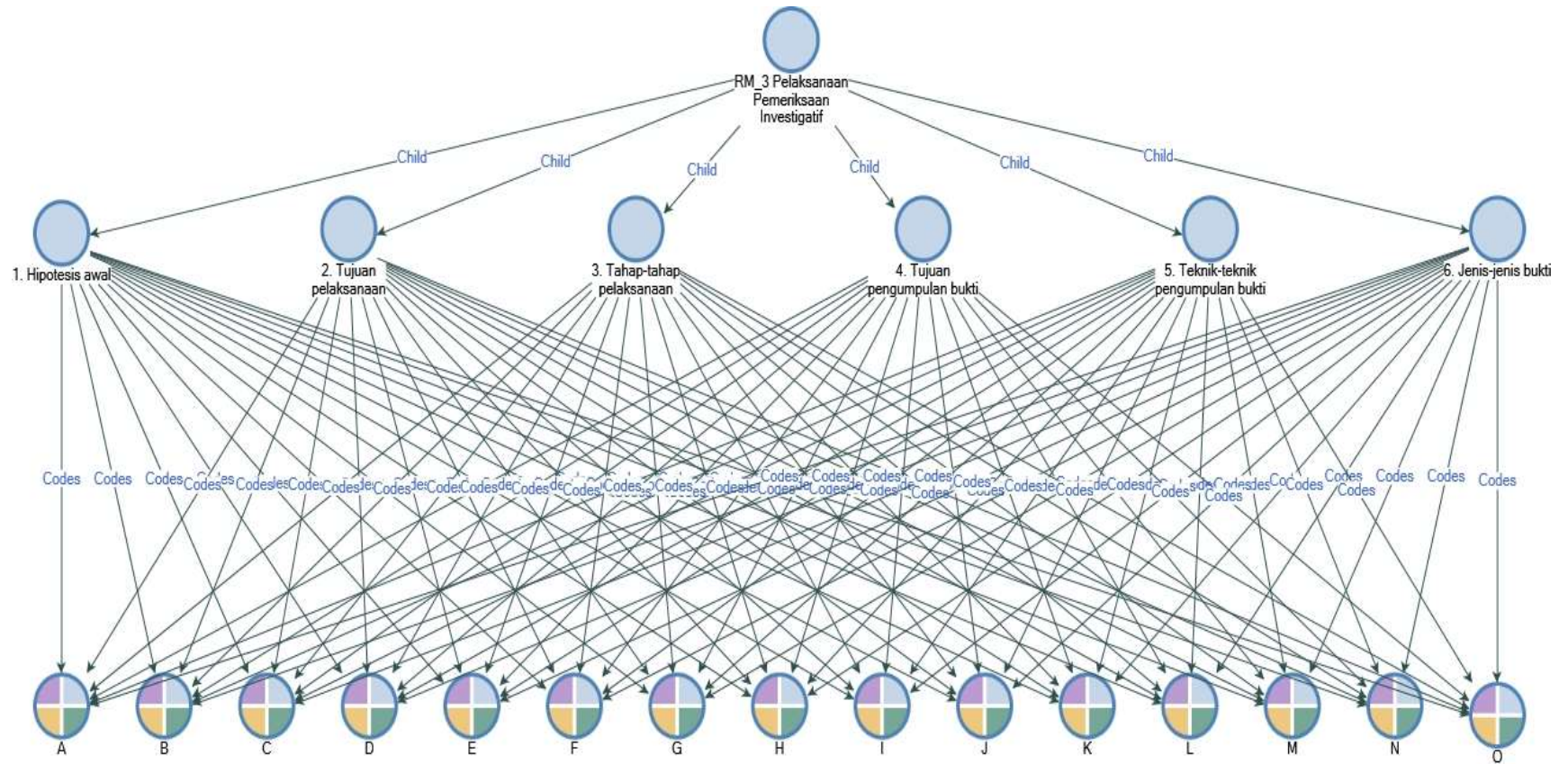
Lampiran 4

Model Studi Lapangan Per Item Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif



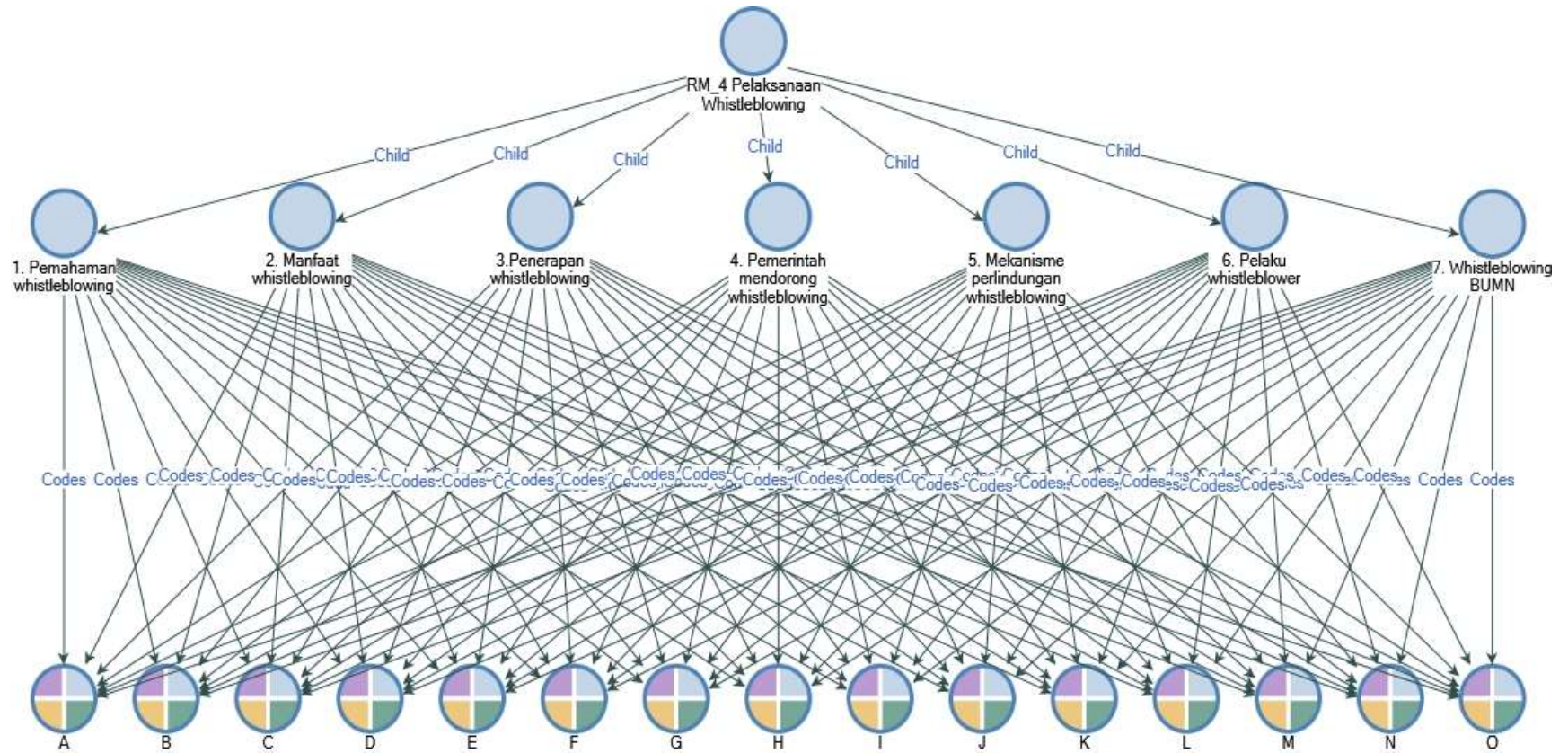
Lampiran 5

Model Studi Lapangan Per Item Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif



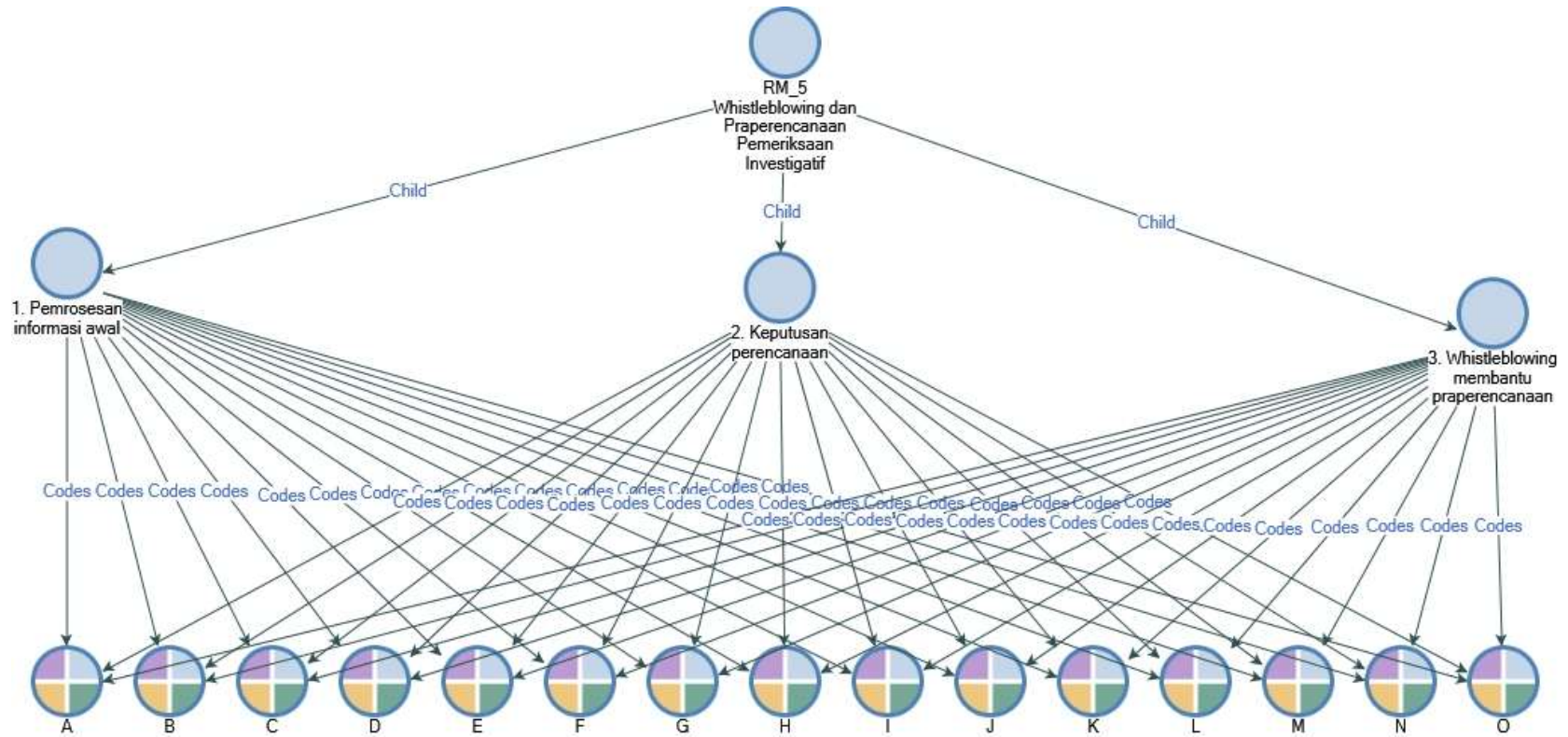
Lampiran 6

Model Studi Lapangan Per Item Pelaksanaan *Whistleblowing*



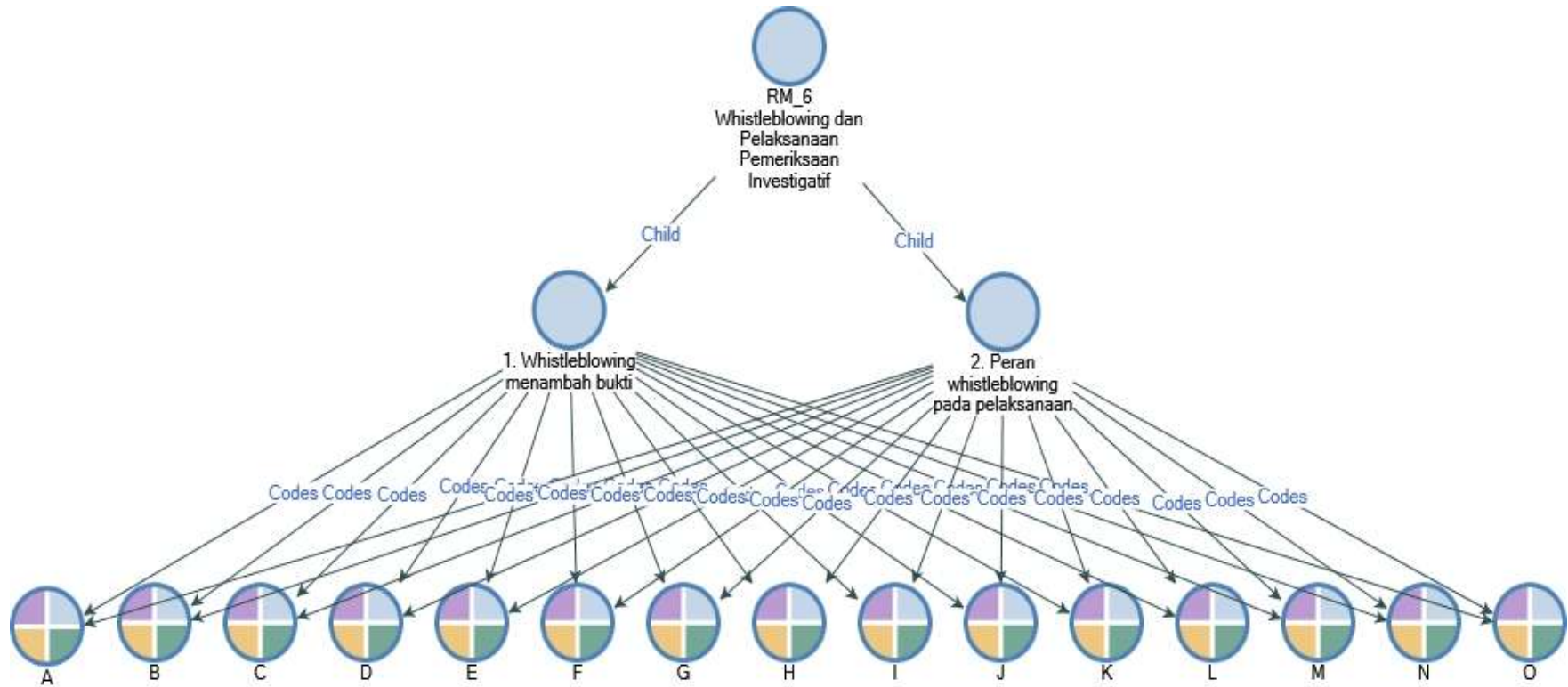
Lampiran 7

Model Studi Lapangan Lapangan Per Item *Whistleblowing* dan Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif



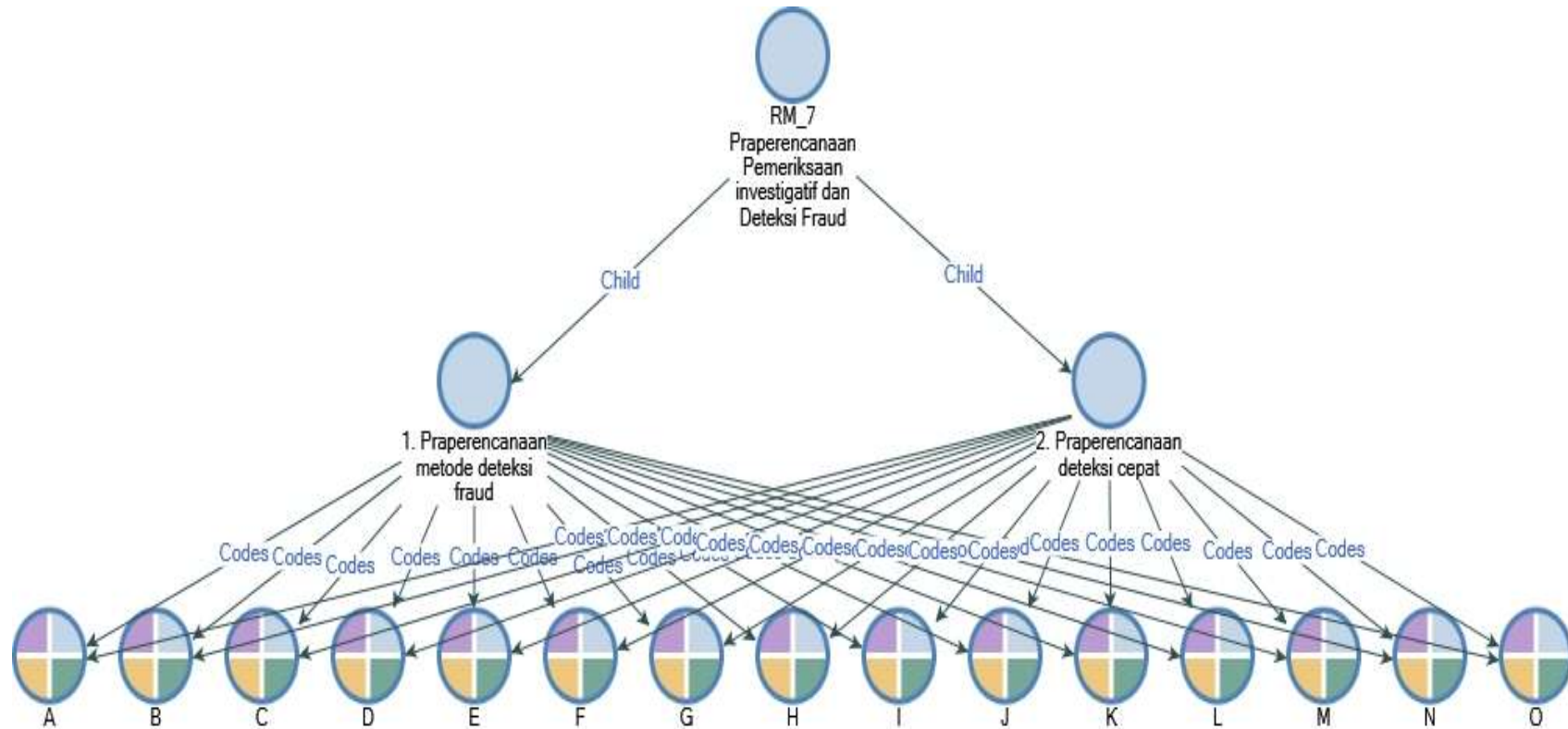
Lampiran 8

Model Studi Lapangan Lapangan Per Item *Whistleblowing* dan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif



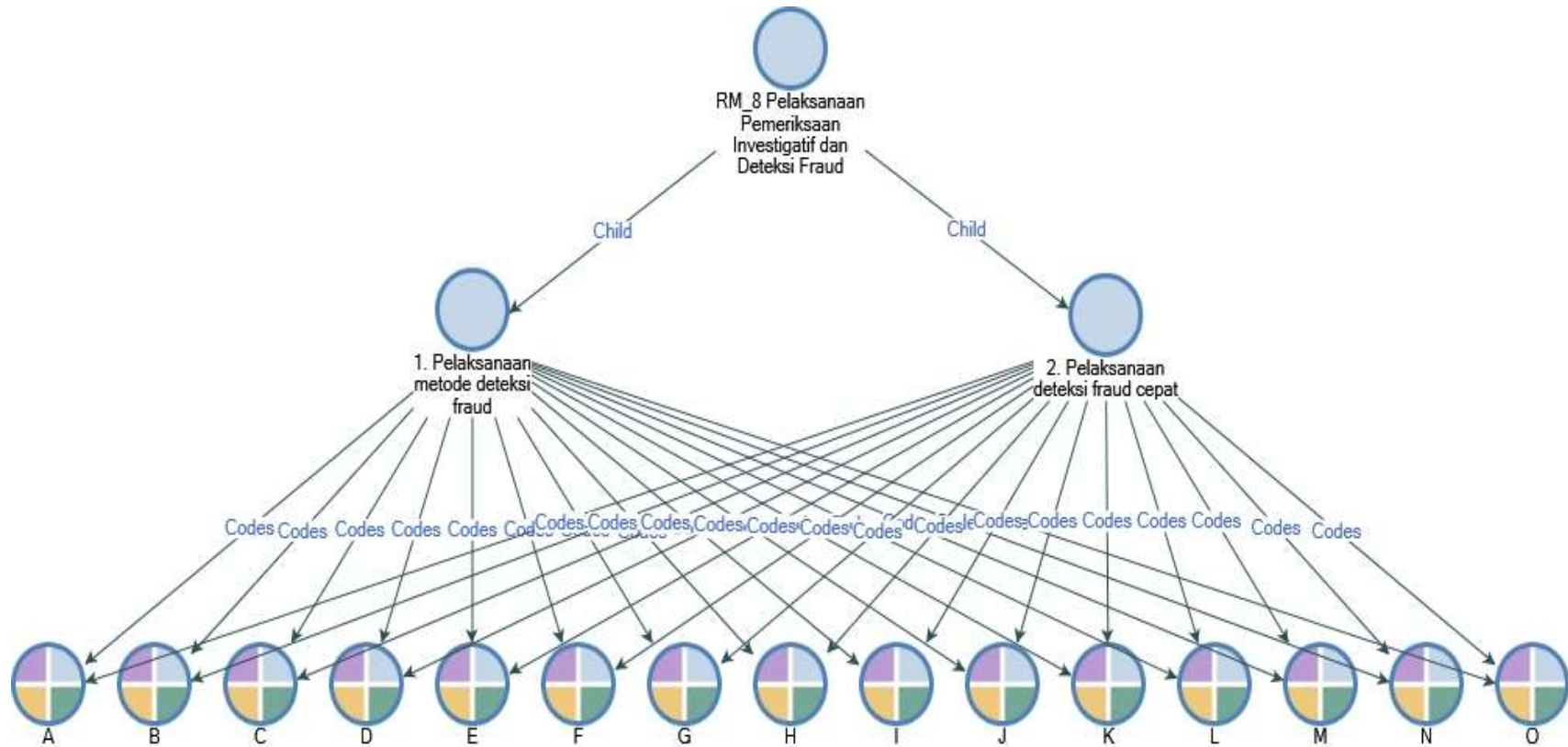
Lampiran 9

Model Studi Lapangan Lapangan Per Item Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif dan Pendeteksian *Fraud*



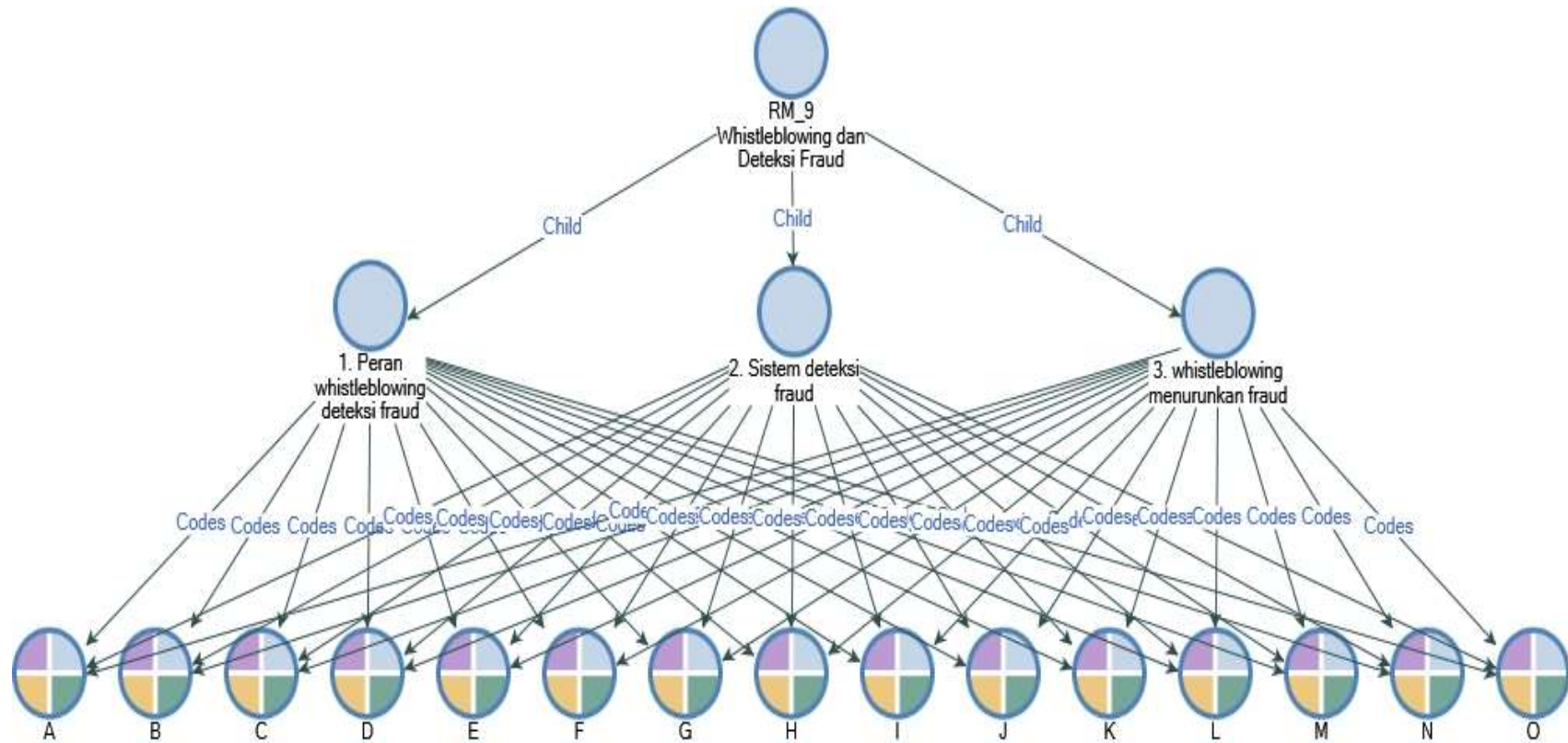
Lampiran 10

Model Studi Lapangan Per Item Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Pendeteksian *Fraud*



Lampiran 11

Model Studi Lapangan Per Item *Whistleblowing* dan Pendeteksian *Fraud*



Q.1. Pendeteksian Fraud

Pewawancara

Apakah menurut anda fraud merupakan tindakan melanggar hukum dan merugikan orang lain ?

Informan G

Ya yang membedakan dengan error adalah unsur kesengajaannya.

Pewawancara

Apakah perbuatan merugikan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan merupakan jenis-jenis fraud?

Informan G

Iya ada tujuh jenis fraud secara khusus.

Pewawancara

Apakah pelaku fraud dapat berasal dari internal dan eksternal? Siapa sajakah yang dapat disebut pelaku internal dan siapakah yang dapat disebut pelaku eksternal?

Informan G

Macam-macam sih tergantung kasusnya, ada yang internal saja, ada yang eksternal saja, ada yang internal dan eksternal sama-sama melakukan fraud

Pewawancara

Apakah arogansi, kemampuan, peluang, tekanan, dan rasionalisasi merupakan penyebab terjadinya fraud?

Informan G

Ya Tidak hanya salah satu tetapi bisa gabungan

Pewawancara

Apakah adanya laporan fraud dapat mengindikasikan tingginya risiko fraud?

Informan G

Kita tidak bisa serta merta menilai ketika ada laporan fraud berarti ada fraud yang terjadi. Mesti dipastikan dulu, dan memastikannya itu nggak gampang

Pewawancara

Apakah adanya pelanggaran peraturan dapat mengindikasikan tingginya risiko fraud?

Informan G

Iya pelanggaran peraturan bisa mengindikasikan adanya fraud

Pewawancara

Apakah pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dapat lebih meningkatkan risiko terjadinya fraud?

Informan G

Apalagi pelanggaran yang dilakukan pimpinan indikasi fraudnya lebih tinggi

Pewawancara

Apakah pimpinan organisasi yang memiliki gaya manajemen yang otoriter dapat mendorong terjadinya fraud?

Informan G

Ya

Pewawancara

Apakah dengan adanya pemisahan tugas dapat menurunkan risiko terjadinya fraud?

Informan G

Ya

Pewawancara

Apakah besarnya gaji dan tunjangan baik pegawai maupun pimpinan mempengaruhi tingkat risiko adanya fraud?

Informan G

Benar, pegawai yang gajinya cukup dan sesuai beban tugas dan risiko dari pekerjaannya kemungkinan kecil melakukan fraud

Pewawancara

Teknik apa saja yang digunakan untuk mendeteksi fraud? Pengendalian internal, fraud auditing, fraud hotline, kebijakan whistleblowing, pelatihan pencegahan dan pendeteksian fraud, data mining.

Informan G

Ya dari a sampai dengan f

Pewawancara

Adakah hal/aspek/faktor lain menurut saudara yang dibutuhkan untuk mendeteksi adanya fraud?

Informan G

Tidak ada

Q.2. Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif

Pewawancara

Apakah praperencanaan pemeriksaan investigatif dilakukan untuk pengambilan keputusan pelaksanaan pemeriksaan investigatif?

Informan G

Dilakukan praperencanaan dahulu, perencanaan baru pelaksanaan pemeriksaan investigatif

Pewawancara

Apakah informasi awal adalah keterangan permulaan mengenai suatu penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, fraud, serta ketidakpatutan yang telah/sedang dan akan terjadi?

Informan G

Ya

Pewawancara

Apakah setiap informasi awal yang diterima perlu dilakukan penelaahan terlebih dahulu?

Informan G

Penelaahan informasi awal baru bisa diproses

Pewawancara

Apa saja langkah-langkah proses praperencanaan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK? Memperoleh informasi awal, memverifikasi informasi awal, menganalisis informasi awal, menyimpulkan hasil analisis informasi awal?

Informan G

Ya langkahnya seperti itu

Pewawancara

Dari mana sajakah sumber informasi awal yang digunakan BPK dalam praperencanaan pemeriksaan? Temuan pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, inisiatif badan, eksternal BPK (Instansi pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, laporan hasil pemeriksaan APIP dan laporan pengaduan masyarakat/whistleblowing)

Informan G

Sumbernya banyak dari LHP, TP, dari eksternal juga ada seperti KPK

Pewawancara

Adakah hal/aspek/faktor lain menurut saudara yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praperencanaan pemeriksaan investigatif?

Informan G

Laporan Aparat Penegak Hukum (APH)

Q.3. Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Pewawancara

Apakah pada tahap pelaksanaan pemeriksaan investigatif, pemeriksa telah memiliki hipotesis awal yang berisi mengenai: apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana PITP dilakukan/ kerugian yang dapat dinilai dalam bentuk uang yang terjadi?

Informan G

Iya

Pewawancara

Apakah pelaksanaan pemeriksaan investigatif dilakukan untuk mengumpulkan bukti untuk mendukung hipotesis?

Informan G

Tujuannya memang itu

Pewawancara

Apa saja tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK? mengumpulkan bukti, menganalisis dan mengevaluasi bukti, menyusun konsep simpulan, mendiskusikan konsep simpulan

Informan G

Semua tahapan yang disebutkan sudah benar

Pewawancara

Apakah pelaksanaan pengumpulan bukti bertujuan untuk melengkapi bukti pemeriksaan yang diperlukan dalam rangka mengungkap fakta dan proses kejadian, sebab dan akibat PIPT serta pihak yang diduga terkait PITP?

Informan G

Ya

Pewawancara

Apa saja teknik-teknik pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK? Inspeksi, Observasi, Konfirmasi eksternal, Perhitungan ulang, Pelaksanaan kembali, Prosedur analitis Permintaan keterangan

Informan G

kurang lebih sama, intinya untuk mengejar informasi

Pewawancara

Apakah pada saat pemeriksa mengumpulkan bukti, pemeriksa harus terlebih dahulu memahami jenis-jenis bukti pemeriksaan yang harus dikumpulkan dan keterkaitan antara jenis bukti dengan alat bukti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Informan G

Bukti harus relevan dengan peraturan perundang-undangan

Pewawancara

Adakah hal/aspek/faktor lain menurut saudara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif?

Informan G

Melakukan Evaluasi dan Analisis atas bukti yang diperoleh

Q.4. Whistleblowing

Pewawancara

Apakah whistleblowing merupakan tindakan seorang informan yang mengungkapkan fraud dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk menghentikan fraud?

Informan G

Tujuan utama biasanya untuk mengungkap fraud, tapi bisa jadi dia punya motif selain itu

Pewawancara

Apakah whistleblowing bermanfaat dan penting bagi institusi pemerintah?

Informan G

Bermanfaat dan beberapa tahun ini digalakkan pada seluruh instansi pemerintah untuk membangun sistem whistleblowing

Pewawancara

Apakah institusi pemerintah telah menerapkan whistleblowing secara efektif?

Informan G

Saya kira belum efektif ya. Kendalanya banyak dari kurang anggaran sampai pengelolannya. Ada yang sepenuhnya mengelola sendiri dari internal, ada yang menggunakan jasa pihak ketiga tapi ini biayanya tidak sedikit

Pewawancara

Apakah institusi pemerintah mendorong pelaksanaan whistleblowing secara internal?

Informan G

Ya

Pewawancara

Apakah institusi pemerintah memiliki mekanisme untuk melindungi whistleblower?

Informan G

Tidak

Pewawancara

Apakah whistleblower dapat berasal dari pihak internal dan eksternal?

Informan G

Ya

Pewawancara

Menurut anda, whistleblowing dari dari BUMN lebih sering digunakan daripada whistleblowing dari kementerian/lembaga?

Informan G

Ya

Q.5. Whistleblowing dan Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif

Pewawancara

Apakah informasi awal yang bersumber dari whistleblowing diproses sebagai informasi awal dalam praperencanaan pemeriksaan?

Informan G

Ya, namun perlu penelaahan awal terlebih dahulu untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat digunakan untuk menyusun prediksi

Pewawancara

Apakah informasi awal yang bersumber dari whistleblowing pada praperencanaan pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan pemeriksaan?

Informan G

Tidak mutlak, namun sebagai salah satu informasi awal yang dapat ditelaah dengan informasi lainnya (selain whistleblowing), hingga keseluruhan informasi awal tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan perencanaan pemeriksaan

Pewawancara

Apakah dengan adanya whistleblowing dapat membantu proses praperencanaan pemeriksaan investigatif?

Informan G

Ya, tetapi setelah dilakukan telaahan sederhana/awal bahwa informasi tersebut valid dan kompeten

Q.6. Whistleblowing dan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Pewawancara

Apakah informasi dari whistleblowing dapat menambah bukti dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif?

Informan G

Informasi dari whistleblowing merupakan petunjuk awal dan dapat menambah bukti jika telah dilakukan penelaahan dan penelusuran lebih lanjut atau proses pembuktian

Pewawancara

Apakah peran whistleblowing dapat membantu pelaksanaan pemeriksaan investigatif menjadi lebih baik?

Informan G

Informasi dari whistleblowing merupakan petunjuk atas terjadinya suatu fraud. Bukti-bukti atas fraud harus berterima secara hukum, oleh karena itu, informasi dari suatu sistem whistleblowing untuk menjadi bukti atas suatu fraud harus melalui proses hukum acara pidana.

Q.7 Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif dan Deteksi Fraud

Pewawancara

Apakah praperencanaan pemeriksaan investigatif dapat dijadikan sebagai metode yang tepat untuk mendeteksi fraud?

Informan G

Proses praperencanaan perlu dilakukan, diantaranya pengumpulan informasi awal. Semakin banyak informasi yang diperoleh akan semakin memudahkan dalam menyusun hipotesa awal, namun perlu dilakukan peelaahan untuk menyaring informasi mana yang relevan, valid, dan kompeten yang juga termasuk dalam pra perencanaan

Pewawancara

Apakah praperencanaan pemeriksaan investigatif dapat menjamin proses pendeteksian fraud menjadi lebih cepat?

Informan G

Ya, semakin banyak informasi awal yang diperoleh dan proses penelaahan terhadap informasi awal tersebut dilakukan dengan tepat maka pendeteksian fraud menjadi lebih efektif.

Q.8. Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Deteksi Fraud

Pewawancara

Apakah pelaksanaan pemeriksaan investigatif dapat dijadikan sebagai metode yang tepat untuk mendeteksi fraud?

Informan G

Setelah melakukan proses pra perencanaan dan perencanaan yang menghasilkan hipotesa awal atas indikasi adanya fraud, maka diperlukan pemeriksaan investigatif untuk proses pembuktian bahwa penyimpangan tersebut memang atau tidak terjadi, sehingga pelaksanaan investigatif merupakan metode yang tepat.

Pewawancara

Apakah pelaksanaan pemeriksaan investigatif dapat menjamin proses pendeteksian fraud menjadi lebih cepat?

Informan G

Ya, karena FRAUD merupakan tindakan yang biasanya disembunyikan atau tidak dapat dideteksi/diketahui jika tidak dilakukan pembuktian atas indikasi tersebut, sehingga untuk pembuktiannya perlu dilakukan pemeriksaan investigatif.

Q.9. Whistleblowing dan Deteksi Fraud

Pewawancara

Apakah whistleblowing mempunyai peran sebagai upaya untuk mendeteksi fraud ?

Informan G

Whistleblowing biasanya memiliki perananan penting dan/atau utama karena merupakan informasi yang valid dan kompeten dan dapat menjadi petunjuk bagi pemeriksa untuk mendapatkan Direct Evidence yang mendukung terjadinya penyimpangan.

Pewawancara

Bagaimanakah meningkatkan sistem deteksi melalui whistleblowing agar dapat mendeteksi lebih banyak kasus fraud? Memaksimalkan whistleblowing, Membayar whistleblower, Sosialisasi whistleblowing, Meningkatkan perlindungan terhadap whistleblower

Informan G

Ya semuanya

Pewawancara

Apakah penerapan whistleblowing memiliki dampak pada menurunnya angka fraud ?

Informan G

Secara argumentasi rasional ya, namun perlu didukung dengan data yang valid.

Pewawancara

Apakah terdapat faktor lain selain whistleblowing, praperencanaan pemeriksaan investigatif, dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang efektif dalam mendeteksi fraud?

Informan G

Tidak ada

Pewawancara

Apakah pemahaman entitas yang merupakan bagian dari pelaksanaan pemeriksaan investigatif berpengaruh dalam mendeteksi fraud?

Informan G

Ya dengan memahami entitas, termasuk pengendalian internalnya maka akan diketahui celah yang memungkinkan terjadinya fraud

Q.1. Pendeteksian Fraud

Pewawancara

Apakah menurut anda fraud merupakan tindakan melanggar hukum dan merugikan orang lain ?

Informan J

Ada perbuatan curang, disengaja atau niatan, dan menimbulkan kerugian

Pewawancara

Apakah perbuatan merugikan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan merupakan jenis-jenis fraud?

Informan J

Sebutan lebih spesifiknya tindak pidana korupsi, sesuai KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ada tujuh, sesuai yang mbak sebutkan tadi (merugikan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan)

Pewawancara

Apakah pelaku fraud dapat berasal dari internal dan eksternal? Siapa sajakah yang dapat disebut pelaku internal dan siapakah yang dapat disebut pelaku eksternal?

Informan J

Bisa dari internal dan eksternal

Pewawancara

Apakah arogansi, kemampuan, peluang, tekanan, dan rasionalisasi merupakan penyebab terjadinya fraud?

Informan J

Terutama tekanan dan peluang

Pewawancara

Apakah adanya laporan fraud dapat mengindikasikan tingginya risiko fraud?

Informan J

Ya

Pewawancara

Apakah adanya pelanggaran peraturan dapat mengindikasikan tingginya risiko fraud?

Informan J

Ya

Pewawancara

Apakah pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dapat lebih meningkatkan risiko terjadinya fraud?

Informan J

Ya, karena pimpinan adalah decision make

Pewawancara

Apakah pimpinan organisasi yang memiliki gaya manajemen yang otoriter dapat mendorong terjadinya fraud?

Informan J

Ya

Pewawancara

Apakah dengan adanya pemisahan tugas dapat menurunkan risiko terjadinya fraud?

Informan J

Asal tidak ada kolusi, pemisahan tugas efektif menurunkan risiko fraud.

Pewawancara

Apakah besarnya gaji dan tunjangan baik pegawai maupun pimpinan mempengaruhi tingkat risiko adanya fraud?

Informan J

Ya

Pewawancara

Teknik apa saja yang digunakan untuk mendeteksi fraud? Pengendalian internal, fraud auditing, fraud hotline, kebijakan whistleblowing, pelatihan pencegahan dan pendeteksian fraud, data mining.

Informan J

Ya semuanya

Pewawancara

Adakah hal/aspek/faktor lain menurut saudara yang dibutuhkan untuk mendeteksi adanya fraud?

Informan J

Tidak ada

Q.2. Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif

Pewawancara

Apakah praperencanaan pemeriksaan investigatif dilakukan untuk pengambilan keputusan pelaksanaan pemeriksaan investigatif?

Informan J

Tahapannya seperti itu

Pewawancara

Apakah informasi awal adalah keterangan permulaan mengenai suatu penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, fraud, serta ketidakpatutan yang telah/sedang dan akan terjadi?

Informan J

Informasi awal isinya berupa keterangan awal mengenai fraud yang terjadi

Pewawancara

Apakah setiap informasi awal yang diterima perlu dilakukan penelaahan terlebih dahulu?

Informan J

Ketika kita dapat informasi awal harus ditelaah terlebih dahulu

Pewawancara

Apa saja langkah-langkah proses praperencanaan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK? Memperoleh informasi awal, memverifikasi informasi awal, menganalisis informasi awal, menyimpulkan hasil analisis informasi awal?

Informan J

Setelah dapat informasi awal, diverifikasi, dianalisis kemudian disimpulkan

Pewawancara

Dari mana sajakah sumber informasi awal yang digunakan BPK dalam praperencanaan pemeriksaan? Temuan pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, inisiatif badan, eksternal BPK (Instansi pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, laporan hasil pemeriksaan APIP dan laporan pengaduan masyarakat/whistleblowing)

Informan J

Ya

Pewawancara

Adakah hal/aspek/faktor lain menurut saudara yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praperencanaan pemeriksaan investigatif?

Informan J

Tidak

Q.3. Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Pewawancara

Apakah pada tahap pelaksanaan pemeriksaan investigatif, pemeriksa telah memiliki hipotesis awal yang berisi mengenai: apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana PITP dilakukan/ kerugian yang dapat dinilai dalam bentuk uang yang terjadi?

Informan J

Iya telah memiliki hipotesis awal hasil dari praperencanaan pemeriksaan investigative

Pewawancara

Apakah pelaksanaan pemeriksaan investigatif dilakukan untuk mengumpulkan bukti untuk mendukung hipotesis?

Informan J

Ya

Pewawancara

Apa saja tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK? mengumpulkan bukti, menganalisis dan mengevaluasi bukti, menyusun konsep simpulan, mendiskusikan konsep simpulan

Informan J

Ya

Pewawancara

Apakah pelaksanaan pengumpulan bukti bertujuan untuk melengkapi bukti pemeriksaan yang diperlukan dalam rangka mengungkap fakta dan proses kejadian, sebab dan akibat PIPT serta pihak yang diduga terkait PITP?

Informan J

untuk melengkapi bukti untuk mengungkap fakta dan proses kejadian

Pewawancara

Apa saja teknik-teknik pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK? Inspeksi, Observasi, Konfirmasi eksternal, Perhitungan ulang, Pelaksanaan kembali, Prosedur analitis Permintaan keterangan

Informan J

Ya

Pewawancara

Apakah pada saat pemeriksa mengumpulkan bukti, pemeriksa harus terlebih dahulu memahami jenis-jenis bukti pemeriksaan yang harus dikumpulkan dan keterkaitan antara jenis bukti dengan alat bukti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Informan J

Bukti yang bisa dipakai di pengadilan

Pewawancara

Adakah hal/aspek/faktor lain menurut saudara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif?

Informan J

Ya

Q.4. Whistleblowing

Pewawancara

Apakah whistleblowing merupakan tindakan seorang informan yang mengungkapkan fraud dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk menghentikan fraud?

Informan J

Ya

Pewawancara

Apakah whistleblowing bermanfaat dan penting bagi institusi pemerintah?

Informan J

Ya

Pewawancara

Apakah institusi pemerintah telah menerapkan whistleblowing secara efektif?

Informan J

Ya

Pewawancara

Apakah institusi pemerintah mendorong pelaksanaan whistleblowing secara internal?

Informan J

Sudah, yang terbaru pemerintah membuat sistem whistleblowing yang terintegrasi antar 17 kementerian lembaga dengan KPK dan LPSK

Pewawancara

Apakah institusi pemerintah memiliki mekanisme untuk melindungi whistleblower?

Informan J

Ya

Pewawancara

Apakah whistleblower dapat berasal dari pihak internal dan eksternal?

Informan J

Kalau dari internal biasanya informasinya lebih lengkap. Eksternal itu misal dari rekanan yang gagal pelelangan karena dicurangi atau dari masyarakat

Pewawancara

Menurut anda, whistleblowing dari BUMN lebih sering digunakan daripada whistleblowing dari kementerian/lembaga?

Informan J

Tidak

Q.5. Whistleblowing dan Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif

Pewawancara

Apakah informasi awal yang bersumber dari whistleblowing diproses sebagai informasi awal dalam praperencanaan pemeriksaan?

Informan J

Ya

Pewawancara

Apakah informasi awal yang bersumber dari whistleblowing pada praperencanaan pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan pemeriksaan?

Informan J

Tidak sebagai alasan utama tetapi sebagai pendukung saja

Pewawancara

Apakah dengan adanya whistleblowing dapat membantu proses praperencanaan pemeriksaan investigatif?

Informan J

Ya

Q.6. Whistleblowing dan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Pewawancara

Apakah informasi dari whistleblowing dapat menambah bukti dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif?

Informan J

Ya, karena merupakan petunjuk atau dapat menjadi Indirect Evidence dalam hal memudahkan pemeriksa untuk mendapatkan Direct Evidence terkait relevansinya dengan penyimpangan

Pewawancara

Apakah peran whistleblowing dapat membantu pelaksanaan pemeriksaan investigatif menjadi lebih baik?

Informan J

Salah satu faktor untuk menentukan pelaksanaan pemeriksaan investigatif menjadi lebih baik atau buruk adalah validitas dan keandalan informasi. Apabila suatu sistem whistleblowing mampu menghasilkan informasi yang valid dan andal maka proses pelaksanaan pemeriksaan menjadi lebih baik, begitu pula sebaliknya. Whistleblowing akan berperan untuk membantu pelaksanaan

pemeriksaan investigatif menjadi lebih baik hanya apabila didukung oleh suatu SDM yang berintegritas tinggi.

Q.7 Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif dan Deteksi Fraud

Pewawancara

Apakah praperencanaan pemeriksaan investigatif dapat dijadikan sebagai metode yang tepat untuk mendeteksi fraud?

Informan J

Tujuan dari praperencanaan pemeriksaan investigatif adalah untuk menetapkan adanya alasan (prediksi) yang cukup kuat dan akurat sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pewawancara

Apakah praperencanaan pemeriksaan investigatif dapat menjamin proses pendeteksian FRAUD menjadi lebih cepat?

Informan J

Tidak karena meliputi praperencanaan yang panjang yaitu proses persiapan yang bersifat teknis dan dukungan pemeriksaan. Persiapan teknis mencakup penugasan Tim Perencanaan Pemeriksaan Investigatif (TPPI), penyusunan Program Pemeriksaan Investigatif, penentuan kebutuhan sumber daya, persetujuan penugasan, dan penyusunan Program Kerja Perorangan (PKP). Sedangkan persiapan dukungan pemeriksaan meliputi penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD), pencairan biaya pemeriksaan, pengurusan akomodasi serta transportasi ke lokasi selama pemeriksaan, dan penyediaan tenaga ahli jika diperlukan.

Q.8. Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Deteksi Fraud

Pewawancara

Apakah pelaksanaan pemeriksaan investigatif dapat dijadikan sebagai metode yang tepat untuk mendeteksi FRAUD?

Informan J

Pemeriksaan investigatif adalah pemeriksaan yang dirancang dengan tujuan untuk menemukan penyimpangan yang berindikasi tindak pidana.

Pewawancara

Apakah pelaksanaan pemeriksaan investigatif dapat menjamin proses pendeteksian FRAUD menjadi lebih cepat?

Informan J

Tidak, karena pemeriksaan investigatif meliputi proses yang panjang yang dimulai dari pembicaraan pendahuluan dan diakhiri dengan pembicaraan akhir. Selain itu, Tim Pemeriksaan mempertanggung-jawabkan administrasi pelaksanaan pemeriksaan dan menilai kinerja PFP.

Q.9. Whistleblowing dan Deteksi Fraud

Pewawancara

Apakah whistleblowing mempunyai peran sebagai upaya untuk mendeteksi FRAUD ?

Informan J

Ya, karena informasi yang dihasilkan oleh sistem whistleblowing merupakan informasi permulaan untuk mendeteksi FRAUD.

Pewawancara

Bagaimanakah meningkatkan sistem deteksi melalui whistleblowing agar dapat mendeteksi lebih banyak kasus FRAUD? Memaksimalkan whistleblowing, Membayar whistleblower, Sosialisasi whistleblowing, Meningkatkan perlindungan terhadap whistleblower

Informan J

Memaksimalkan whistleblowing iya, karena maksimalisasi pada sistem whistleblowing akan memberikan informasi permulaan yang baik atas suatu fraud. Membayar whistleblower tidak, karena informasi yang dihasilkan oleh whistleblower yang dibayar akan menurunkan validitas dan keandalan informasi yang dihasilkan. Sosialisasi whistleblowing iya. Karena lebih efektif diterapkan untuk memerangi fraud dibandingkan internal audit, eksternal audit, maupun Sistem Pengendalian Internal. Meningkatkan perlindungan terhadap whistleblower iya, karena seseorang yang berasal dari internal organisasi umumnya akan menghadapi dilema dalam memutuskan apakah harus diungkapkan atau membiarkannya tetap tersembunyi. Sebagian orang memandang whistleblower sebagai pengkhianat yang melanggar norma loyalitas organisasi, sebagian lainnya memandang whistleblower sebagai pelindung heroik terhadap

nilai-nilai yang dianggap lebih penting dari loyalitas kepada organisasi. Pandangan yang bertentangan tersebut kerap menjadikan calon whistleblower berada dalam dilema kebimbangan menentukan sikap yang pada akhirnya dapat mendistorsi intensi whistleblowing. Oleh karena itu, perlindungan terhadap whistleblower akan meningkatkan kemampuan sistem whistleblowing dalam mendeteksi fraud.

Pewawancara

Apakah penerapan whistleblowing memiliki dampak pada menurunnya angka FRAUD ?

Informan J

Sistem whistleblowing sebenarnya adalah sebuah tindakan untuk mengungkapkan informasi dari sebuah organisasi privat ataupun publik untuk membuka kasus-kasus korupsi yang berbahaya kepada masyarakat sehingga organisasi privat maupun publik akan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Pewawancara

Apakah terdapat faktor lain selain whistleblowing, praperencanaan pemeriksaan investigatif, dan pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang efektif dalam mendeteksi fraud?

Informan J

Tidak ada Whistleblowing lebih efektif diterapkan untuk memerangi fraud dibandingkan internal audit, eksternal audit, maupun Sistem Pengendalian Internal

Pewawancara

Apakah pemahaman entitas yang merupakan bagian dari pelaksanaan pemeriksaan investigatif berpengaruh dalam mendeteksi fraud?

Informan J

Ya